



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
LOMBOK-GILI TRAMENA
TAHUN 2020-2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata nasional;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK
DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI
TRAMENA TAHUN 2020-2044.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
3. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
4. DPN Lombok, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang selanjutnya disebut DPN Lombok-Gili Tramena adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional yang meliputi kawasan strategis Pariwisata nasional Lombok-Gili Tramena dan sekitarnya.
5. Rencana Induk DPN Lombok-Gili Tramena yang selanjutnya disebut RIDPN Lombok-Gili Tramena adalah dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisata terpadu di DPN Lombok-Gili Tramena tahun 2020-2044.

6. Pemangku . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

Pasal 2

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisata secara terpadu di DPN Lombok-Gili Tramena.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
 - e. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur; dan
 - f. Pemerintah Kota Mataram.

Pasal 3

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
 - b. sasaran dan arah pengembangan;
 - c. pelaksanaan pengembangan; dan
 - d. rencana aksi.

(2) RIDPN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPN Lombok-Gili Tramena;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata;
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena.

Pasal 5

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2020-2044 meliputi:
 - a. tahap pertama tahun 2020 – 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040 – 2044.
- (2) Rencana aksi tahap pertama tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana aksi masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan hasil evaluasi.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena dijabarkan dalam bentuk:
 - a. rencana kerja kementerian/lembaga; dan
 - b. rencana kerja pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena wajib melaksanakan RIDPN Lombok-Gili Tramena yang dijabarkan melalui rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena wajib memelihara dan menjaga fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun sesuai RIDPN Lombok-Gili Tramena.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana; dan
 - c. tata kelola sosial budaya.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam periode 5 (lima) tahun pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Bupati/wali kota pada DPN Lombok-Gili Tramena melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Gubernur Nusa Tenggara Barat dan menteri/pimpinan lembaga terkait melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata berdasarkan hasil laporan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena ditinjau setiap 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Peninjauan kembali RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 210

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Unit Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA
NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA
TAHUN 2020-2044

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian dan harapan besar terhadap sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Perkembangan Pariwisata diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar berupa peningkatan devisa dari kunjungan dan pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman), pendapatan dari wisatawan nusantara (wisnus), dan pembukaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan untuk mewujudkan sasaran pembangunan Pariwisata tersebut telah direncanakan oleh pemerintah pusat melalui pengembangan 10 destinasi Pariwisata prioritas untuk menunjang Bali, termasuk DPN yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Pulau Lombok, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, atau disebut dalam dokumen ini Lombok-Gili Tramena. Keberhasilan penyiapan DPN Lombok-Gili Tramena diharapkan dapat menjadi pengungkit dan bahkan meningkatkan momentum pertumbuhan sektor Pariwisata Indonesia yang dalam kurun waktu tahun 2013-2019 menunjukkan tren yang positif.

Perkembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Perkembangan kunjungan wisman ke Provinsi NTB menunjukkan peningkatan hingga lebih dari 1,4 juta orang pada tahun 2017, sebelum kemudian turun menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2018 sebagai akibat dari gempa bumi di Lombok. Tren yang sama juga terjadi untuk kunjungan wisnus ke Provinsi NTB yang mencapai 2,1 juta perjalanan pada tahun 2017, dan kemudian turun menjadi 1,6 juta perjalanan pada tahun 2018. Terlepas dari tren kunjungan wisatawan, Provinsi NTB tercatat masih menempati posisi ke-18 tujuan wisata se-Indonesia.

Sekitar 47 persen wisman yang berkunjung ke Lombok-Gili Tramena berasal dari Eropa, dan diikuti oleh wisman asal Asia-Pasifik (26 persen), Amerika (14 persen), dan ASEAN (13 persen). Struktur wisman tidak berubah secara signifikan dalam dua tahun terakhir dan menunjukkan bahwa Lombok-Gili Tramena tetap menarik untuk hampir semua pasar sumber internasional.

Bali masih menjadi salah satu pintu masuk penyumbang wisatawan yang besar bagi Lombok-Gili Tramena. Wisatawan yang datang ke Gili Tramena sebanyak 63 persen menggunakan kapal cepat dari Bali, 32 persen menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Lembar, dan 5 persen berasal dari kapal pesiar.

Perkembangan Pariwisata di Lombok-Gili Tramena juga menarik investasi dalam jumlah besar, dan menjadikan Pariwisata sebagai sumber penanaman modal asing terbesar serta penanaman modal dalam negeri kedua terbesar di Provinsi NTB. Penanaman modal asing yang hadir di Lombok-Gili Tramena berasal dari 30 negara dengan investasi terbesar berasal dari Singapura, Prancis, dan Korea Selatan.

Peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi ke Provinsi NTB khususnya DPN Lombok-Gili Tramena, merupakan hasil dari pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok yang memiliki ragam daya tarik wisata yang lengkap mulai dari laut dan bawah laut sampai ke Gunung Rinjani. Selain alam, Pulau Lombok juga memiliki beberapa potensi wisata lain seperti kawasan warisan budaya dan seni lokal, serta kuliner. Potensi wisata ini dapat dinikmati oleh wisatawan dengan mengunjungi desa dan pasar tradisional di Pulau Lombok dan

mengikuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

mengikuti beberapa aktivitas dan kegiatan yang ditawarkan penduduk lokal. Saat ini Lombok dikenal sebagai destinasi Pariwisata halal terbaik di Indonesia, lokasi berselancar (*surfing*) kelima terbaik di Indonesia, lokasi menyelam keenam terbaik di Indonesia, dan memiliki 900 km garis pantai serta lebih dari 50 Gili (pulau-pulau kecil) yang mengelilingi Pulau Lombok. Taman Nasional Gunung Rinjani dan sekitarnya adalah tempat yang signifikan dari beberapa perspektif, termasuk ekologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Keanekaragaman hayati lingkungan di Lombok telah diakui secara global, sejak ditetapkannya *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Rinjani-Lombok Biosphere Reserve* dan *UNESCO Rinjani-Lombok Global Geopark* pada tahun 2018.

Peningkatan aktivitas Pariwisata di Provinsi NTB, khususnya di DPN Lombok-Gili Tramena, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan atraksi, aksesibilitas, dan amenities yang memadai. Penyediaannya membutuhkan kontribusi dan partisipasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari berbagai Pemangku Kepentingan. Kolaborasi tersebut juga sangat penting untuk menjaga status Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai *Biosphere Reserve* dan *Global Geopark*. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan tersebut membutuhkan kebijakan spesifik untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan yang terpadu.

Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memandu kolaborasi lintas Pemangku Kepentingan dilaksanakan melalui perencanaan secara terpadu yang dituangkan dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena. Penyusunan RIDPN Lombok-Gili Tramena dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek Kepariwisata, infrastruktur, lingkungan, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, dan investasi, serta perkembangan wilayah secara keseluruhan. RIDPN Lombok-Gili Tramena juga diharapkan dapat memberi jawaban bagi permasalahan dan tantangan dalam pengembangan Pariwisata di Lombok-Gili Tramena antara lain:

1. Kurang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. Kurang selarasnya tata kelola dan kelembagaan Pariwisata sebagaimana ditunjukkan oleh dokumen perencanaan yang belum selaras dan kebijakan yang tumpang tindih, dan pembagian kerja para pelaku pembangunan Pariwisata yang belum jelas.
2. Belum tersedianya sumber daya manusia dengan jumlah dan kapasitas yang memadai, serta organisasi masyarakat yang mumpuni untuk mengelola destinasi Pariwisata.
3. Belum optimalnya pengembangan Pariwisata sebagai penggerak perbaikan kondisi sosial ekonomi di Lombok-Gili Tramena. Masyarakat Lombok-Gili Tramena belum mampu menangkap peluang dan menjadikan sektor Pariwisata sebagai salah satu mata pencaharian utama. Pada saat Pariwisata di Lombok-Gili Tramena terus berkembang, beberapa wilayah di Lombok-Gili Tramena masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
4. Belum optimalnya pengalaman wisatawan karena ragam Daya Tarik Wisata (DTW) di Lombok-Gili Tramena yang sebenarnya cukup lengkap belum dikembangkan dengan standar pelayanan pada aspek amenities, atraksi, aksesibilitas yang memadai, dan integrasi pola perjalanan.
5. Belum optimalnya pemasaran Pariwisata Lombok-Gili Tramena karena belum mempunyai strategi pemasaran dan citra (*branding*) Pariwisata yang terfokus dan kuat sesuai potensi dan minat pasar. Saat ini citra Pariwisata Lombok-Gili Tramena masih dipengaruhi oleh pemasaran dan citra (*branding*) Pulau Bali.
6. Belum optimalnya mitigasi bencana. DPN Lombok-Gili Tramena rentan terhadap bahaya alam selama ratusan tahun karena lokasi dan kondisi geografisnya. Fakta bahwa Indonesia terletak di *Ring of Fire*, membuat Indonesia termasuk Lombok, selalu menghadapi risiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, dan tsunami. Gunung Rinjani, salah satu tempat wisata terkenal di Lombok, juga merupakan gunung berapi aktif.
7. Keterbatasan amenities dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan standar Pariwisata. Kondisi ini ditunjukkan antara lain oleh keterbatasan jumlah akomodasi, akses jumlah dan frekuensi penerbangan langsung, serta keterbatasan kapasitas Pelabuhan Lembar untuk melayani penumpang dan barang.

Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena yang terpadu diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dasar, peluang usaha, kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

B. Visi

Visi pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena, yaitu Lombok-Gili Tramena sebagai destinasi yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif serta memberikan pengalaman budaya dan alam yang berkualitas. Visi tersebut mencakup tiga kata kunci utama yang menjadi fokus pendekatan pembangunan Pariwisata di Lombok-Gili Tramena, yaitu:

1. Berkelanjutan (*sustainable*): aspek keberlanjutan dalam kegiatan Pariwisata perlu diterapkan di DPN Lombok-Gili Tramena untuk menghindari eksploitasi berlebihan di dalam pembangunan. Keberlanjutan tidak hanya dalam aspek lingkungan tetapi juga sosial dan ekonomi.
2. Tangguh (*resilient*): setiap kegiatan pembangunan Pariwisata di Lombok-Gili Tramena harus dapat menghadapi goncangan eksternal dan didasarkan pada pertimbangan rencana mitigasi bencana guna terwujudnya lingkungan Pariwisata yang responsif dan aman bagi pengunjung dan pelaku Pariwisata.
3. Inklusif (*Inclusive*): Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena harus memberikan manfaat bagi semua orang. Semua Pemangku Kepentingan memiliki peran penting dalam pembangunan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena.

Tiga kata kunci yang membentuk visi pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena tersebut di atas mencerminkan potensi untuk dapat memberikan pengalaman wisata yang lengkap. Namun ketiga kata kunci tersebut tidak serta merta dituangkan dalam satu citra (*branding*) tertentu. *Branding* Pariwisata Lombok-Gili Tramena perlu menggambarkan semua potensi DPN Lombok-Gili Tramena.

Gambar 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -



Gambar 1. Logo *Branding* Pesona Lombok Sumbawa dan *Friendly Lombok*

Beberapa *branding* yang pernah diperkenalkan untuk Lombok tetap relevan. *Branding* “Pesona Lombok Sumbawa” diperkenalkan pada tahun 2015 sesuai dengan tema Pariwisata yang berkelanjutan dengan mengangkat potensi Pariwisata yang dimiliki Lombok dan Sumbawa sebagai destinasi utama di Indonesia. *Branding* dan slogan “*Friendly Lombok*” juga diperkenalkan pada tahun 2017 untuk memberi pesan tentang citra masyarakat Lombok dan Pulau Lombok yang terbuka untuk pengunjung internasional, dimana wisatawan mancanegara akan disambut kehangatan masyarakat dan iklim di Pulau Lombok. Kedua *branding* tersebut merupakan bagian dari upaya melanjutkan dan mendukung *branding Wonderful Indonesia*. Pada dua tahun terakhir, kedua *branding* ini juga dilengkapi dengan *branding halal-friendly tourism*.

Pada RIDPN Lombok-Gili Tramena, *branding* dan slogan “*Discover Lombok*” ditawarkan untuk melengkapi *branding* yang ada. Slogan “*Discover Lombok*” menggambarkan *branding* DPN Lombok-Gili Tramena secara keseluruhan sesuai dengan potensi, strategi, dan visi Pariwisata Lombok-Gili Tramena yang ada. Slogan “*Discover Lombok*” disertai dengan bentuk melengkung yang menggambarkan ajakan persuasif kepada wisatawan untuk berkunjung ke Lombok-Gili Tramena, serta mengeksplorasi dan menemukan pengalaman wisata yang tidak terdapat di destinasi wisata lain melalui berbagai aktivitas wisata alam, budaya, dan minat khusus seperti petualangan, olahraga seperti menyelam (*diving*), *trekking*, mendaki (*hiking*), paralayang (*paragliding*), berselancar (*surfing*), dan lain-lain sesuai potensi yang ada.

Lombok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Lombok-Gili Tramena banyak diminati oleh wisatawan muda dan hobi berpetualang (*young* dan *adventure travel*), termasuk untuk perjalanan bulan madu, perjalanan olahraga air, *adventure travel*, dan juga *experiential travel*. Pangsa pasar untuk *experiential travel*, wisata generik (terencana), dan wisata masak di Lombok-Gili Tramena juga meningkat. Tren peningkatan ini diperkuat seiring dengan rencana penyelenggaraan MotoGP di Lombok yang membuka segmen pasar baru dengan potensi wisata olahraga non bahari, dan pengembangan kawasan Pariwisata terintegrasi. Rencana acara olahraga berkelas internasional ini akan memperkuat citra DPN Lombok-Gili Tramena sebagai destinasi yang menawarkan wisata dan kegiatan olahraga yang variatif.

Berbagai aktivitas wisatawan tersebut memperhatikan keberlanjutan dari tiga unsur yang mewarnai Kepariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena yaitu darat (gunung, hutan, dan lanskap-lengkungan warna hijau), laut (lengkungan ombak berwarna biru), dan kehangatan iklim/budaya/masyarakat (warna kuning dan oranye) yang sekaligus juga menggambarkan semangat optimisme.



Gambar 2. Logo Branding Discover Lombok

C. Misi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

C. Misi

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi masyarakat dalam mengelola destinasi Pariwisata termasuk mitigasi bencana alam;
3. Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata dalam pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan peluang mata pencaharian bagi masyarakat;
4. Meningkatkan pengalaman wisatawan sebagai hasil dari optimalisasi ragam DTW, peningkatan kualitas dan standar layanan Pariwisata, dan integrasi pola perjalanan;
5. Meningkatkan pemasaran dan *branding* Pariwisata DPN Lombok-Gili Tramena sebagai destinasi wisata utama di Indonesia; dan
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas amenities Pariwisata dan infrastruktur pendukungnya.

D. Tujuan

Pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengelolaan ekowisata dan wisata bahari secara berkelanjutan dan bertanggungjawab;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur aksesibilitas dan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas dan usaha Pariwisata;
3. Meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat yang digerakkan oleh sektor Pariwisata; dan
4. Meningkatkan investasi swasta.

Hasilnya diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar berupa peningkatan devisa dari kunjungan dan pengeluaran wisman, pendapatan dari wisnus, dan pembukaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DPN Lombok-Gili Tramena, dan di Provinsi NTB pada umumnya.

E. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

E. Ruang Lingkup

RIDPN Lombok-Gili Tramena mencakup rencana pembangunan seluruh wilayah destinasi wisata Lombok-Gili Tramena dalam periode 25 tahun, yang dilengkapi dengan rencana pembangunan wilayah destinasi wisata Lombok-Gili Tramena secara terinci untuk 5 tahun pertama. RIDPN Lombok-Gili Tramena disusun melalui serangkaian analisis tentang kondisi dan tantangan pembangunan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena yang diselaraskan dengan aspirasi pelaku kepentingan, yaitu:

1. Analisis kelembagaan, hukum, regulasi, dan kerangka kebijakan yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sektor Pariwisata khususnya di Lombok-Gili Tramena;
2. Analisis permintaan dan peluang pembangunan kawasan destinasi wisata;
3. Analisis kondisi awal (*baseline*) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, atraksi, dan fasilitas bagi wisatawan;
4. Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial-ekonomi, dan warisan budaya, termasuk kesesuaian jenis wisata dengan daya dukung dan daya tampung kawasan wisata;
5. Penyiapan visi, proyeksi pertumbuhan, dan beberapa skenario pembangunan;
6. Perincian skenario pembangunan terpilih yang menjadi dasar perumusan rencana aksi;
7. Penyusunan dokumen RIDPN Lombok-Gili Tramena; dan
8. Pelibatan partisipasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam seluruh tahapan di atas.

Ruang lingkup wilayah dan substansi dari RIDPN Lombok-Gili Tramena mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya, dan memadukan rencana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena ke depan. Peraturan yang menjadi dasar pertimbangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (RIPPARNAS) dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

undangan yang terkait di daerah. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (RIPPARDA), Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029 (RTRW), Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta RTRW dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di DPN Lombok-Gili Tramena, serta Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya. Selain itu juga memperhatikan, beberapa rencana pengelolaan yaitu Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tahun 2014 – 2023 Taman Nasional Gunung Rinjani, *UNESCO Rinjani-Lombok Biosphere Reserve Management Plan*, dan Rinjani-Lombok *UNESCO Global Geopark Management Plan* juga menjadi masukan untuk penyusunan RIDPN Lombok-Gili Tramena.

Delineasi wilayah dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena mencakup KSPN Rinjani dan sekitarnya, KSPN Gili Tramena dan sekitarnya, KSPN Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Mataram Kota dan sekitarnya, dan KPPN Praya-Sade dan sekitarnya. KSPN Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya juga mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Secara administratif, DPN Lombok-Gili Tramena mencakup Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

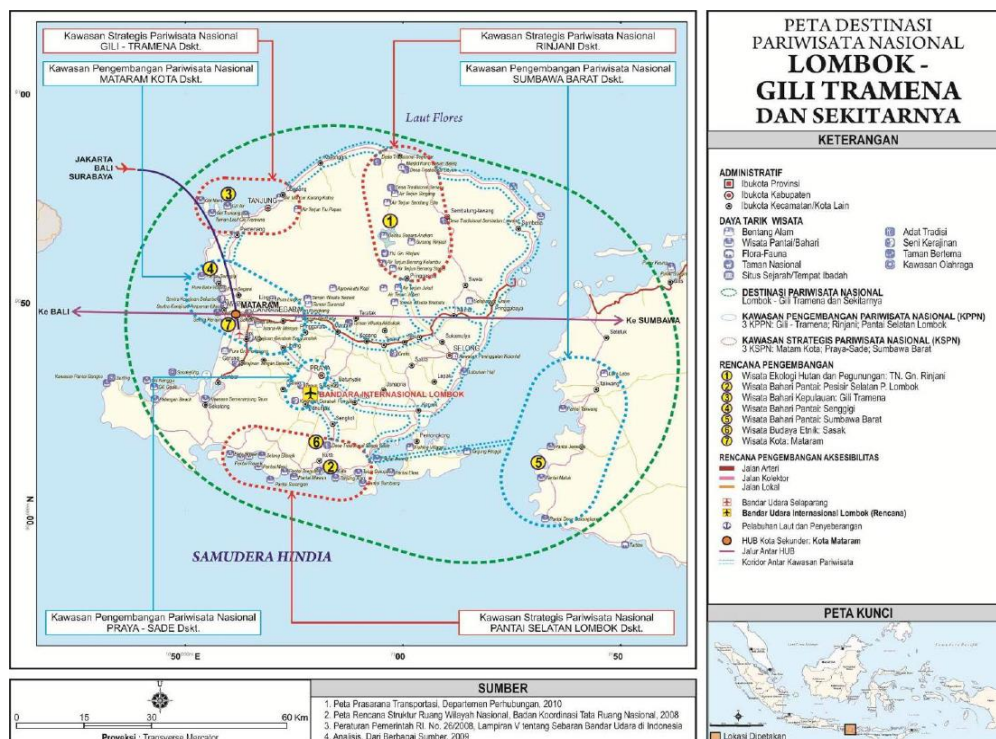
Daerah yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan adalah Pantai Selatan dan Senggigi-Tiga Gili, sedangkan Gunung Rinjani memiliki keterbatasan untuk pengembangan karena merupakan kawasan lindung yang pengembangannya akan diatur dalam peraturan terkait KSN Rinjani dan sekitarnya. Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan setiap kota/ibukota kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)/Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berfungsi sebagai pusat kegiatan dan pusat layanan untuk kegiatan Pariwisata. Semua tujuan kegiatan, pusat kegiatan, wilayah, dan semua fasilitas dihubungkan dan diintegrasikan ke dalam kawasan Pariwisata berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pengintegrasian tersebut dalam proses penyusunan RIDPN Lombok-Gili Tramena difasilitasi melalui penetapan kelima kabupaten/kota di Pulau Lombok sebagai *Tourism Development Area* (TDA) dan Kawasan Inti Pariwisata (KIP) atau *Key Tourism Area* (KTA). TDA dan KTA ini menjadi pengungkit pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena. KTA dipilih berdasarkan *Market Analysis and Demand Assessment* (MADA) pada tahun 2017 dan *Baseline Analysis* RIDPN Lombok-Gili Tramena pada tahun 2019.



Gambar 3. Delineasi Wilayah RIDPN Lombok-Gili Tramena

Dari kelima TDA, kemudian dipilih 16 kecamatan sebagai fokus pengembangan yaitu 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, 4 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, dan 3 kecamatan di Kota Mataram. Sebanyak 4 (empat) KTA dipilih dari 16 kecamatan untuk menjadi fokus pengembangan, yaitu KTA Gili-Senggigi, KTA Pantai Selatan, KTA Kota Mataram, dan KTA Rinjani. Pemetaan terhadap DTW di kelima TDA dan keempat KTA adalah sebagai berikut:

Tabel 1. . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Tabel 1. KTA dan DTW di DPN Lombok-Gili Tramena

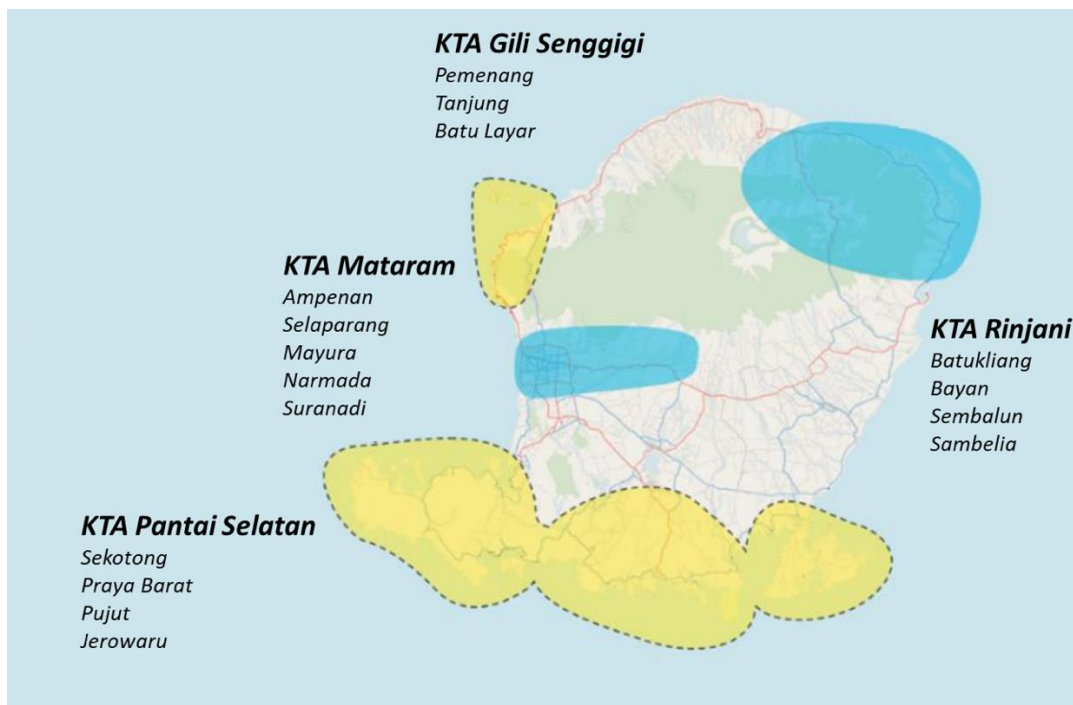
KTA	DTW	Kabupaten	Kecamatan
Gili-Senggigi	Gili Tramena	Lombok Utara	Pemenang
	Tanjung-Medana	Lombok Utara	Tanjung
	Pantai Senggigi	Lombok Barat	Batu Layar
Pantai Selatan	Gili Nanggu	Lombok Barat	Sekotong
	Gili Gede	Lombok Barat	Sekotong
	Teluk Mekaki	Lombok Barat	Sekotong
	Pantai Selong Belanak	Lombok Tengah	Praya Barat
	Pantai Mawun	Lombok Tengah	Pujut
	Desa Ende & Sade	Lombok Tengah	Pujut
	<i>Pink Beach</i> /Pantai Tangsi	Lombok Timur	Jerowaru
	Pantai Surga	Lombok Timur	Jerowaru
Mataram dan sekitarnya	Kota Tua Ampenan	Mataram	Ampenan
	<i>Islamic Center</i>	Mataram	Selaparang
	Taman Mayura	Mataram	Mayura
	Narmada	Lombok Barat	Narmada
	Suranadi	Lombok Barat	Narmada
Rinjani dan Sekitarnya	Benang Kelambu & Benang Stokel	Lombok Tengah	Batukliang
	Senaru	Lombok Utara	Bayan
	Lembah Sembalun	Lombok Timur	Sembalun
	Gili Sulat	Lombok Timur	Sambelia

Gambar 4. . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -



Gambar 4. Lokasi TDA dan KTA RIDPN Lombok-Gili Tramena
Keterangan: KTA 1 = Gili Senggigi, KTA 2 = Pantai Selatan,
KTA 3 = Mataram dan sekitarnya, KTA 4 = Rinjani dan sekitarnya.

KTA Gili-Senggigi memiliki DTW utama wisata pantai dan pulau-pulau kecil (gili), serta beberapa tujuan wisata lainnya seperti taman, *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*, air terjun, dan kuliner, serta olahraga air seperti *snorkeling, diving, dan surfing*. KTA Pantai Selatan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terlebih dengan adanya KEK Mandalika sebagai pusat Pariwisata baru. DTW di KTA Pantai Selatan mencakup wisata bahari, yang didominasi oleh pantai dan pulau-pulau kecil (gili), wisata olahraga, dan kegiatan wisata yang dipadukan dengan beberapa desa tradisional di Kabupaten Lombok Tengah.

Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan layanan pusat Pariwisata. DTW utama di KTA Mataram berfokus di wisata *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)* yang didukung oleh wisata situs budaya, keagamaan, dan peninggalan sejarah. KTA Rinjani dan sekitarnya memiliki keunggulan wisata alam dengan Gunung Rinjani

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

dan Danau Segara Anak, serta peninggalan sejarah, budaya, dan tradisional di desa-desa tradisional di kaki gunung. Pengembangan Pariwisata di Taman Nasional Gunung Rinjani juga memperhatikan statusnya sebagai *UNESCO Rinjani-Lombok Bioshere Reserve* dan *UNESCO Rinjani-Lombok Global Geopark*.

Penyusunan RIDPN Lombok-Gili Tramena telah mempertimbangkan dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan protokol yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta protokol lainnya yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemetaan dan analisis terhadap aset, potensi, peluang, dan tantangan dalam pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena dituangkan dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena yang meliputi:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
2. Sasaran dan Arah Pengembangan;
3. Pelaksanaan Pengembangan; dan
4. Rencana Aksi.

Pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena difokuskan pada (i) perwilayahan pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena; (ii) pengembangan daya tarik wisata; (iii) pengembangan aksesibilitas Pariwisata; (iv) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata; (v) pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan (vi) pengembangan investasi di bidang Pariwisata. Pelaksanaan rencana pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena akan didukung perbaikan tata kelola yang meliputi tata kelola kelembagaan di tingkat pemerintah pusat dan daerah, tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana, serta tata kelola sosial budaya.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB II

SASARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. Sasaran

Sasaran pengembangan di DPN Lombok-Gili Tramena yaitu meningkatnya pertumbuhan dan kualitas aktivitas Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena dalam periode 25 tahun sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), serta pendapatan dari Pariwisata, yang ditopang daya dukung lingkungan yang memadai. Peningkatan kualitas utamanya didukung oleh peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang membentuk devisa dari wisman dan pendapatan dari wisnus. Proyeksi kunjungan wisatawan dan pendapatan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Proyeksi Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena

Indikator	2018	2024	2029	2034	2039	2044
Wisatawan mancanegara						
a. Kunjungan (ribu orang)	1.148,30	1.670,10	2.613,13	3.662,97	4.581,22	5.342,65
b. Pendapatan Devisa (USD juta)*	290,20	669,40	1.659,19	3.413,73	6.266,77	10.228,93
Wisatawan nusantara						
a. Kunjungan (ribu orang)	1.311,70	1.924,71	3.039,10	4.292,56	5.396,03	6.315,00
b. Pendapatan (Rp miliar)	5.666,50	12.565,94	28.971,58	48.311,56	71.698,32	99.062,39

Keterangan: * Devisa dihitung berdasarkan pendapatan yang bersumber dari wisatawan mancanegara dalam Rupiah yang dikonversi ke USD dengan nilai tukar Rp15.000 = USD 1

Pertumbuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pertumbuhan aktivitas Pariwisata ini didukung oleh penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan lahan yang masing-masing diwakili oleh indikator jumlah penduduk dan ketersediaan lahan. Pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan penduduk lebih dari 5 juta jiwa pada tahun 2044 di lima kabupaten/kota yang menjadi fokus pengembangan Pariwisata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kabupaten Lombok Timur (27,1 persen), Kabupaten Lombok Barat (24,5 persen), dan Kabupaten Lombok Tengah (23,9 persen), diikuti oleh Kota Mataram (17,6 persen), dan Kabupaten Lombok Utara (6,9 persen).

Pengembangan Pariwisata di kawasan ini diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan kerja sekitar 1,2 juta orang. Penciptaan lapangan kerja diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja terampil pada tingkat manajer/pengelola yang dihasilkan utamanya oleh lembaga pendidikan Pariwisata di Lombok, dan daerah lainnya di Indonesia. Tambahan lapangan kerja ini tidak saja disumbangkan oleh pengembangan pariwisata di lima kabupaten/kota, namun juga didukung dari pengembangan dua proyek besar yaitu KEK Mandalika di bagian selatan dan Kota Bandar Kayangan di bagian utara Pulau Lombok.

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas Pariwisata diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan lahan di DPN Lombok-Gili Tramena sekitar 4.970 Ha sampai dengan tahun 2044. Kebutuhan lahan ini perlu dipenuhi untuk memfasilitasi pembangunan permukiman (24 persen), hotel dan *homestay* (25 persen), atraksi Pariwisata (24 persen), serta sisanya untuk pembangunan amenities Pariwisata lainnya, dan industri pendukung Pariwisata.

B. Arah Pengembangan

Pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena dalam periode 25 tahun diarahkan untuk:

1. Menangani isu-isu strategis, yaitu penyediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitas, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) Pariwisata, tata kelola destinasi dan lingkungan, serta peningkatan kemudahan berinvestasi dan berusaha;

2. Mengembangkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

2. Mengembangkan akses pasar dan meningkatkan diversifikasi destinasi, termasuk produk, dan layanan wisata; dan
3. Meningkatkan keberkelanjutan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena yang memberi manfaat yang optimal untuk perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena sampai dengan tahun 2044 akan dilaksanakan dalam lima tahapan, sebagai berikut:

1. **TAHAP PERTAMA (Tahun 2020 – 2024)**

Tahap pertama pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung aksesibilitas, mobilitas, dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur ini akan dilengkapi dengan peningkatan kualitas DTW yang ada, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan investasi. Kualitas DTW difokuskan pada beberapa kawasan Pariwisata unggulan yang menjadi pengungkit pertumbuhan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena. Bagian pengembangan Pariwisata di tahap ini juga diarahkan untuk mendukung Mandalika dan KTA Pantai Selatan sebagai pusat Pariwisata baru di Pulau Lombok, termasuk untuk persiapan penyelenggaraan MotoGP 2021. Kelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian untuk menciptakan sumber pertumbuhan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

2. **TAHAP KEDUA (Tahun 2025 – 2029)**

Tahap kedua akan difokuskan untuk percepatan pertumbuhan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena melalui peningkatan pertumbuhan jumlah wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan pendapatan Pariwisata. Pengembangan Pariwisata pada tahap ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sosial ekonomi secara lebih merata bagi masyarakat melalui perkuatan DTW di bagian selatan Pulau Lombok sebagai: (i) pusat aktivitas di Pulau Lombok; dan (2) pendorong bagi pengembangan aktivitas Pariwisata dan aktivitas perekonomian terkait di wilayah lainnya. Kunjungan wisatawan diharapkan tumbuh paling tinggi pada tahap ini. Mandalika dan KTA Pantai Selatan masih menjadi pengungkit pertumbuhan Pariwisata di tahap ini.

3. **TAHAP . . .**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

3. **TAHAP KETIGA (Tahun 2030 – 2034)**

Tahap ketiga akan difokuskan untuk perluasan penetrasi pasar Pariwisata. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk menjaga stabilitas kunjungan yang didukung perluasan destinasi dan pasar Pariwisata yang sudah ada. Pengelolaan dan pengendalian kunjungan di setiap DTW akan diperkuat untuk mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan skala manfaat dari pertumbuhan Pariwisata bagi masyarakat. Kawasan KTA Gili Senggigi dan Pantai Selatan yang menjadi fokus pada periode ini akan ditingkatkan diferensiasinya. Peran dari KTA Rinjani pada tahap ini akan ditingkatkan, sebagai bagian dari pemerataan sebaran dari wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok.

4. **TAHAP KEEMPAT (Tahun 2035 – 2039)**

Tahap keempat akan difokuskan untuk diversifikasi destinasi Pariwisata, termasuk pusat atraksi, produk, dan layanan wisata agar pengunjung memiliki lebih banyak pilihan dalam berwisata. Diversifikasi Pariwisata juga diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi dan kegiatan lain yang lebih beragam dan berkelanjutan. Kawasan wisata yang akan dikembangkan adalah Pantai Selatan-Timur, kawasan Gunung Rinjani, dan wilayah di sabuk tengah termasuk Kota Mataram dan sekitarnya. Keterkaitan destinasi Pariwisata DPN Lombok-Gili Tramena dengan destinasi wisata di pulau-pulau sekitarnya akan diperkuat.

5. **TAHAP KELIMA (Tahun 2040 – 2044)**

Tahap kelima akan difokuskan untuk pertumbuhan Pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan Pariwisata pada tahap ini diarahkan untuk memastikan semua aspek yang telah dibangun pada tahap-tahap sebelumnya dapat meningkatkan pertumbuhan Pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperkuat untuk menciptakan sumber pertumbuhan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, khususnya di DPN Lombok-Gili Tramena dan di Provinsi NTB pada umumnya. Pada tahap ini, sebaran kunjungan wisatawan ke Lombok-Gili Tramena lebih merata ke kawasan yang sudah berkembang, dan ke kawasan-kawasan baru.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

A. Perwilayahan Pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena

Konsep pengembangan Pariwisata secara spasial di DPN Lombok-Gili Tramena akan mengikuti pola pengembangan dengan bentuk Tapal Kuda (*The Horseshoe*). Pola ini dipilih berdasarkan pertimbangan (i) pertumbuhan Pariwisata, (ii) kebutuhan penggunaan lahan, serta (iii) potensi dampak sosial dan lingkungan.

Pertumbuhan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena ditunjukkan oleh pertumbuhan kunjungan wisatawan rata-rata sekitar 6,1 persen per tahun sampai dengan tahun 2044. Tren pertumbuhan wisman dan wisnus kurang lebih serupa. Pertumbuhan terbesar pada tahap pertama (tahun 2020-2024) akan terkonsentrasi di KTA Pantai Selatan, terutama di Mandalika. Pada tahap kedua (tahun 2025-2029), tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan diproyeksikan paling tinggi dengan konsentrasi terbesar masih berada di KTA Pantai Selatan. Pada tahap selanjutnya sampai tahun 2044, pertumbuhan wisatawan semakin menyebar ke DTW lainnya sejalan dengan perkembangan akomodasi dan atraksi, diversifikasi destinasi, dan selera dari wisatawan.

Secara terinci, pola pengembangan ini mencakup tujuh pendekatan pengembangan sebagai berikut:

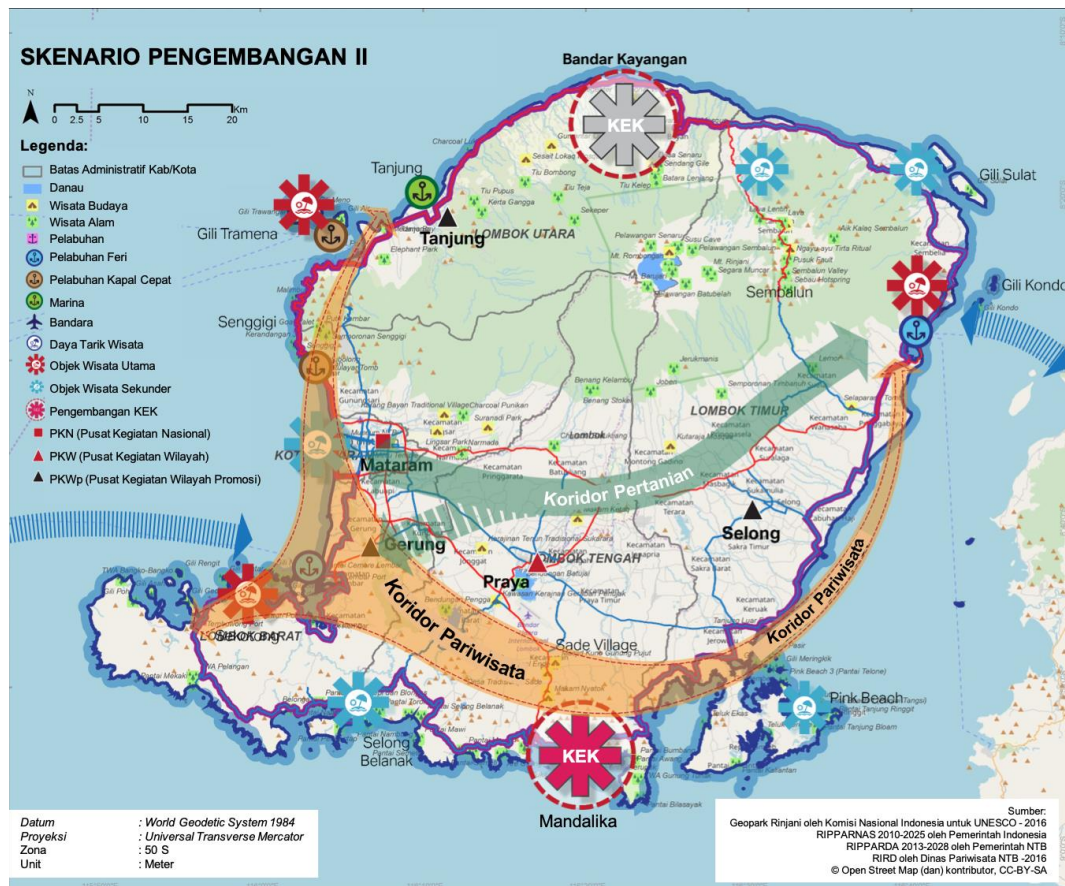
1. Melindungi *Global Geopark* Rinjani dengan melestarikan alam di wilayah utara Pulau Lombok dan merevitalisasi kualitas lingkungan di Gili Trawangan, Meno, dan Air, serta mengendalikan pengembangan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.
2. Mendistribusikan kesejahteraan dengan membatasi dan mengontrol pengembangan Pariwisata skala besar di sekitar Gili dan Senggigi, serta menyebarkan kegiatan Pariwisata dan membagikan manfaat pengembangan Pariwisata ke selatan dan timur Pulau Lombok.
3. Membuka potensi pantai selatan dengan membagi kepadatan wisatawan di Gili-Senggigi ke beberapa daerah di pantai selatan, serta mendukung dan mempromosikan Mandalika dengan tempat-tempat wisata baru di sekitarnya.

Gambar 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -



Gambar 5. Pola Pengembangan Pariwisata secara Spasial dalam Bentuk Tapal Kuda (*The Horseshoe*)

4. Meningkatkan konektivitas ke pulau di sekitarnya dengan memaksimalkan peran pelabuhan dan bandara di Pulau Lombok sebagai pintu pengembangan untuk mendukung peningkatan kegiatan Pariwisata di sekitarnya, serta meningkatkan kualitas koneksi jalan internal Pulau Lombok. Peningkatan aksesibilitas antara Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan sehingga mampu menghubungkan konektivitas antar pulau antara Bali-Lombok-Sumbawa.
5. Melestarikan area pertanian dan meningkatkan rantai pasok Pariwisata dengan menjamin konservasi area Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah tengah Pulau Lombok dan memaksimalkan peran sektor pertanian untuk menjadi bagian dari rantai pasok pengembangan Pariwisata.

6. Melestarikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

6. Melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya Lombok dengan melibatkan warga lokal dan masyarakat adat dalam setiap kegiatan Pariwisata, mengembangkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, serta meningkatkan pemasaran produk budaya dan Pariwisata lokal.
7. Mengembangkan Pariwisata tematik dengan menentukan klaster Pariwisata sesuai dengan karakteristiknya, mengembangkan tema Pariwisata yang berbeda di setiap KTA untuk memperkaya pilihan destinasi, serta menetapkan area prioritas dan area potensial untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Pola Tapal Kuda telah mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan lahan di DPN Lombok-Gili Tramena yang dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi termasuk infrastruktur, permukiman, dan Pariwisata. Penggunaan lahan untuk permukiman tidak saja merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk, tetapi juga dari perkembangan Pariwisata yang dapat mengundang migrasi penduduk dari daerah lain.

Dari aspek sosial, pengembangan Pariwisata secara spasial telah mempertimbangkan tingkat kemiskinan, risiko sosial (konflik sosial dan tingkat kejahatan), serta potensi pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian yang masih menjadi mata pencaharian utama penduduk di Pulau Lombok. Pertimbangan untuk menyesuaikan pengembangan fisik dengan warisan budaya dan aspirasi masyarakat adat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengembangan Pariwisata dengan pola Tapal Kuda ini.

Pola pengembangan Tapal Kuda juga telah mempertimbangkan aspek-aspek jasa ekosistem yang meliputi: (i) jasa pasokan air; (ii) jasa pengendali iklim; (iii) jasa mitigasi bencana; (iv) jasa pengolahan limbah dan air; (v) jasa budaya; serta (vi) jasa pendukung keanekaragaman hayati di DPN Lombok-Gili Tramena. Berdasarkan aspek-aspek jasa ekosistem tersebut, wilayah yang dicakup dalam pola Tapal Kuda ini memiliki daya dukung yang tinggi dan sangat tinggi sekitar 34,9 persen dari total area yang ada. Proporsi ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pilihan skenario pengembangan lainnya, sehingga lebih mendukung pengembangan Pariwisata, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan aset masyarakat.

Pola . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pola Tapal Kuda juga telah mempertimbangkan keterkaitan antarkoridor Pariwisata, mulai dari DTW yang sudah berkembang di wilayah utara-barat (Gili Tramena, Senggigi, dan Kota Mataram), dengan DTW pengembangan baru wilayah selatan dengan pengungkit KEK Mandalika, serta DTW di KTA Rinjani di bagian timur dan utara yang berfokus pada konservasi. Pada saat yang sama, keterkaitan antara pengembangan Pariwisata dan pertanian dibangun dengan memperkuat koridor pertanian di wilayah tengah yang nantinya akan berperan sebagai pemasok pangan bagi industri Pariwisata. Pengembangan Pariwisata di bagian utara dibatasi terutama di wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Rencana pengembangan Bandar Kayangan di bagian utara Pulau Lombok akan dijadikan sebagai pengungkit pada pengembangan wisata berbasis kota di tahapan pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena di masa mendatang. Pola Tapal Kuda ini juga memungkinkan keterkaitan pola perjalanan Pariwisata yang semakin kuat antara destinasi Bali di sisi barat dan destinasi Pulau Sumbawa di sisi timur.

Pengintegrasian pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena dalam pola Tapal Kuda ini diharapkan dapat menyebarkan peluang bagi masyarakat di DPN Lombok-Gili Tramena untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pengembangan Pariwisata. Hal ini selaras dengan aspek-aspek keberlanjutan, ketangguhan, dan inklusivitas yang menjadi visi pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena.

Ketujuh pendekatan di atas diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana pengembangan Pariwisata di masing-masing KTA sebagai berikut.

1. Rencana Pengembangan KTA Gili-Senggigi

KTA Gili-Senggigi meliputi Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Pemenang, dan Kecamatan Tanjung. Gili-Senggigi telah menjadi pusat kegiatan Pariwisata DPN Lombok-Gili Tramena sejak dahulu dan paling terkenal di antara DTW di Lombok-Gili Tramena. Perkembangan Pariwisata di daerah ini tumbuh pesat dengan berbagai pilihan akomodasi, fasilitas, dan aksesibilitas.

Tema . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Tema pengembangan Pariwisata mencakup “Pulau Ekowisata” untuk Sub KTA Gili Tramena, dan “Destinasi Budaya dan Resor yang Indah” untuk Sub KTA Senggigi. Pengembangan KTA Gili-Senggigi mencakup Sub KTA Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air) dan Sub KTA Senggigi. Sub KTA Gili Tramena dibagi lagi menjadi beberapa Zona Inti yaitu Pelabuhan Bangsal, Gili Trawangan dan Gili Meno, Gili Air, dan Tanjung Medana. Sub KTA Senggigi dibagi menjadi Zona Inti Pantai Senggigi, Bukit Malimbu, dan Desa Pusuk.

Pengembangan Kepariwisata di KTA Gili-Senggigi diarahkan untuk memperbaiki aset yang sudah ada dan mengembangkan potensi baru. Cakupannya antara lain pembangunan akomodasi hotel berbintang dan non bintang, *wellness center*, pusat kesenian, gardu pandang, taman dan area publik lainnya, perbaikan area konservasi, pengembangan atraksi, perbaikan sarana olah raga seperti *snorkeling*, *diving*, *trekking*, *hiking*, *surfing*, paralayang, dan lain-lain. Pembangunan permukiman dan sarana prasarana lingkungan dibutuhkan untuk menunjang aktivitas wisatawan selama berada di DPN Lombok-Gili Tramena, serta untuk mengakomodir kebutuhan penduduk dan tenaga kerja yang bekerja di sektor Pariwisata. Pengembangan permukiman dan sarana prasarana disesuaikan dengan arahan tata ruang dan spasial. Pembangunan permukiman menekankan pada efisiensi lahan dan tetap mempertimbangkan beberapa isu yang ada di DPN Lombok-Gili Tramena seperti kebencanaan, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, dan ketidakteraturan pembangunan. Program pengembangan juga dilengkapi dengan pembangunan jalan dan sarana transportasi, serta infrastruktur dasar.

Rencana pemanfaatan ruang di KTA Gili-Senggigi meliputi Tanjung Medana, Pelabuhan Bangsal, Bukit Malimbu dan Pantai Nipah, Pantai Senggigi, dan Hutan Pusuk. Pola pemanfaatan ruang di kawasan ini diarahkan untuk mendukung akomodasi dan atraksi. Sebagian besar kawasan tetap dipertahankan sebagai hutan dan lahan budidaya, dan sebagian kecil ruang dimanfaatkan untuk permukiman. Berdasarkan rencana pola ruang tersebut maka pola penggunaan lahan untuk Pariwisata di KTA Gili-Senggigi meliputi:

- a. 220 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 1 (Tahun 2020-2024) yang difokuskan di Sub-KTA Senggigi;

b. 183 Ha . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- b. 183 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 2 (tahun 2025-2029) untuk Sub KTA Senggigi, sedangkan pembangunan hotel dan atraksi di Sub KTA Gili Tramena dibatasi;
- c. 132 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 3 (tahun 2030-2034);
- d. 91 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 4 (tahun 2035-2039); dan
- e. 137 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 5 (tahun 2040-2044).



Gambar 6. Rencana Pemanfaatan Ruang di KTA Gili-Senggigi

Keterangan: 1. Tanjung Medana, 2. Pelabuhan Bangsal, 3. Bukit Malimbu dan Pantai Nipah, 4. Pantai Senggigi, dan 5. Hutan Pusuk.

2. Rencana Pengembangan KTA Pantai Selatan

KTA Pantai Selatan meliputi Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Sekotong, Kecamatan Jerowaru. Pantai Selatan Lombok menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terlebih telah dibangunnya Mandalika sebagai pusat Pariwisata baru. Kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Pariwisata sebagai sektor unggulan. Sebagai tujuan wisata utama, Pantai Selatan Pulau Lombok memiliki potensi pasar yang cukup besar.

KTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

KTA Pantai Selatan terdiri dari Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya Mandalika, dan Sub KTA Pantai Pink. Sub-KTA Sekotong dibagi lagi menjadi beberapa Zona Inti yaitu Gili Gede, Gili Mada, sekitar Gili Gede dan Pelabuhan Tembowong, dan Belongas. Sub KTA Praya Mandalika terdiri dari Zona Inti Selong Belanak, Desa Sade dan Ende, Pantai Mawun dan Teluk Awang. Sub KTA Pantai Pink terdiri dari Zona Inti Pantai Pink dan Pantai Surga.

Dengan cakupan wilayah yang luas dan meliputi tiga kabupaten (Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur), KTA Pantai Selatan ini dikembangkan di bawah satu entitas KTA Pantai Selatan dengan tema utama wisata bahari yang dipadukan dengan beberapa desa tradisional di Kabupaten Lombok Tengah. Tema ini diterjemahkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik Sub KTA yaitu wisata bahari yang lengkap untuk Sub KTA Sekotong, wisata pengalaman adat di Praya, dan wisata terintegrasi di Mandalika (wisata bahari, wisata olahraga seperti *snorkeling*, *diving*, *trekking*, *hiking*, *paragliding*, *surfing*, sirkuit MotoGP, resor, dan wisata buatan), serta wisata yang asri dan tenang di Sub KTA Pantai Pink.

Pemanfaatan ruang di KTA Pantai Selatan diarahkan untuk mendukung lokasi-lokasi wisata yang akan berkembang seperti kawasan Gili Gede, Gita Nada, Pantai Belongas, Selong Belanak, Pantai Mawun, sekitar Mandalika, Desa Sade-Ende, Teluk Awang, serta kawasan Pantai Pink dan Pantai Surga. Sebagian besar ruang di kawasan ini dipertahankan sebagai hutan, lahan budidaya, dan padang rumput. Berdasarkan pola pemanfaatan ruang tersebut, kebutuhan lahan untuk pengembangan Pariwisata di KTA Pantai Selatan adalah sebagai berikut:

- a. 413 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 1 (tahun 2020-2024) yang difokuskan di Sub KTA Sekotong dan Praya-Mandalika;
- b. 375 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 2 (tahun 2025-2029) untuk seluruh Sub KTA, kecuali Sub KTA Pantai Pink dibatasi;
- c. 511 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 3 (tahun 2030-2034) untuk seluruh Sub KTA, kecuali Sub KTA Pantai Pink dibatasi;

d. 540 Ha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- d. 540 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 4 (tahun 2035-2039) untuk seluruh Sub KTA, termasuk Sub KTA Pantai Pink (52 Ha) yang mulai dikembangkan; dan
- e. 796 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 5 (tahun 2040-2044) untuk seluruh Sub KTA.



Gambar 7. Rencana Pemanfaatan Ruang di KTA Pantai Selatan

Keterangan: 1. Gili Gede, 2. Gili Nanggu, 3. Sekitar Gili Gede dan Pelabuhan Tembowong, 4. Blongas, 5. Selong Belanak, 6. Desa Sade dan Ende, 7. Pantai Mawun, 8. Teluk Awang, 9. Pantai Pink, dan 10. Pantai Surga.

3. Rencana Pengembangan KTA Mataram dan sekitarnya

Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB dan pusat pemerintahan, komersial, dan layanan. Pengembangan Pariwisata di KTA Mataram diarahkan sebagai pusat Pariwisata perkotaan dengan fokus pada *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* yang didukung oleh wisata situs budaya, keagamaan, dan peninggalan sejarah. KTA Mataram mencakup Sub KTA Mataram dan Sub KTA Suranadi. Kedua Sub KTA akan dikembangkan dengan tema pengalaman wisata perkotaan dan religi.

KTA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KTA Mataram akan ditingkatkan kapasitasnya sebagai destinasi Pariwisata khususnya pada aspek kualitas dan standar layanan dalam rangka meningkatkan lama tinggal wisatawan. Penataan kota Mataram juga menjadi bagian dalam rangka mempertahankan daya dukung Pariwisata, mengingat konsentrasi permukiman dan aktivitas ekonomi yang tinggi di kota Mataram. KTA Mataram juga diperkuat dalam perannya sebagai hub untuk menghubungkan sabuk pertanian di bagian tengah Pulau Lombok, dengan sabuk Pariwisata di utara (KTA Gili-Senggigi) dan di selatan (KTA Pantai Selatan). Rencana pemanfaatan ruang di KTA Mataram akan difokuskan pada pengembangan atraksi perkotaan seperti Ampenan, *Islamic Center*, Pura Mayura, Kawasan Narmada, dan Pemandian Surandi. Penggunaan lahan akan difokuskan di Sub KTA Mataram (84,9 persen) dan sisanya di Sub KTA Suranadi (15,1 persen). Rencana penggunaan lahan sampai tahun 2044 adalah sebagai berikut:

- a. 102 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 1 (tahun 2020-2024);
- b. 155 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 2 (tahun 2025-2029);
- c. 147 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 3 (tahun 2030-2034);
- d. 87 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 4 (tahun 2035-2039); dan
- e. 27 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 5 (tahun 2040-2044).



Gambar 8. Rencana Pemanfaatan Ruang di KTA Mataram

Keterangan: 1. Mataram, 2. Suranadi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

4. Rencana Pengembangan KTA Rinjani dan Sekitarnya

Gunung Rinjani adalah gunung berapi aktif dan gunung tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Daya tarik rekreasi yang unik di Gunung Rinjani adalah danau berbentuk bulan sabit dengan lebar sekitar 6 km.

Taman Nasional Gunung Rinjani dan sekitarnya adalah tempat yang signifikan dari beberapa perspektif, termasuk ekologi, keanekaragaman hayati dan budaya. Modalitas ini mewarnai rencana pengembangan KTA Rinjani yang disesuaikan dengan daya dukung yang ada dan rencana pengelolaan Taman Nasional Rinjani, *UNESCO Rinjani-Lombok Biosphere Reserve*, dan *UNESCO Rinjani-Lombok Geopark*, serta KSN Rinjani dan sekitarnya.

Tema pengembangan Pariwisata di KTA Rinjani dan sekitarnya mencakup wisata konservasi, dan dapat dilengkapi dengan pengembangan wisata petualangan dan olahraga seperti *trekking*, *hiking*, dan agrowisata. KTA Rinjani dan sekitarnya mencakup Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat. Sub KTA Rinjani meliputi Zona Inti Sembalun, Senaru, dan Air Terjun Benang Stokel. Sub KTA Gili Sulat merupakan pulau kecil dengan hutan mangrove dan memiliki kekayaan berbagai spesies burung, dan dilalui oleh Garis *Wallace*.

Kedua Sub KTA ini merupakan kawasan konservasi, sehingga pola penggunaan ruang untuk Pariwisata di kawasan ini dibatasi. Kondisi ini mengarahkan pola penggunaan lahan di kawasan ini sampai tahun 2044 adalah sebagai berikut:

- a. 12 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 1 (tahun 2020-2024);
- b. 8 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 2 (tahun 2025-2029);
- c. 36 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 3 (tahun 2030-2034);
- d. 38 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 4 (tahun 2035-2039) khususnya di Zona Inti Benang Kelambu di Sub KTA Rinjani dan sekitarnya; dan
- e. 156 Ha lahan untuk pengembangan di Tahap 5 (tahun 2040-2044) dengan penjaminan keberlanjutan Pariwisata, lingkungan dan sosial budaya.

Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Rencana pengembangan KTA secara spasial kemudian dilengkapi dengan rencana pengembangan daya tarik wisata (DTW), aksesibilitas Pariwisata, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata, pemberdayaan masyarakat, investasi Pariwisata, dan pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena.



Gambar 9. Rencana Pemanfaatan Ruang di KTA Rinjani dan Sekitarnya
Keterangan: 1. Rinjani, 2. Gili Sulat.

B. Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW)

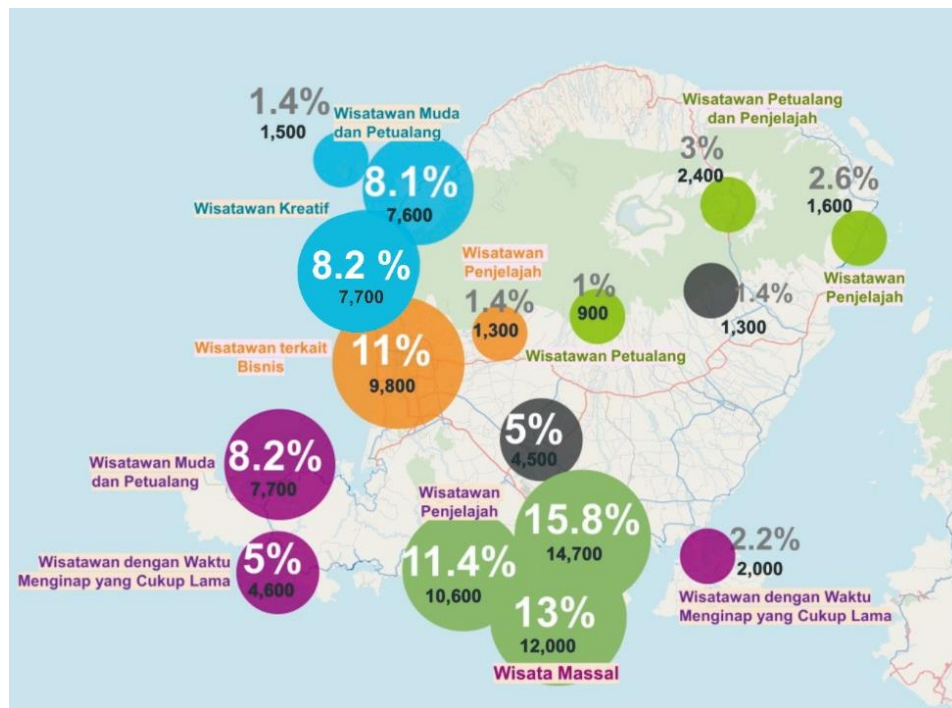
Pola pengembangan Tapal Kuda memberi konsekuensi persebaran pengembangan aktivitas Pariwisata secara spasial seperti pada Gambar 10. Sampai tahun 2044, aktivitas Pariwisata sebagian besar akan terpusat di KTA Pantai Selatan (lingkaran hijau di selatan dan ungu: 55,6 persen). Sekitar 40,2 persen aktivitas di KTA Pantai Selatan merupakan gabungan dari wisata massal dan petualangan (lingkaran hijau di selatan). Wisata massal terkonsentrasi di Sub KTA Praya-Mandalika, sedangkan wisata petualangan tersebar di seluruh Sub KTA dari KTA Pantai Selatan. Zona Inti Belongas di barat daya dan Pantai Pink di tenggara akan difokuskan untuk melayani wisatawan yang menginap untuk jangka waktu yang cukup lama dan menginginkan suasana yang tenang.

Gambar 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -



Gambar 10. Pola Sebaran Aktivitas Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena

Distribusi aktivitas Pariwisata juga tersebar di KTA lainnya. Pengembangan Pariwisata di KTA Gili-Senggigi akan menampung konsentrasi kunjungan wisatawan yang kedua terbesar (lingkaran biru: 17,7 persen) setelah KTA Pantai Selatan. Distribusi aktivitas Pariwisata diarahkan lebih ke Sub KTA Senggigi, dan Zona Inti dari Sub KTA Gili Tramena yaitu Pelabuhan Bangsal, Bukit Malimbu, dan Pantai Nipah. Pengembangan Pariwisata di Zona Inti di Gili Tramena dibatasi. Atraksi yang dikembangkan akan difokuskan untuk melayani wisatawan muda yang memiliki minat ke aktivitas petualangan dan kreatif.

KTA Mataram, khususnya Sub KTA Mataram, akan menampung kunjungan wisatawan dengan proporsi sekitar 11 persen, dengan dominasi wisata perkotaan dan bisnis. Sesuai tahapan pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena, distribusi wisatawan sampai tahun 2044 juga akan menyebar ke sabuk pertanian di wilayah tengah Pulau Lombok dan wilayah timur laut khususnya di KTA Rinjani dan sekitarnya, dengan jaminan pelestarian alam dan budaya sesuai tema pengembangan Pariwisata pada tahap kelima (tahun 2040-2044). Kedua wilayah ini akan difokuskan untuk melayani wisatawan yang memiliki minat di wisata petualangan dan penjelajahan.

Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Rencana pengembangan DTW di setiap KTA diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan DTW di KTA Gili-Senggigi

KTA Gili-Senggigi memiliki tiga daya tarik wisata utama yaitu Pantai Senggigi, Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air), dan Pantai Tanjung-Medana. Secara keseluruhan, potensi DTW berpusat pada wisata pantai dan pulau-pulau kecil (gili), serta didukung oleh DTW lainnya seperti taman, *MICE*, air terjun, kuliner, serta kegiatan olahraga air seperti *snorkeling*, *diving*, dan *surfing*.

Pengembangan DTW di Sub KTA Gili Tramena akan difokuskan pada peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan pengalaman berwisata. Upaya ini akan disinergikan dengan pengembangan konservasi terumbu karang, penyu, burung dan mangrove yang akan menjadi DTW konservasi di Gili Tramena. Pengembangan *wellness center*, arena olahraga, *club house*, plaza pariwisata tepi pantai, serta marina dan taman tepi pantai di Tanjung Medana diharapkan dapat melengkapi pengalaman wisata di Gili Tramena.

Peningkatan DTW Sub KTA Senggigi diarahkan untuk perbaikan saujana (lanskap) alam dan budaya yang berkualitas dengan fokus pada Zona Inti Pasar Seni Senggigi. Pasar Seni ini akan diperbaiki untuk menjadi DTW sekaligus pusat promosi dan pameran seni budaya lokal. Beberapa DTW tambahan yang dikembangkan meliputi wisata olahraga paralayang di Bukit Malimbu, agrowisata gula aren dan wisata interaksi dengan satwa liar di Desa Pusuk, pengembangan pusat kuliner, serta beberapa jalur-jalur pejalan kaki dan *trekking* yang terpadu dengan DTW yang tersedia di Bukit Malimbu dan Desa Pusuk.

2. Pengembangan DTW di KTA Pantai Selatan

KTA Pantai Selatan Pulau Lombok secara umum akan memiliki DTW terpadu di Mandalika yang didukung dengan DTW wisata bahari, wisata olahraga dan petualangan seperti *snorkeling*, *diving*, *surfing*, paralayang, *hiking*, *trekking*, sirkuit MotoGP, wisata resor, dan beberapa desa tradisional. Beberapa DTW yang sudah dikenal antara lain Pantai Selong Belanak, Pantai Mawi, Pantai Mawun, Sentra Perikanan Awang, Desa Ende, dan Desa Sade.

Di luar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Di luar Mandalika, DTW yang akan dikembangkan di KTA Pantai Selatan antara lain:

- a. Sub KTA Sekotong: konservasi dan restorasi terumbu karang, konservasi ikan dan mangrove di Gili Gede dan Nada, *wellness center* di Gili Gede, *camping ground* di Gili Nada, pusat kuliner, *workshop* dan toko souvenir produk lokal di Blongas, serta dilengkapi dengan penyelenggaraan acara (*event*) internasional.
- b. Sub KTA Praya Mandalika: kampung nelayan di Mandalika dan Selong Belanak, wisata olahraga paralayang di Mandalika dan Mawun, pusat kesenian lokal dan seni pertunjukan di Desa Sade dan Ende, pusat pemancingan di Teluk Awang, pasar ikan di Teluk Awang, serta dilengkapi jalur pejalan kaki yang terpadu dengan DTW yang tersedia di kawasan ini.
- c. Sub KTA Pantai Pink: permainan dan olahraga air, pusat kuliner, serta dilengkapi jalur *trekking* yang terpadu dengan DTW yang tersedia di kawasan ini.

3. Pengembangan DTW di KTA Mataram

KTA Mataram akan dikembangkan untuk memperkuat DTW yang berbasis perkotaan dan wisata budaya/religi. Atraksi wisata yang dikembangkan di kawasan kota terdiri dari bangunan cagar budaya dan situs religi. Masjid Raya Hubbul Wathan dan *Islamic Center* adalah salah satu masjid terbesar yang menjadi *landmark* di Pulau Lombok yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Peningkatan kualitas layanan untuk *MICE* juga dilakukan. DTW yang ada diperbaiki dari sisi kualitas antara lain Alun-alun Mataram (Sangkareang), Masjid Pusat Keislaman Hubbul Wathan, museum kota tua di Ampenan, Taman Mayura dan Candi Meru, Pusat Cenderamata Sekarbela, serta Narmada dan Suranadi.

4. Pengembangan DTW di KTA Rinjani

Karakteristik Pariwisata kawasan Gunung Rinjani dibentuk oleh peninggalan sejarah, budaya, dan tradisional yang berlangsung di desa-desa tradisional di kaki gunung. Pengunjung tidak hanya mendapatkan pengalaman petualangan selama mendaki tetapi juga nilai-nilai budaya dari masyarakat setempat. DTW dikembangkan selaras dengan status KTA Rinjani sebagai Taman Nasional Rinjani, *UNESCO Rinjani-Lombok Biosphere Reserve*, dan *UNESCO Rinjani-Lombok Geopark*, serta KSN Rinjani dan sekitarnya.

DTW . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

DTW yang sudah ada seperti Desa Senaru dan Desa Sembalun akan ditingkatkan dari sisi layanan, serta terus didukung dari sisi pelestarian lingkungan di sekitarnya. Agrowisata hortikultura dan kopi di Sembalun dapat diperkuat. Kawasan di sekitar Danau Segara Anak dan beberapa air terjun seperti Benang Kelambu dan Benang Stokel juga ditata untuk memberi kenyamanan bagi wisatawan dan menjamin kelestarian lingkungan di sekitarnya. Aktivitas Pariwisata juga diperluas ke Gili Sulat yang akan dikembangkan sebagai DTW konservasi dan wisata petualangan.

C. Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata

Wisatawan menuju DPN Lombok-Gili Tramena menggunakan akses utama *Lombok International Airport (LIA)* serta pelabuhan (feri dan kapal cepat). Pergerakan wisatawan di dalam DPN Lombok-Gili Tramena menggunakan jaringan jalan yang menghubungkan tujuan wisata utama. LIA berlokasi strategis untuk tujuan wisata di wilayah selatan Pulau Lombok, yaitu dalam radius 25 km dari pusat-pusat wisata. Jenis pesawat yang dilayani oleh LIA sebagian besar di kelas yang sama dengan Airbus A330. Pergerakan pengunjung dengan feri dan kapal cepat dapat melalui beberapa pelabuhan yang tersebar di beberapa titik dan melayani beberapa rute yang menghubungkan titik-titik wisata di DPN Lombok-Gili Tramena.

Berdasarkan kondisi saat ini dan kebutuhan daya dukung Pariwisata ke depan, rencana pembangunan aksesibilitas di DPN Lombok-Gili Tramena difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pintu kedatangan utama, serta jaringan jalan yang menghubungkan antara pintu-pintu kedatangan (laut dan udara) dengan atraksi-atraksi wisata. Rencana pembangunan aksesibilitas di masing-masing KTA adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Aksesibilitas KTA Gili-Senggigi

Rencana pengembangan aksesibilitas di KTA Gili-Senggigi akan difokuskan pada:

- a. Pelebaran jalan menjadi 7 m di ruas Pemenang-Bangsals dan Karang Montong-Bangsals;

b. Pelebaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- b. Pelebaran jalan menjadi 5,5 m di ruas Tembobor–Sanggar Sari–Rangsot dan Teluk Dalem–Oberoi;
- c. Perbaikan jalan akses Pelabuhan Bangsal dan jalan akses Pantai Senggigi;
- d. Penambahan dermaga dan peningkatan kualitas infrastruktur Pelabuhan Bangsal;
- e. Pembangunan terminal dan dermaga Pelabuhan Gili Meno, Gili Air, Teluk Nara dan Pelabuhan Senggigi; dan
- f. Kajian kelayakan pengembangan jalan, serta permodelan jaringan jalan dan lalu lintas.

2. Pengembangan Aksesibilitas KTA Pantai Selatan

Rencana pengembangan aksesibilitas di KTA Pantai Selatan akan difokuskan pada:

- a. Pelebaran jalan menjadi 6 m Sekotong–Lemer–Sepi;
- b. Pelebaran jalan menjadi 5,5 m di ruas Penujak–Mangkung–Selong Belanak, jalan akses Selong Belanak, Kelekuh–Bumbang–Bukit Tunak Gate–Teluk Ujung–Bilisayak, jalan akses Mekaki Bay, Tumpak–Are Guling, jalan akses Pantai Mawi dan Semeti, Pelangan–Labuan Poh–Bangko–Bangko, Siung–Ketapang, Tutuk–Serumbang, Pemongkong–Serewe–Kaliantan, Tanak Paek–Tanjung Ringgit, jalan akses Pantai Torok, jalan akses Pantai Surga, dan jalan akses Pantai Belongas;
- c. Peningkatan jalan akses Pantai Selong Belanak;
- d. Pembangunan Terminal, akses parkir, dan dermaga Pelabuhan Tawun, dan Pelabuhan Tanjung Luar;
- e. Pembangunan Bypass BIL–Mandalika; dan
- f. Kajian kelayakan pengembangan jalan, serta permodelan jaringan jalan dan lalu lintas.

3. Pengembangan Aksesibilitas KTA Mataram

Rencana pengembangan aksesibilitas di KTA Mataram akan difokuskan pada:

- a. Pelebaran jalan Rembiga (batas kota)–Pemenang untuk menghubungkan KTA Mataram dan KTA Gili–Senggigi;

b. Pelebaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- b. Pelebaran jalan Bengkel-Kediri untuk menghubungkan KTA Mataram dan Sub KTA Praya Mandalika; dan
 - c. Kajian kelayakan pengembangan jalan, serta permodelan jaringan jalan dan lalu lintas.
4. Pengembangan Aksesibilitas KTA Rinjani

Rencana pengembangan aksesibilitas di KTA Rinjani akan difokuskan pada:

- a. Pelebaran jalan dan jembatan pada ruas Pemenang-Bayan untuk menghubungkan KTA Gili-Senggigi dan KTA Rinjani;
 - b. Pelebaran jalan pada ruas Kruak-Pancor, dan Pancor-Rempung untuk menghubungkan Sub KTA Pantai Pink dan KTA Rinjani;
 - c. Kajian kelayakan pengembangan jalan, serta permodelan jaringan jalan dan lalu lintas; dan
 - d. Perbaikan infrastruktur terminal dan area parkir di Pelabuhan Kayangan.
- D. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum di DPN Lombok-Gili Tramena difokuskan pada prasarana permukiman, listrik, serta layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengembangan amenities di DPN Lombok-Gili Tramena akan difokuskan pada kebutuhan pengembangan akomodasi, serta fasilitas Pariwisata lainnya.

Pembangunan prasarana permukiman mencakup perbaikan tata ruang dan desain perkotaan, penyediaan air bersih, sanitasi serta pengelolaan sampah dan limbah. Penyediaan air bersih di Pulau Lombok diarahkan untuk mengoptimalkan sumber air baku yang sudah ada, terutama dari Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, serta 197 daerah aliran sungai (DAS) dan 198 titik mata air di Pulau Lombok. Optimalisasi dilaksanakan melalui perluasan jaringan dan pengelolaan distribusi air bersih untuk memasok rumah tangga, kawasan perkotaan, perdagangan, industri, dan Pariwisata. Perbaikan sanitasi mencakup perluasan layanan drainase di setiap kota/kabupaten. Pengelolaan sampah dan limbah diarahkan untuk mengendalikan produksi sampah domestik dan disertai dengan pengelolaan yang lebih baik, dari pengumpulan, daur ulang, dan pemrosesan.

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Peningkatan pasokan listrik di DPN Lombok-Gili Tramena diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi. Sementara perbaikan layanan TIK diarahkan untuk perluasan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah *blankspot*, dan jaringan *backbone* serat optik.

Rencana pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata untuk setiap KTA adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Gili-Senggigi

Rencana pengembangan fasilitas umum di KTA Gili-Senggigi secara umum mencakup, antara lain:

- a. Perumusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk setiap Sub KTA;
- b. Penyusunan desain perkotaan, rencana tata bangunan dan lingkungan di DTW, dan drainase perkotaan;
- c. Pengadaan lahan untuk penataan kawasan, pengembangan amenitas dan atraksi, dan pembangunan drainase;
- d. Penyediaan air bersih di Kecamatan Pemenang dan Tanjung di Sub KTA Gili Tramena, serta di Kecamatan Batulayar di Sub KTA Senggigi;
- e. Pembangunan sistem drainase yang terpadu, pembangunan sumur resapan, serta prasarana penunjang pengendalian dan pemeliharaan drainase;
- f. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT);
- g. Pembangunan toilet umum;
- h. Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* (TPS3R);
- i. Restorasi lahan *open dumping* sampah di Gili Trawangan;
- j. Pengendalian air di daerah muara dan garis pantai, serta pemanfaatan ruang terbuka untuk *eco hydrology*;
- k. Pembersihan pantai;
- l. Pembangunan rumah/rumah susun untuk tenaga kerja Pariwisata dan penduduk, serta peningkatan kualitas rumah swadaya;
- m. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- m. Pembangunan ruang usaha dan perdagangan;
- n. Peningkatan kualitas konstruksi sekolah dan rumah sakit;
- o. Pembangunan fasilitas pendukung seperti pos pemadam kebakaran, kantor pos, puskesmas atau klinik, tempat ibadah, gedung serba guna, taman, lapangan olahraga, dan prasarana hiburan;
- p. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan transmisi; dan
- q. Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah *blankspot*, dan jaringan *backbone* serat optik.

Rencana pengembangan amenities di KTA Gili-Senggigi secara umum mencakup, antara lain:

- a. Pembangunan hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya di Sub KTA Senggigi;
- b. Peningkatan pelabuhan Bangsal sebagai titik transfer wisatawan ke Gili dan DTW lainnya di KTA Gili-Senggigi;
- c. Pengembangan dermaga, gardu pandang, alun-alun kota, dan gerbang masuk;
- d. Pengembangan terminal bus Pariwisata terintegrasi;
- e. Revitalisasi jalur publik dan wisata termasuk akses ke pantai, serta penyediaan fasilitas transportasi untuk penyandang disabilitas, dan fasilitas penyeberangan; dan
- f. Pengaturan muka bangunan di sekitar atraksi wisata.

Khusus untuk pembangunan akomodasi, KTA Gili-Senggigi memiliki kapasitas untuk menampung kunjungan wisatawan hingga 3 juta kunjungan sampai tahun 2044. Daya tampung wisatawan ini menjadi rujukan dalam pengembangan akomodasi di KTA sampai tahun 2044. Penambahan kamar akomodasi dalam bentuk hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya akan mencakup 5.400 kamar di Sub KTA Senggigi dan 7.500 kamar di sekitar Zona Inti Pelabuhan Bangsal dari Sub KTA Gili Tramena. Pengembangan akomodasi di Gili Tramena dibatasi sesuai daya dukungnya.

Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pengembangan amenities Pariwisata berupa transportasi tidak bermotor yaitu Cidomo di Sub KTA Gili Tramenra juga ditingkatkan dari aspek kualitas dan keamanan, seiring dengan rencana rehabilitasi jalan dengan jalur khusus untuk pejalan kaki, pengendara sepeda dan Cidomo.

2. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Pantai Selatan

Rencana pengembangan fasilitas umum di KTA Pantai Selatan antara lain meliputi:

- a. Perumusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk setiap Sub KTA;
- b. Penyusunan desain perkotaan, rencana tata bangunan dan lingkungan di DTW, dan drainase perkotaan;
- c. Pengadaan lahan untuk penataan kawasan, pengembangan amenities dan atraksi, dan pembangunan drainase;
- d. Perbaikan infrastruktur terminal dan area parkir;
- e. Penyediaan air bersih di Sub KTA Sekotong (Lembar, Gerung, Sekotong, Kediri, Labuapi, Kuripan), Sub KTA Praya dan Mandalika (Penunjak, Lantan, Aik Berik, Pujut, Praya Barat), dan Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru);
- f. Pembangunan sistem drainase yang terpadu, pembangunan sumur resapan, serta prasarana penunjang pengendalian dan pemeliharaan drainase;
- g. Pembangunan dan revitalisasi IPAL dan IPLT;
- h. Perluasan TPA dan pembangunan TPS3R;
- i. Pembersihan pantai;
- j. Pembangunan rumah/rumah susun untuk tenaga kerja Pariwisata dan penduduk, serta peningkatan kualitas rumah swadaya;
- k. Pembangunan ruang usaha dan perdagangan;
- l. Peningkatan kualitas konstruksi sekolah dan rumah sakit;
- m. Pembangunan fasilitas pendukung seperti pos pemadam kebakaran, kantor pos, puskesmas atau klinik, tempat ibadah, gedung serba guna, taman, lapangan olahraga, dan prasarana hiburan;
- n. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- n. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi; dan
- o. Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah *blankspot*, dan jaringan *backbone* serat optik.

Rencana pengembangan amenities di KTA Pantai Selatan secara umum mencakup, antara lain:

- a. Pembangunan hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya;
- b. Pengembangan pusat informasi, termasuk informasi tentang perjalanan, kegiatan, dan akomodasi;
- c. Pengembangan gardu pandang dan gerbang masuk;
- d. Pengembangan fasilitas Kepariwisata pelabuhan;
- e. Pengembangan dan revitalisasi jalur publik dan wisata termasuk akses ke pantai, serta penyediaan fasilitas transportasi untuk penyandang disabilitas, dan fasilitas penyeberangan; dan
- f. Pengaturan muka bangunan di sekitar atraksi wisata.

Pembangunan akomodasi di KTA Pantai Selatan sampai tahun 2044 mempertimbangkan kapasitas kawasan ini untuk menampung kunjungan wisatawan hingga 7,7 juta kunjungan. Penambahan kamar akomodasi dalam bentuk hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya akan mencakup 12.250 kamar di Sub KTA Sekotong, 41.100 kamar di Sub KTA Praya Mandalika, dan 2.000 kamar di Sub KTA Pantai Pink.

3. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Mataram

Rencana pengembangan fasilitas umum dan amenities di KTA Mataram antara lain meliputi:

- a. Peningkatan kinerja pengelolaan air limbah dan sanitasi melalui penyediaan truk pengumpul septage;
- b. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengadaan sarana pengangkut sampah;
- c. Perluasan TPA dan pembangunan TPS3R;
- d. Pengadaan lahan untuk pembangunan drainase;

e. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- e. Peningkatan infrastruktur drainase yang terpadu, serta prasarana penunjang pengendalian dan pemeliharaan drainase;
- f. Pembangunan hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya.

Pembangunan akomodasi di KTA Mataram disesuaikan dengan kapasitas kawasan ini untuk menampung kunjungan wisatawan hingga 2,8 juta kunjungan sampai tahun 2044. Penambahan kamar akomodasi dalam bentuk hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya akan mencakup 7.700 kamar di KTA Mataram.

4. Pengembangan Fasilitas Umum dan Amenitas di KTA Rinjani

Rencana pengembangan fasilitas umum dan amenitas di KTA Rinjani dan sekitarnya antara lain meliputi:

- a. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengadaan sarana pengangkut sampah;
- b. Pembangunan TPS3R; dan
- c. Pembangunan hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya.

Pembangunan akomodasi di KTA Rinjani sampai tahun 2044 akan dikelola sesuai dengan status kawasan konservasi. Kapasitas kawasan ini untuk menampung kunjungan wisatawan sampai tahun 2044 mencapai 1 juta kunjungan. Penambahan kamar akomodasi dalam bentuk hotel, *homestay*, dan akomodasi hotel non bintang lainnya akan mencakup 7.200 kamar di KTA Rinjani.

E. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pemberdayaan masyarakat dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena merupakan bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan dan pembukaan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan produk wisata, peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan, peningkatan aksesibilitas, peningkatan promosi, dan pengembangan kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat dapat difokuskan pada penguatan desa wisata dan atraksi wisata di perdesaan, serta diperkuat dengan pelatihan masyarakat untuk mengelola atraksi dengan baik dan didukung penerapan digitalisasi:

1. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

1. Pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat (i) berkontribusi secara langsung dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi, (ii) manfaat secara langsung dari pengembangan Pariwisata, terutama dari sisi ekonomi, dan (iii) menjaga dan mengawasi kegiatan wisata yang berkelanjutan. Rencana dukungan peningkatan kapasitas masyarakat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rencana Pengembangan Kapasitas Masyarakat

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
1.	Komponen Masyarakat Secara Umum	Pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata di destinasi.
		Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi, termasuk terkait peningkatan kapasitas untuk melayani wisata minat khusus seperti olahraga, wisata petualangan, dan lain-lain.
		<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.
		Rancang ulang program sadar wisata dengan menggunakan pengalaman terbaik internasional.
		Pelatihan dan pendampingan di desa-desa wisata untuk memaksimalkan pelatihan sesuai dengan lingkungan kerja terutama terkait dengan pengembangan desa wisata, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan wisata berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.• Peningkatan kapasitas kependamuan dan sertifikasi (seperti manajemen kawasan, administrasi dan keuangan, pelatihan selam, dan lain-lain).
Pelatihan pengelolaan biaya operasional untuk Program Sadar Wisata.		

Bantuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
		Bantuan pengembangan dan pelatihan platform daring melalui koperasi.
		Pelaksanaan forum 2 (dua) kali setahun (<i>biannual</i>) atau seminar untuk seluruh Pemangku Kepentingan Pariwisata.
		Pelatihan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Sub KTA Gili Tramena		
1.	Desa Gili Indah	
	Masyarakat Desa	<i>Review</i> dan evaluasi program yang sudah dilakukan.
		Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat.
		Kegiatan survei tingkat kepuasan konsumen di bidang Pariwisata.
	Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL)	Melakukan <i>review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.
		Peningkatan kualitas produk lokal.
2.	Desa Medana	
	Masyarakat Desa	<i>Review</i> dan evaluasi program yang sudah dilakukan.
		<i>Link and match</i> dengan Balai Latihan Kerja untuk penempatan dan distribusi kebutuhan tenaga kerja.
		Pelatihan kepada pelaku wisata melalui Lembaga Pendidikan Pelatihan dan magang di industri.
	Komunitas Pengrajin Wanita	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.
	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pelatihan dan pendampingan di desa-desa wisata untuk memaksimalkan pelatihan sesuai dengan lingkungan kerja.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
Sub KTA Mataram		
1.	Kelurahan Ampenan	
	Masyarakat Lokal	Pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata di destinasi. Pendidikan dan pelatihan serta bantuan program kepada masyarakat sekitar destinasi.
	Pokdarwis	Pelatihan dan pengelolaan biaya operasional untuk program sadar wisata.
Sub KTA Sekotong		
1.	Desa Gili Gede	
	Masyarakat Desa	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi. Pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata di destinasi.
2.	Desa Sekotong Barat	
	Masyarakat Desa	<i>Review</i> dan evaluasi atas program yang sudah dilakukan.
		Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar destinasi.
		<i>Link and match</i> dengan Balai Latihan Kerja untuk penempatan dan distribusi kebutuhan tenaga kerja.
	Komunitas Pengrajin Wanita	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.
Pokdarwis	Pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata di destinasi.	
3.	Desa Pelangan	
	Masyarakat Desa	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.

Pelatihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
		Pelatihan dan pengelolaan biaya operasional untuk program sadar wisata.
		Pelatihan-pelatihan di desa-desa wisata untuk memaksimalkan pelatihan sesuai dengan lingkungan kerja.
Sub KTA Praya - Mandalika		
1.	Desa Tumpak	
	Masyarakat Desa	Pelatihan <i>online marketing</i> untuk masyarakat umum dan industri (termasuk UMKM) Bidang Pariwisata.
		Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.
	Pokdarwis	<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.
		Pelatihan dan biaya operasional.
2.	Desa Selong Belanak	
	Masyarakat Desa	<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.
		Penambahan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) dan jumlah rombongan belajar (rombel).
		Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.
		Pelaksanaan forum 2 (dua) kali setahun (<i>biannual</i>) atau seminar untuk seluruh Pemangku Kepentingan Pariwisata.
	Pokdarwis	Merancang ulang program sadar wisata dengan menggunakan pengalaman terbaik internasional dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam Kepariwisataan.
3	Dusun Ende	
	Masyarakat Adat	Pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisataan di destinasi.

Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
		Pelaksanaan forum untuk seluruh pelaku Pariwisata.
	Komunitas Pengrajin Wanita	Penyediaan peralatan yang diperlukan.
	Pokdarwis	<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.
4.	Dusun Sade	
	Masyarakat Desa	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi. Pelatihan <i>upgrading</i> dan <i>upskilling</i> .
	Komunitas Pengrajin Wanita	Kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja untuk pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kerja Pariwisata.
5.	Dusun Kuta	
	Masyarakat Desa	<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan. Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan <i>homestay</i> bagi pelaku <i>homestay</i> di Pulau Lombok.
	Komunitas Pengrajin Wanita	Pelatihan dan pendampingan di desa-desa wisata untuk memaksimalkan pelatihan sesuai dengan lingkungan kerja.
6.	Dusun Awang	
	Masyarakat Desa	<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan. Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.

Pelatihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
		<p>Pelatihan dan pendampingan di desa-desa wisata untuk memaksimalkan pelatihan sesuai dengan lingkungan kerja.</p> <p>Penambahan lembaga diklat dan jumlah rombel.</p>
Sub KTA Pantai Pink		
1.	Desa Sekaroh	
	Masyarakat Desa	<p><i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.</p> <p>Pendidikan dan pelatihan serta bantuan program kepada masyarakat sekitar destinasi.</p>
	Komunitas Pengrajin Wanita	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan program kepada masyarakat sekitar destinasi.
	Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja untuk pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kerja Pariwisata.
2.	Desa Ekas Buana	
	Masyarakat Desa	<p>Pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisata di destinasi.</p> <p><i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.</p> <p>Forum 2 (dua) kali setahun (<i>biannual</i>) atau seminar untuk seluruh Pemangku Kepentingan Pariwisata.</p> <p>Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.</p>
	Pokdarwis	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.

Sub KTA Rinjani . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
Sub KTA Rinjani		
1.	Desa Senaru	
	Masyarakat Desa	<p>Kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja untuk pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kerja Pariwisata.</p> <p>Merancang ulang program sadar wisata dengan menggunakan pengalaman terbaik internasional dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam Kepariwisataaan.</p> <p>Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.</p>
	Masyarakat Adat	<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.
2.	Desa Sembalun	
	Masyarakat Desa	<p>Penambahan lembaga diklat dan jumlah rombel.</p> <p>Kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja untuk pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kerja Pariwisata.</p> <p>Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.</p>
Sub KTA Gili Sulat		
1.	Desa Sugian	
	Masyarakat Desa	<p>Kegiatan survei tingkat kepuasan konsumen di bidang Pariwisata.</p> <p>Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi.</p> <p>Pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kepariwisataaan di destinasi.</p> <p>Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat.</p>

Komunitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Target Komunitas	Topik Prioritas
	Komunitas Pengrajin Wanita	Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat.
	Pokdarwis	Kegiatan survei tingkat kepuasan Pokdarwis.
		<i>Review</i> dan evaluasi program sadar wisata yang sudah dilakukan.
		Merancang ulang program sadar wisata dengan menggunakan pengalaman terbaik internasional.

2. Pengembangan keterampilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena diarahkan untuk membuka kesempatan berusaha yang seluas-luasnya UMKM di bidang akomodasi, atraksi, transportasi, penyedia makanan dan minuman, kerajinan/souvenir, furnitur, fashion, agen Pariwisata, dan lain-lain. UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri Pariwisata yang lebih besar, termasuk menjadi mitra bagi investor. Pengembangan kapasitas UMKM dilaksanakan dengan mengkombinasikan pembiayaan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas pengelolaan usaha sehingga UMKM dapat lebih berkembang secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas bagi UMKM untuk:

- a. Operator hotel non-bintang, termasuk *homestay* berupa:
 - 1) Pelatihan layanan perhotelan, keterampilan bahasa, kebersihan, kuliner, dan penggunaan teknologi informasi;
 - 2) Pelatihan pembangunan *homestay* yang berkelanjutan;
 - 3) Pengenalan serta pengelolaan *mass-tourism* dan *eco-tourism*;
 - 4) Forum solusi yang melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata; dan
 - 5) Pelatihan sistem pemasaran daring dan pengelolaan situs web (*website*).
- b. Pelaku usaha Pariwisata (restoran, transportasi, *MICE*, pemandu wisata/agen, spa, penyedia jasa wisata minat khusus, dan lain-lain) dilakukan melalui:
 - 1) Pelatihan *national trainer* dan *assessor* di bidang Pariwisata;

2) Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- 2) Fasilitasi uji kompetensi kepada tenaga kerja industri Pariwisata dengan menggunakan skema okupasi secara mandiri;
 - 3) Pelatihan kepada pelaku usaha Pariwisata melalui lembaga pendidikan latihan, magang, serta pertukaran pengalaman dan sumber daya dalam klaster Pariwisata;
 - 4) Pelatihan layanan perhotelan, keterampilan bahasa, kebersihan, kuliner, dan penggunaan teknologi informasi;
 - 5) Pelatihan peningkatan standar pelayanan;
 - 6) Pelatihan *visitor management* di destinasi wisata;
 - 7) Pengenalan serta pengelolaan *mass-tourism* dan *eco-tourism*;
 - 8) Pendidikan dan pelatihan serta bantuan kepada masyarakat sekitar destinasi;
 - 9) Pelatihan dan sertifikasi penyediaan layanan wisata minat khusus seperti olahraga, wisata petualangan, dan lain-lain;
 - 10) Forum solusi yang melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata; dan
 - 11) Pelatihan sistem pemasaran daring dan pengelolaan *website*.
- c. Koperasi dan lembaga komunitas
- UMKM yang tergabung dalam badan usaha koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperkuat dalam membangun sinergi usaha, meningkatkan skala usaha dan meningkatkan efisiensi melalui akses bersama ke sistem manajemen bersama, pembiayaan, jalur pasokan produk, sistem reservasi, dan kegiatan pemasaran bersama.
3. Pengembangan keterampilan pelaku usaha lainnya diarahkan untuk meningkatkan kapasitasnya untuk berkontribusi aktif dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena. Peningkatan keterampilan pelaku usaha yang terkait dengan sektor Pariwisata dapat mencakup:
- a. Asosiasi dan himpunan pelaku usaha Pariwisata
 - 1) Pelatihan informasi, edukasi, dan promosi Pariwisata;
 - 2) Pengenalan serta pengelolaan *mass-tourism* dan *eco-tourism*;
 - 3) Forum solusi yang melibatkan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) Pariwisata; dan

4) Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- 4) Pelatihan layanan perhotelan, keterampilan bahasa, kebersihan, kuliner, dan penggunaan teknologi informasi.
 - b. Operator hotel bintang
 - 1) Pelatihan layanan perhotelan, keterampilan bahasa, kebersihan, kuliner, dan penggunaan teknologi informasi;
 - 2) Pelatihan informasi, edukasi, dan promosi Pariwisata;
 - 3) Forum solusi yang melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata; dan
 - 4) Pelatihan sistem pemasaran daring dan pengelolaan *website*.
 - c. *Provider* telekomunikasi swasta
 - 1) Pelatihan-pelatihan teknologi 5G; dan
 - 2) Pelatihan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi.
 - d. Investor swasta
 - 1) Perumusan studi *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP);
 - 2) Perumusan moda alternatif investasi; dan
 - 3) Forum solusi yang melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata.
4. Pengembangan pendidikan formal dan nonformal diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan baik formal maupun nonformal.
- a. Sekolah tinggi kejuruan Pariwisata
 - 1) Fasilitasi uji kompetensi kepada siswa/mahasiswa semester akhir dengan menggunakan skema kualifikasi kompetensi;
 - 2) Pelatihan *national trainer* dan *assessor* di bidang Pariwisata;
 - 3) Peningkatan kualitas pendidik melalui pendidikan, latihan, dan magang di industri; dan
 - 4) Pengenalan terhadap *mass-tourism* dan *eco-tourism*.
 - b. Sekolah formal
Penambahan kurikulum pendidikan Kepariwisata di jenjang sekolah formal, melalui:
 - 1) Pelatihan *national trainer* dan *assessor* di bidang Pariwisata;
 - 2) Peningkatan kualitas pendidik melalui pendidikan, latihan, dan magang di industri; dan
 - 3) Pengenalan terhadap *mass-tourism* dan *eco-tourism*.

c. Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- c. Balai pelatihan Pariwisata
 - 1) Optimalisasi lembaga sertifikasi Pariwisata dalam standarisasi jasa usaha industri Pariwisata;
 - 2) Penambahan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 dan LSP 3, serta lembaga pendidikan latihan dan rombongan belajar; dan
 - 3) Kegiatan *link and match* dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk penempatan dan distribusi kebutuhan tenaga kerja.

F. Pengembangan Investasi Pariwisata

Pengembangan investasi Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena mencakup investasi yang didanai dari sumber anggaran dan belanja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. Investasi Pemerintah Pusat dan Daerah akan difokuskan untuk mendukung (i) pengembangan sarana prasarana, termasuk infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur permukiman dan perkotaan lainnya, pengembangan ruang terbuka, revitalisasi lingkungan, serta amenities dan atraksi Pariwisata; dan (ii) peningkatan SDM termasuk pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, khususnya UMKM.

Khusus investasi dari swasta diarahkan untuk dapat melengkapi investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam bentuk (i) kerja sama pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas, permukiman dan perkotaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema pengembangan dan pengelolaan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya untuk penyediaan listrik, air bersih, sumber energi lainnya, pengolahan sampah dan limbah, permukiman, rumah sakit, transportasi perkotaan, perparkiran, telekomunikasi, dan lain-lain); (ii) pengembangan amenities Pariwisata (hotel, restoran, fasilitas *MICE*, sarana olahraga, pusat promosi, pemasaran, dan lain-lain); (iii) atraksi Pariwisata (taman bunga, agrowisata, taman hiburan, museum, galeri, wisata *adventure*, wisata olahraga seperti *snorkeling*, *diving*, *surfing*, paralayang, golf, wisata otomotif, wisata kebugaran, wisata religi, tempat pertunjukan/konser, dan lain-lain); dan (iv) pengembangan SDM termasuk sekolah dan lembaga pelatihan Pariwisata. Prosedur investasi dan pelayanan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lima kabupaten/kota di sekitar DPN Lombok-Gili Tramena diharapkan telah menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) secara terintegrasi dengan berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk investasi di sektor Pariwisata di wilayahnya masing-masing.

Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Pengembangan investasi dilaksanakan melalui perencanaan investasi di DPN Lombok-Gili Tramena, yang didukung promosi peluang investasi, fasilitasi dan pengendalian investasi, serta kerja sama investasi. Pelaksanaannya didukung dengan pengembangan dan penyediaan insentif fiskal dan non fiskal. Investor juga didorong untuk bermitra dengan pelaku usaha di Lombok-Gili Tramena, terutama UMKM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UMKM yang akan melakukan investasi secara individu dan dalam pola kemitraan juga difasilitasi dan mendapatkan kemudahan. Peluang investasi swasta dapat merujuk pada 4 KTA di DPN Lombok-Gili Tramena. Khusus untuk investasi amenitas akomodasi komersial, hasil pemetaan di 4 KTA di DPN Lombok-Gili Tramena sampai tahun 2044 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Peluang Investasi Akomodasi di DPN Lombok-Gili Tramena

KTA	Tahapan Pengembangan	Jumlah (Kamar)	Lokasi
Gili-Senggigi	Tahap 1 (tahun 2020-2024)	2.200	Sub KTA Senggigi
	Tahap 2 (tahun 2025-2029)	4.000	Sub KTA Senggigi, Zona Inti Pelabuhan Bangsal dari Sub KTA Gili Tramena
	Tahap 3 (tahun 2030-2034)	2.100	Zona Inti Pelabuhan Bangsal dari Sub KTA Gili Tramena
	Tahap 4 (tahun 2035-2039)	1.800	Zona Inti Pelabuhan Bangsal dari Sub KTA Gili Tramena
	Tahap 5 (tahun 2040-2044)	2.800	Zona Inti Pelabuhan Bangsal dari Sub KTA Gili Tramena
Pantai Selatan	Tahap 1 (tahun 2020-2024)	6.550	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya Mandalika
	Tahap 2 (tahun 2025-2029)	8.500	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya Mandalika

Tahap 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

KTA	Tahapan Pengembangan	Jumlah (Kamar)	Lokasi
	Tahap 3 (tahun 2030-2034)	11.300	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya Mandalika
	Tahap 4 (tahun 2035-2039)	13.000	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya Mandalika, Sub KTA Pantai Pink
	Tahap 5 (tahun 2040-2044)	16.000	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya Mandalika, Sub KTA Pantai Pink
Mataram	Tahap 1 (tahun 2020-2024)	-	-
	Tahap 2 (tahun 2025-2029)	3.200	Sub KTA Mataram
	Tahap 3 (tahun 2030-2034)	3.200	Sub KTA Mataram
	Tahap 4 (tahun 2035-2039)	1.300	Sub KTA Suranadi
	Tahap 5 (tahun 2040-2044)	-	-
Rinjani	Tahap 1 (tahun 2020-2024)	-	-
	Tahap 2 (tahun 2025-2029)	-	-
	Tahap 3 (tahun 2030-2034)	800	Sub KTA Rinjani
	Tahap 4 (tahun 2035-2039)	2.200	Zona Inti Benang Kelambu, Benang Stokel, dan Sembalun di Sub KTA Rinjani
	Tahap 5 (tahun 2040-2044)	4.200	Sembalun dan Sambelia di Sub KTA Rinjani

G. Pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

G. Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena

1. Organisasi Tata Kelola di Tingkat Pusat dan Daerah

Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena merujuk pada rencana yang tertuang di dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena untuk mengatasi masalah dan tantangan, baik dalam konteks pengembangan Pariwisata maupun dalam konteks pembangunan daerah yang lebih luas. Pelaksanaannya difokuskan pada pengembangan Pariwisata yang berbasis kolaborasi multi-sektor dan multi-aktor. Kolaborasi multi-sektor mencakup pelaksanaan dari rencana pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena terkait infrastruktur aksesibilitas, infrastruktur dasar, lingkungan hidup, kehutanan, Pariwisata, sumber daya manusia, dan investasi. Sementara kolaborasi multi-aktor akan melibatkan lembaga-lembaga sebagai berikut:

a. Pemerintah pusat melalui program dan kegiatan di kementerian/lembaga sebagai berikut:

1) Kementerian pelaksana antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

2) Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- 2) Kementerian terkait antara lain: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta kementerian/lembaga lainnya.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi NTB serta Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram melalui program dan kegiatan pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain yang menangani urusan Pariwisata, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penataan ruang, kehutanan, lingkungan hidup, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kesehatan, pemuda dan olahraga, dan penanaman modal.
- c. Koordinasi pengembangan DPN secara nasional, termasuk yang dituangkan dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

Pada tingkat provinsi, koordinasi pengembangan DPN Lombok-Gili Tramena sesuai RIDPN Lombok-Gili Tramena dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Provinsi NTB. Pokja P3TB di 4 Kabupaten dan 1 Kota di DPN Lombok-Gili Tramena juga telah dibentuk untuk mengawal koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan hasil pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena di wilayahnya masing-masing. Pokja P3TB Provinsi berkoordinasi dengan Pokja P3TB Kabupaten/Kota untuk memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan hasil pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena.

Masing-masing . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Masing-masing Pokja memiliki kewenangan untuk memastikan komitmen pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayahnya masing-masing. Anggota Pokja P3TB Provinsi dan Pokja P3TB Kabupaten/Kota terdiri dari perwakilan dari OPD sesuai dengan urusan yang diuraikan pada huruf b di atas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi, Pokja P3TB Provinsi, dan Pokja P3TB Kabupaten/Kota didukung oleh Ketua Harian dan sekretariat yang menjamin proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tim Koordinasi dan Pokja daerah diharapkan dapat melaksanakan perannya untuk seluruh tahapan pengembangan Pariwisata sesuai RIDPN Lombok-Gili Tramena. Seiring dengan tahapan pengembangan Pariwisata tersebut, pelaksanaan tata kelola DPN Lombok-Gili Tramena juga menerapkan transformasi tata kelola yang berorientasi pada hasil, kolaborasi, pemberdayaan, inovasi, dan keterbukaan/transparansi.

Tim Koordinasi, Pokja P3TB Provinsi, dan Pokja P3TB Kabupaten/Kota mengembangkan jejaring, koordinasi, dan kolaborasi dengan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pemangku Kepentingan diperkuat, antara lain melalui:

- a. Penyelenggaraan Forum Kolaborasi DPN Lombok-Gili Tramena yang memfasilitasi dialog, serta pertukaran pengalaman dan informasi antara pemerintah daerah dan Pemangku Kepentingan di DPN Lombok-Gili Tramena. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman bersama dan menyepakati solusi untuk isu-isu tata kelola DPN Lombok-Gili Tramena. Penyelenggaraan forum dapat dilakukan setiap tahun;
- b. Peningkatan keterlibatan dan komitmen dunia usaha yang difasilitasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan penyerasian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

c. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- c. Peningkatan kapasitas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Badan Pengelola *Geopark* Rinjani-Lombok masing-masing dalam pengelolaan dan kerja sama pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani dan *Geopark* Rinjani-Lombok; dan
 - d. Peningkatan kapasitas organisasi/badan usaha/kelompok masyarakat dalam mengelola destinasi dan daya tarik wisata di wilayahnya masing-masing.
2. Tata Kelola Lingkungan dan Mitigasi Bencana

a. Tata Kelola Lingkungan

Pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramenan dilakukan melalui tata kelola lingkungan hidup guna mempertahankan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, serta menghindari dan mengurangi kerusakan serta pencemaran dari kegiatan.

Tata kelola lingkungan secara umum mencakup strategi dan rencana aksi pada 4 (empat) aspek, yaitu pengelolaan sumber daya alam daratan, pengelolaan sumber daya alam lautan, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan pengelolaan limbah domestik.

1) Pengelolaan sumber daya alam daratan

a) Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Menghindari atau meminimalkan sejauh mungkin kegiatan pengembangan perkampungan (penduduk/nelayan) di area kawasan Taman Wisata Alam (TWA);
- (2) Memastikan status lahan untuk rencana pengembangan pusat kuliner tidak berlokasi di dalam atau berada pada zona perlindungan atau zona rehabilitasi TWA;
- (3) Melakukan kegiatan pembersihan lahan sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Tidak melakukan penebangan pohon dalam kawasan TWA untuk keperluan pengembangan kampung nelayan;
- (5) Memperhatikan status zona pengembangan TWA dan memastikan jika rencana kegiatan berlokasi di dalam kawasan TWA tidak berada pada zona non-pemanfaatan;

(6) Menghindari . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- (6) Menghindari pembukaan lahan secara berlebih untuk kegiatan pengembangan fasilitas paralayang di area kawasan TWA;
 - (7) Melakukan pengelolaan jumlah pengunjung untuk mengendalikan sekaligus tetap melindungi kelestarian ekosistem TWA;
 - (8) Melakukan koordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) apabila ada rencana kegiatan memanfaatkan lahan TWA;
 - (9) Melakukan identifikasi dan inventarisasi flora-fauna terdampak oleh rencana pembangunan jalur *trekking* di dalam kawasan hutan lindung;
 - (10) Memasang pagar pembatas antara jalur *trekking* dengan lahan hutan lindung yang dapat berfungsi sebagai batas interaksi antara wisatawan dengan ekosistem hutan lindung;
 - (11) Membuat peraturan/standar prosedur operasional pendakian yang memuat larangan memberi makan hewan, mengganggu atau bahkan membunuh secara sengaja hewan yang ada di dalam areal hutan lindung;
 - (12) Di Sub KTA tertentu, seperti di area Pantai Pink, struktur bangunan didesain semi permanen dengan bentuk dan konsep bangunan menyesuaikan arsitektur budaya setempat; dan
 - (13) Mengeraskan jalur alamiah di area *trekking* untuk memungkinkan adanya penyerapan air.
- b) Rencana aksi pengelolaan sumber daya alam daratan mencakup:
- (1) Pelindungan dan pengamanan;
 - (2) Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - (3) Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;

(4) Penelitian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- (4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan konservasi alam;
 - (5) Pengusahaan Pariwisata alam, dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan berupa karbon, air serta energi air, energi panas, dan angin;
 - (6) Pemanfaatan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - (7) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan untuk menunjang berbagai kegiatan tersebut di atas.
- 2) Pengelolaan Kekayaan Alam Lautan
- a) Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut.
 - (1) Menggunakan teknik *best practice* untuk sistem drainase dalam kawasan proyek agar meminimalisasi dampak sedimentasi terhadap kualitas air laut;
 - (2) Mengantisipasi potensi limpasan air permukaan yang mengandung buangan sedimen dengan membuat kolam penampungan sedimen (*sediment trap*);
 - (3) Mengikuti peraturan dan ketentuan sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan;
 - (4) Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan;
 - (5) Sosialisasi terkait zonasi dan peraturan yang berlaku kepada para pelaku aktivitas, disertai pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi dan melestarikan lingkungan;
 - (6) Membuat rencana pengelolaan pengunjung yang mencakup batas maksimal pengunjung per bulan;
 - (7) Mengacu pada peraturan tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove;
 - (8) Mengikuti peraturan dan ketentuan sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan;

(9) Menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- (9) Menyusun kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
 - (10) Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan sosialisasi;
 - (11) Mengendalikan pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian (*no net loss*);
 - (12) Mempertimbangkan keberadaan ekosistem mangrove sebagai bagian dari desain proyek guna memberikan perlindungan dan pelestarian pada ekosistem mangrove;
 - (13) Melakukan survei sebelum adanya kegiatan untuk mengetahui rona awal keanekaragaman hayati laut disertai pencatatan dan perekaman data;
 - (14) Sosialisasi terkait zonasi dan peraturan yang berlaku kepada para pelaku aktivitas, disertai pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi dan melestarikan lingkungan;
 - (15) Menetapkan area bebas jangkar (*no anchoring* atau *limited anchoring*);
 - (16) Menempatkan kapal di area yang sudah ditentukan; dan
 - (17) Sosialisasi terkait area bebas jangkar dan peraturan yang berlaku kepada para pelaku aktivitas.
- b) Berdasarkan peraturan tentang konservasi sumber daya ikan, rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati laut yang dapat dilaksanakan mencakup:
- (1) Konservasi ekosistem yang meliputi perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati, pemanfaatan kawasan konservasi untuk perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, penelitian dan pendidikan, pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi;

2) Konservasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- (2) Konservasi jenis yang meliputi perlindungan jenis biota, pemanfaatan jenis biota, pelestarian jenis biota, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi; dan
 - (3) Konservasi genetik melalui riset.
- 3) Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari potensi pencemaran bahan dan/atau limbah B3
- a) Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan limbah B3 yang mengacu pada peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - (2) Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 ke darat di lokasi proyek yang sesuai karakteristik limbahnya;
 - (3) Penggunaan absorben untuk membersihkan ceceran limbah B3 dan limbahnya akan ditampung di TPS limbah B3;
 - (4) Penanganan dan pengangkutan limbah B3 akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin; dan
 - (5) Mewajibkan setiap kapal untuk tidak membuang air *ballast*, limbah cair berminyak dan mengandung B3 ke perairan pelabuhan sesuai dengan yang ditetapkan *International Maritime Organization (IMO)*.
 - b) Rencana aksi pengelolaan limbah B3 mencakup:
 - (1) Identifikasi limbah B3;
 - (2) Pengemasan limbah B3;
 - (3) Penyimpanan sementara limbah B3;
 - (4) Pengangkutan limbah B3; dan
 - (5) Pemeriksaan pengelolaan limbah B3.
- 4) Rencana Pengelolaan Limbah Domestik dengan tujuan untuk memandu pengelolaan limbah domestik baik padat maupun cair yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi dan juga kegiatan operasional fasilitas pendukung di lokasi wisata.

a) Strategi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

a) Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya oleh pemilik usaha dan pengunjung;
- (2) Menyediakan TPS berdasarkan jenis limbah padat sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan;
- (3) Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk melakukan pengelolaan lanjutan limbah padat secara berkala; dan
- (4) Sosialisasi kepada para pekerja konstruksi terkait pengelolaan sampah di area konstruksi.

b) Rencana aksi limbah domestik mencakup:

- (1) Identifikasi limbah domestik;
- (2) Pengelolaan limbah padat;
- (3) Pengelolaan limbah cair; dan
- (4) Penerapan *housekeeping*.

b. Mitigasi bencana

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana difokuskan kepada:

- 1) Optimalisasi strategi penyadaran publik untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana;
- 2) Mengembangkan riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil riset; dan
- 3) Penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas nasional berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah, dan hutan sesuai dengan hasil kajian risiko bencana serta kajian lingkungan hidup strategis daerah.

Berbagai rencana aksi pelestarian kekayaan alam dan pengelolaan lingkungan tersebut akan dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi secara internal oleh pelaksana kegiatan, dan eksternal oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

daerah. Proses pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan terhadap kondisi kekayaan alam seperti keberadaan mangrove, terumbu karang, dan penyu;
- b. Pemantauan terhadap kondisi kebersihan lingkungan di lokasi kegiatan;
- c. Pengambilan sampel kualitas lingkungan termasuk air laut dan biota laut secara rutin untuk kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu yang berlaku;
- d. Evaluasi pihak eksternal oleh lembaga pemerintahan terkait dan pihak pemberi dana program dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
- e. Pelaporan oleh pemrakarsa proyek dilakukan sesuai jadwal evaluasi.

Parameter/indikator keberhasilan yang perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala dari pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap pelestarian kekayaan alam dan pengelolaan lingkungan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Rencana Aksi dan Indikator Keberhasilan Pelestarian Alam dan Pengelolaan Lingkungan

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Daratan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak adanya kerusakan hutan, penebangan pohon pada zona inti, penangkapan, perburuan, dan pembunuhan satwa terrestrial dari TWA Tanjung Tampa yang disebabkan oleh pembangunan pusat kuliner.• Jalur pendakian dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.• Struktur, bentuk, dan desain bangunan mengikuti ketentuan terkait dengan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung.• Pelebaran jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.• Pagar pembatas yang menandakan jalur pendakian.• Standar prosedur operasional (SOP) tentang jalur pendakian.

Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lautan	<ul style="list-style-type: none">• Penempatan kapal sesuai dengan area yang sudah ditentukan.• Parameter kualitas air laut memenuhi baku mutu air laut.• Tidak terjadi kerusakan habitat dan/atau terganggunya biota laut.• Tidak terjadi kerusakan habitat dan/atau kerusakan terumbu karang.• Tidak terjadi kerusakan habitat dan/atau kerusakan mangrove.• Tidak terganggunya penyu, telur, dan habitatnya akibat kegiatan manusia.• Jumlah pengunjung sesuai dengan rencana pengelolaan pengunjung.
Rencana Pengelolaan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.• Tidak ada pencemaran limbah B3.
Rencana Pengelolaan Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none">• Terpeliharanya kebersihan di lingkungan proyek.• Terpenuhinya parameter kualitas efluen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan standar Baku Mutu Air Limbah Domestik.• Tersusunnya peraturan kawasan mengenai pelarangan pembuangan sampah secara sembarangan.• Tersusunnya SOP larangan pembuangan sampah pada jalur pendakian.

3. Tata Kelola Sosial Budaya

Pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena memperhatikan tata kelola sosial budaya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaannya mencakup mitigasi terhadap risiko sosial, serta preservasi budaya dan pengelolaan cagar budaya.

- a. Pengelolaan dampak sosial difokuskan pada rencana pengelolaan dampak dari pengadaan tanah mengingat isu kepemilikan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena. Di beberapa wilayah masih banyak

ditemukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

ditemukan perselisihan lahan, yang disebabkan oleh lahan-lahan yang masih belum dilengkapi sertifikat, tumpang tindih data terkait surat keterangan kepala desa dan bukti jual beli untuk lahan yang sama, ketidaksesuaian batas tanah, dan perselisihan harga lahan yang dipengaruhi oleh munculnya spekulator lahan. Oleh karena itu, rencana pengelolaan dampak dari pengadaan tanah disusun dengan tujuan untuk:

- 1) Menghindari pengadaan tanah dan penggusuran secara terpaksa;
- 2) Menghindari pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali secara terpaksa atau jika tidak dapat dihindari, perlu upaya mengeksplorasi alternatif desain proyek untuk meminimalisasi dampak; dan
- 3) Mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang tidak terhindarkan dari pengadaan tanah, atau dari pembatasan akses terhadap penggunaan lahan atau sumber daya, atau terhadap taman nasional yang ditetapkan secara hukum dan kawasan lindung yang mengakibatkan dampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat terkena dampak dengan: (i) memberikan kompensasi tepat waktu untuk kehilangan aset dengan biaya penggantian yang wajar dan adil; dan (ii) membantu orang-orang yang dipindahkan untuk memulihkan dan meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka.

Tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan untuk mengelola dampak pengadaan tanah antara lain:

- 1) Konsultasi dengan pengguna tanah yang teridentifikasi mengenai pengadaan tanah dan mekanisme kompensasi dan merancang mekanisme penanganan keluhan untuk memberi masyarakat kesempatan untuk mengajukan pengaduan secara formal jika ada keberatan terkait dengan pengadaan tanah atau proses kompensasi;
- 2) Penetapan prosedur formal pengadaan tanah dengan perincian yang jelas tentang mekanisme kompensasi dan disosialisasikan kepada semua orang yang terkena dampak (termasuk pengguna lahan dan keluarga mereka);

3) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

- 3) Pelaksanaan studi LARAP, dengan mengumpulkan data sosial-ekonomi semua orang yang berpotensi terkena dampak, baik mata pencaharian dan kondisi kehidupan sebagai bagian dari proses penggantian tanah/kompensasi, termasuk identifikasi orang-orang yang lebih rentan terkena dampak yang harus diberi perhatian khusus untuk memastikan pemulihan mata pencaharian mereka; dan
- 4) Perancangan dan pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian bagi penduduk yang terkena dampak.

Proses pemantauan dan evaluasi rencana perlindungan dan pengelolaan dampak pengadaan tanah dilakukan baik secara internal oleh pemrakarsa atau pelaksana proyek, maupun secara eksternal oleh lembaga pemerintah terkait, sebagai berikut:

- 1) Pemantauan rutin bulanan atau setiap triwulanan pada tahap awal perancangan sampai dengan sedikitnya satu tahun pertama operasionalisasi program/subproyek oleh internal;
- 2) Evaluasi pihak eksternal oleh dinas pemerintahan terkait dan pihak pemberi dana program dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
- 3) Pelaporan oleh pemrakarsa proyek dilakukan sesuai jadwal evaluasi.

Parameter/indikator keberhasilan yang perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala dari pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap masyarakat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Rencana Aksi dan Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dampak dari Pengadaan Tanah

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Kajian Alternatif Penentuan Lokasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan hasil kajian alternatif lokasi pembangunan.• Tidak ada dampak penting/signifikan dari pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung pengembangan Pariwisata dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena.

Pengkajian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Pengkajian Nilai Aset dan Penghitungan Kompensasi	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pengukuran aset terkena dampak tersertifikasi.• Laporan pengkajian nilai aset dan penghitungan kompensasi oleh penilai tersertifikasi.
Rencana Konsultasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi proses dan hasil konsultasi.• Dokumentasi proses <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC), apabila ada aset adat dan warisan atau cagar budaya terkena dampak pengadaan tanah.• Dokumentasi keluhan dan resolusi penyelesaian keluhan.
Program Pemulihan Penghidupan Masyarakat terkena Dampak	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat partisipasi masyarakat terkena dampak proyek dalam perencanaan dan implementasi program pemulihan penghidupan masyarakat.• Tercapainya target program pemulihan penghidupan, seperti peningkatan pendapatan atau bertambahnya alternatif sumber pendapatan rumah tangga orang terkena dampak.
Dampak Pengadaan Tanah terhadap Aset Adat dan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Aset adat yang terkena dampak telah dikompensasi secara adil, sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat adat terkait, sebagaimana terdokumentasikan dalam proses konsultasi FPIC.• Benda warisan atau cagar budaya yang terkena dampak dapat direlokasi dan/atau tetap dilestarikan dengan konsultasi dan persetujuan serta bekerja sama dengan masyarakat pengelola/pemilik termasuk masyarakat adat serta dinas terkait.

- b. Rencana pengelolaan dampak terhadap masyarakat adat diarahkan untuk membuka akses masyarakat adat kepada sumber daya alam dan cagar budaya yang bernilai penting bagi mereka. Hal ini bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat dari segi perekonomian, akan tetapi di sisi lain dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan norma budaya, religi, dan sejarah yang selama ini dipegang kuat oleh

masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

masyarakat adat. Mitigasi dari potensi dampak negatif ini dapat dilakukan mulai dari identifikasi kegiatan-kegiatan di RIDPN yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat adat, serta para Pemangku Kepentingan terkait. Beberapa dampak dari pengembangan Pariwisata yang perlu dikelola termasuk:

- 1) Potensi gangguan terhadap aktivitas kebudayaan dan Pariwisata yang sudah berjalan, misalnya dalam bentuk kompetisi dengan pendatang dalam mendapatkan manfaat dari pengembangan Pariwisata yang sejalan dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan usaha di wilayah adat;
- 2) Dampak terhadap akses masyarakat ke sumber penghidupan tradisional (seperti pertanian), dan dampak perluasan wilayah Pariwisata di kampung adat sehingga berpotensi pada terdesaknya, pemindahan atau relokasi masyarakat adat; dan
- 3) Gangguan terhadap sumber daya alam dan warisan budaya yang memiliki nilai penting: (i) cagar budaya/warisan budaya yang bernilai penting atau disakralkan, baik itu dari norma budaya, religi, dan nilai sejarah; dan (ii) tanah adat atau sumber daya alami lainnya yang secara adat berstatus milik komunal dan bernilai penting atau disakralkan.

Berdasarkan potensi dampak tersebut di atas, maka rencana perlindungan masyarakat adat yang dilaksanakan dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena adalah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis terhadap rencana alternatif pengembangan Pariwisata yang akan bersinggungan dengan masyarakat adat, pemukiman adat, tanah adat, ataupun warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat adat;
- 2) Apabila dampak tidak bisa dihindari, upaya yang perlu dilaksanakan yaitu mengoptimalkan/memastikan masyarakat adat mendapatkan dampak positif dari pengembangan Pariwisata di wilayahnya dan merumuskan langkah-langkah atau rencana aksi untuk memitigasi dampak negatif berdasarkan konsultasi dan kesepakatan dengan komunitas adat yang terkena dampak;

(3) Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- 3) Pengembangan daya tarik budaya yang sudah ada seperti pada Kampung Sade dan Ende yang memiliki potensi untuk menjadi daya tarik wisata, sesuai dengan nilai-nilai, karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat, serta regulasi dan standar internasional;
- 4) Apabila pengembangan Pariwisata menimbulkan dampak terhadap sumber daya lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat ataupun tanah adat/komunal, maka rencana pengadaan lahan dan analisa dampak sosial, serta program pemulihan penghidupan perlu dirancang; dan
- 5) Untuk program pengembangan Pariwisata yang bersinggungan dengan cagar budaya, atau memanfaatkan cagar budaya sebagai objek komersil (sebagai daya tarik wisata), maka rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap cagar budaya perlu disusun dan dilaksanakan oleh pemrakarsa program bersama dengan dan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat adat.

Pelaksanaan rencana tersebut di atas dilengkapi dengan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara internal dari pelaksana kegiatan, dan eksternal oleh lembaga pemerintah terkait, sebagai berikut:

- 1) Pemantauan rutin bulanan atau setiap triwulan pada tahap awal perancangan dan sampai dengan sedikitnya satu tahun pertama operasionalisasi program/subproyek oleh internal;
- 2) Evaluasi pihak eksternal oleh lembaga pemerintahan terkait dan pihak pemberi dana program dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
- 3) Pelaporan oleh pemrakarsa proyek dilakukan sesuai jadwal evaluasi.

Parameter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Parameter/indikator keberhasilan yang perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala dari pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Rencana Aksi dan Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dampak terhadap Masyarakat Adat.

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Program Pemberdayaan Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses dan kesempatan bagi masyarakat adat terkait dampak positif ekonomi dari pengembangan Pariwisata, dapat dilihat melalui, misalnya peningkatan pendapatan atau beragamnya sumber pendapatan.• Pendidikan nilai budaya dan kelembagaan adat terlestarikan kepada generasi muda dari masyarakat adat untuk menjaga keberlanjutan dari implementasi nilai tradisional, norma budaya, dan adat istiadat yang menjadi daya tarik wisata.• Fasilitas dan infrastruktur pendukung pengembangan Pariwisata yang memadai termanfaatkan oleh masyarakat adat.
Program Pengelolaan Potensi Dampak Negatif terhadap Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none">• Studi perencanaan yang sudah mempertimbangkan dampak dan/atau minimalisasi dampak terhadap masyarakat adat, serta dan alternatif pengembangan Pariwisata yang minimal gangguan terhadap aset adat, serta menghindari relokasi.• Indikator keberhasilan dari strategi rencana aksi.
Konsultasi dengan	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi proses dan hasil konsultasi sesuai FPIC.

Masyarakat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi keluhan dan resolusi penyelesaian keluhan.
Program Peningkatan Kapasitas Pemrakarsa Proyek	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi pelaksanaan pelatihan.• Hasil pemantauan dan evaluasi keefektifan pelatihan terhadap peningkatan kapasitas pihak yang terlibat.

c. Rencana pengelolaan dan pelestarian budaya di DPN Lombok-Gili Tramena difokuskan pada sejarah, budaya, dan bahasa. Beberapa kelompok masyarakat yang teridentifikasi sesuai data Provinsi NTB, data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan informasi dari *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) RIDPN Lombok-Gili Tramena, adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat adat Kampung Sade di Kecamatan Pujut, teridentifikasi sebagai Masyarakat Adat dalam ESMF.
- 2) Masyarakat adat Kampung Ende di Kecamatan Pujut, teridentifikasi sebagai Masyarakat Adat dalam ESMF.
- 3) Masyarakat adat Jerowaru, di Kecamatan Jerowaru, teridentifikasi sebagai pranata atau Masyarakat Hukum Adat dalam data Dinas Kebudayaan Provinsi NTB dan data AMAN.

Ketiga kelompok masyarakat adat di atas merupakan penerima dampak sensitif untuk pengembangan Pariwisata di KTA Pantai Selatan. Pranata masyarakat adat (termasuk yang diakui oleh pemerintah, yang terdata di Dinas Kebudayaan), memiliki sensitifitas medium, sehingga pembangunan di wilayah yang bersinggungan dengan masyarakat adat perlu melindungi dan melestarikan pranata adat yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena dapat menjamin keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal, termasuk warisan budaya, yang menjadi modalitas untuk pengembangan Pariwisata.

Di Pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Di Pulau Lombok ada lebih dari 60 puluh situs yang telah terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pelestarian dan pemanfaatan budaya dapat diarahkan pada setidaknya 11 situs cagar budaya. Dari kesebelas situs tersebut, Kota Mataram sudah memiliki rencana penataan situs warisan budaya yang dituangkan dalam Skema Perencanaan Kota Mataram tahun 2011-2031. Rehabilitasi cagar budaya/kawasan cagar budaya akan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pemugaran/pelestarian cagar budaya melalui konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Tabel 8. Beberapa Situs Warisan Budaya di Pulau Lombok

No.	Warisan Budaya	Lokasi	Tipologi
1.	Masjid Gunung Pujut	Lombok Tengah	Masjid
2.	Masjid Rambitan	Lombok Tengah	Masjid
3.	Pura Meru Cakranegara	Kota Mataram	Pura
4.	Taman Mayura	Kota Mataram	Taman
5.	Makam Seriwa	Lombok Tengah	Pemakaman
6.	Kompleks Taman Narmada	Lombok Barat	Taman
7.	Taman Lingsar	Lombok Barat	Taman
8.	Kompleks Makam Selaparang	Lombok Timur	Pemakaman
9.	Masjid Raudatul Muttaqqin	Lombok Timur	Masjid
10.	Masjid Kuno Bayan Beleq	Lombok Utara	Masjid
11.	Kawasan Kota Ampenan	Kota Mataram	Kota Lama

Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Rencana aksi perlindungan dan pengelolaan cagar budaya dapat mencakup: (i) pelestarian aset fisik yang masih ada, meliputi perlindungan hukum, perlindungan, pemeliharaan, rehabilitasi; dan (ii) rekonstruksi pusaka. Objek pelestariannya dapat mencakup: (i) aset fisik, berupa bangunan, kompleks bangunan, atau kawasan cagar budaya; (ii) pusaka budaya non fisik (tak benda), berupa tarian, upacara, pakaian, peralatan, lagu, cerita rakyat/legenda, kepercayaan, dan sebagainya; dan (iii) nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang perlu diangkat, dalam kaitannya dengan pengembangan. Pelaksanaan rencana tersebut di atas juga dilengkapi dengan peningkatan literasi kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan terkait rencana pengembangan Pariwisata keberadaan cagar budaya dan nilai dapat dikonfirmasi, serta berbagai potensi dampak negatif dapat diidentifikasi lebih awal dan disusun strategi penanganannya.

Dalam hal pengembangan Pariwisata menimbulkan penemuan tak terduga (*chance find*) dari objek warisan budaya potensial, benda arkeologi, sisa peninggalan budaya atau situs, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan melindungi situs, objek, atau fitur warisan budaya yang sebelumnya tidak diidentifikasi dari dampak proyek. Prosedur ini berlaku untuk benda warisan budaya, fitur atau situs yang diidentifikasi sebagai hasil dari proyek pembangunan atau pengembangan pada area yang memiliki warisan budaya terdaftar; dan
- 2) Mengembangkan kesepakatan yang adil dari pemanfaatan sumber daya benda cagar budaya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Pelaksanaan dari rencana aksi pengelolaan dampak terhadap warisan dan cagar budaya akan dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara internal dari pemrakarsa atau pelaksana proyek, dan eksternal oleh instansi pemerintah, sebagai berikut:

- 1) Pemantauan rutin bulanan atau setiap triwulan pada tahap awal perencanaan dan tahun pertama pelaksanaan program oleh internal;
- 2) Evaluasi pihak eksternal oleh dinas pemerintahan terkait dan pihak pemberi dana program dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
- 3) Pelaporan oleh pemrakarsa proyek dilakukan sesuai jadwal evaluasi.

Parameter/indikator keberhasilan yang perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala dari pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan dampak terhadap warisan dan cagar budaya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Rencana Aksi dan Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dampak Terhadap Warisan Dan Cagar Budaya

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
Program Sosialisasi Masyarakat dan Pelibatan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya material atau bahan presentasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan Pemangku Kepentingan.• Adanya partisipasi dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan untuk berbagai informasi.• Adanya poin-poin yang disepakati bersama dari hasil konsultasi atau diskusi atau mufakat.• Adanya masukan atau saran dari Pemangku Kepentingan tentang isu prioritas.

Tersusunnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
	<ul style="list-style-type: none">• Tersusunnya <i>record</i> atau catatan yang baik dari hasil pertemuan dan konsultasi berupa: foto-foto kegiatan, material, daftar hadir, <i>minutes of meeting</i> yang dapat menggambarkan tujuan dan hasil dari aktivitas pelibatan Pemangku Kepentingan, dan adanya rencana tindak lanjut.
Program Pelatihan Pemahaman tentang Benda Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Adanya bahan pelatihan.• Dokumentasi pelaksanaan pelatihan (dibuktikan dengan foto-foto kegiatan, material, daftar hadir, laporan pelatihan).• Hasil pemantauan dan evaluasi keefektifan pelatihan terhadap peningkatan kapasitas pihak yang terlibat dalam pelatihan.
Prosedur Penemuan Tak Terduga	<ul style="list-style-type: none">• Langkah yang tepat sudah dilakukan ketika ada penemuan tak terduga.• Laporan temuan disampaikan ke pihak yang tepat dan mitigasi dilakukan dengan sesuai.• Foto-foto hasil temuan tak terduga.
Sistem Mekanisme Keluhan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya alur/bagan sistem penerimaan dan penanganan keluhan.• Adanya pemahaman masyarakat tentang mekanisme keluhan yang diterapkan pemrakarsa proyek.• Adanya kontak pemrakarsa yang diketahui masyarakat sebagai tujuan untuk menyampaikan keluhan.• Tidak adanya pengulangan keluhan dari orang yang sama.• Catatan keluhan dan resolusi/penyelesaian keluhan yang dilakukan pemrakarsa.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

BAB IV

RENCANA AKSI

Pengembangan Kepariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena perlu didukung kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh Pemangku Kepentingan untuk saling melengkapi, membangun dialog, dan mengembangkan pemahaman baru tentang strategi pengembangan terbaik. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk RIDPN Lombok-Gili Tramena yang menggabungkan perencanaan pengembangan Kepariwisata dan bidang-bidang terkait di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Rencana yang tertuang di RIDPN Lombok-Gili Tramena mencakup jangka waktu 25 tahun. Sasaran dan arah kebijakan dalam RIDPN Lombok-Gili Tramena diterjemahkan lebih lanjut menjadi rencana aksi dengan rincian pelaksanaan difokuskan pada lima tahun pertama. Rencana aksi tersebut diklasifikasi dalam empat kelompok sesuai dengan tujuan dari penyusunan RIDPN, yaitu:

1. Kelompok rencana aksi peningkatan kelembagaan yang mencakup antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, pengelolaan destinasi dan lingkungan termasuk kawasan konservasi, pengadaan lahan, serta penataan ruang;
2. Kelompok rencana aksi peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan yang mencakup antara lain pembangunan atau revitalisasi jalan dan jembatan, pelabuhan, bandar udara, transportasi publik, air bersih, air limbah, persampahan, drainase, perumahan dan permukiman, serta penataan kawasan;

3. Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

3. Kelompok rencana aksi peningkatan perekonomian lokal/masyarakat yang mencakup antara lain pengembangan kapasitas dan pendampingan masyarakat termasuk sarana prasarana pendukung usaha-usaha berbasis masyarakat; dan
4. Kelompok rencana aksi peningkatan investasi yang mencakup antara lain percepatan realisasi investasi yang didukung dengan perluasan pemasaran dan penguatan *branding*.

Pelaksana dari RIDPN Lombok-Gili Tramena adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, serta didukung kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, media, dan kelompok masyarakat.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena pada lima tahun pertama dapat dipenuhi dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendanaan swasta, pendanaan di bawah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta pendanaan mitra pembangunan internasional. Bagian dari APBN dapat mencakup pendanaan kementerian/lembaga, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Rincian kegiatan, lokasi, target, tahun, dan instansi pelaksana tercantum dalam Matriks Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Tabel 10. Matriks Rencana Aksi Tahun 2020 - 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN				
1.1	Kelembagaan				
1.1.1	Pembuatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Atraksi Pendukung KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong (Gita Nada), Sub KTA Praya – Mandalika (Selong Belanak, Sade-Ende)	3 Dokumen	2022-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.1.2	Pembuatan <i>Master Planning</i> dan <i>Urban Design</i> untuk Atraksi Pendukung KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong (Mekaki, Belongas), Sub KTA Praya – Mandalika (Mawun, Teluk Awang), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga)	5 Dokumen	2021-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.1.3	Perumusan dan Penetapan Dokumen Regulasi terkait Pengendalian Pembangunan	Sub KTA Sekotong (Belongas), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink, Pantai Surga)	3 Dokumen	2021	Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

1.1.4 Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.4	Pembentukan Spesifikasi Minimum Desain dan Konstruksi <i>Building Codes</i>	Seluruh Sub KTA, Seluruh Pulau Lombok	1 Paket	2022-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.1.5	Penyusunan Regulasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Lintas KTA, Seluruh Pulau Lombok	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
1.1.6	Penyusunan RIPPARDA Kabupaten	Lombok Timur	1 Dokumen	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
1.1.7	Penyusunan Regulasi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Lintas KTA, Seluruh Pulau Lombok	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
1.1.8	Tinjauan Yudisial dan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Lintas KTA, 5 Kabupaten	5 Dokumen	2020-2024	Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

1.1.9 Perumusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.9	Perumusan Studi LARAP	Lintas KTA, 10 Sub KTA	10 Dokumen	2020-2024	Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.1.10	Penyusunan Panduan Insentif dan Disinsentif Tanah untuk Investor	Lintas KTA, 10 Sub KTA	10 Dokumen	2020-2024	Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.1.11	Penyusunan Regulasi dan Skema Kerja Relokasi Lahan	Lintas KTA, Seluruh Pulau Lombok	10 Dokumen	2020-2024	Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.1.12	Rencana Konsolidasi Lahan	Lintas KTA, 10 Sub KTA	10 Dokumen	2020-2024	Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

1.1.13 Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.13	Kawasan Pengembangan Wisata Bahari dan BMKT Secara Berkelanjutan	Disesuaikan berdasarkan Usulan dan Seleksi	1 Provinsi	2020-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB
1.1.14	Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah	1 Provinsi	2020-2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
1.1.15	Perumusan dan Penetapan Dokumen Regulasi terkait Pengendalian Pembangunan	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili, Tanjung-Medana), Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi)	3 Dokumen	2021	Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.1.16	Pembangunan Destinasi Wisata Alternatif	Sub KTA Senggigi, Pantai Nipah	1 Lokasi	2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

1.1.17 Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.17	Pembentukan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan di Provinsi	Pulau Lombok	1 Pokja	2020-2024	Pemerintah Provinsi NTB
1.1.18	Pembentukan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kab/Kota	Pulau Lombok	5 Pokja	2020-2024	Pemerintah Daerah Kab/Kota di Pulau Lombok
1.1.19	Pengembangan Sistem <i>Ticketing</i> Obyek Wisata	Sub KTA Senggigi, Desa Pusuk	1 Sistem	2022	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
1.1.20	Perumusan dan Penetapan Dokumen Kebijakan Pembatasan Jumlah Aktivitas dan Jam Operasional Daya Tarik Wisata	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili), Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi, Bukit Malimbu, Desa Pusuk)	4 Dokumen	2022	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

1.1.21 Perumusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.21	Perumusan dan Penetapan Dokumen Regulasi Lingkungan	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili, Tanjung-Medana), Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi, Bukit Malimbu, Desa Pusuk), Sub KTA Mataram (Kota Tua Ampenan, Ampenan - Selaparang)	7 Dokumen	2021	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
1.1.22	Penyelenggaraan Sosialisasi Masyarakat terkait Aktivitas Pariwisata di Wilayahnya	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili, Tanjung-Medana), Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi, Bukit Malimbu, Desa Pusuk), Sub KTA Mataram (Kota Tua Ampenan, Ampenan - Selaparang)	7 Kegiatan	2020	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

1.1.23 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.23	Pengembangan Sistem Pendaftaran <i>Online</i> untuk Daya Tarik Wisata	Sub KTA Gili Tramena	1 Sistem	2022	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
1.1.24	Pengembangan Sistem <i>Ticketing</i> Daya Tarik Wisata	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Sade dan Ende, Mekaki), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga, Pantai Pink)	4 Sistem	2022	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
1.1.25	Perumusan dan Penetapan Dokumen Kebijakan Pembatasan Jumlah Aktivitas dan Jam Operasional Daya Tarik Wisata	Sub KTA Sekotong (Belongas, Mekaki, Gita Nada, Gili Gede), Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Sade dan Ende)	5 Dokumen	2022	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

1.1.26 Perumusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.26	Perumusan dan Penetapan Dokumen Regulasi Lingkungan	Sub KTA Sekotong (Gita Nada, Gili Gede, Mekaki, Belongas), Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Sade dan Ende, Mandalika, Teluk Awang, Selong Belanak), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink, Pantai Surga)	10 Dokumen	2021	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
1.1.27	Penyelenggaraan Sosialisasi Masyarakat terkait Aktivitas Pariwisata di Wilayahnya	Sub KTA Sekotong (Gita Nada, Gili Gede, Mekaki, Belongas), Sub KTA Praya - Mandalika, (Desa Sade dan Ende, Mandalika, Teluk Awang, Selong Belanak), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink, Pantai Surga)	10 Kegiatan	2020	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

1.1.28 Penelitian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.28	Penelitian Spesifik terkait Bahaya Bencana	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	1 Paket	2020-2021	Bappeda Provinsi NTB
1.1.29	Penelitian Fluktuasi Muka Air Tanah Terkait Gempa Lombok	Pulau Lombok	1 Publikasi	2021-2022	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
1.1.30	Pelatihan Mitigasi	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	1 Paket	2021-2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
1.1.31	Pelaksanaan Studi Mikrozonasi	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	1 Paket	2022-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
1.1.32	Regulasi dan Pemosisian Halal-Friendly Tourism	Lintas KTA di Pulau Lombok	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

1.1.33 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.33	Pengembangan Platform Manajemen Pariwisata Berbasis <i>Online</i>	Pulau Lombok	1 Dokumen	2020-2024	Kemenparekraf/ Baparekraf
1.1.34	Perumusan Paket Perjalanan Wisata	Pulau Lombok	1 Paket	2020-2024	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
1.1.35	Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal	Pulau Lombok	1 Paket	2020-2024	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
1.1.36	Perumusan Perantara Bisnis pada beberapa Kabupaten/Kota	Pulau Lombok	4 Lokasi	2020-2024	Kemenparekraf/ Baparekraf
1.1.37	Revitalisasi dan Pembangunan Kawasan untuk Atraksi Wisata	Sub KTA Praya – Mandalika, Gerupuk, Lombok Tengah	2 Lokasi	2020-2024	Kementerian PUPR

1.1.38 Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.38	Pengawasan Pembentukan Pokja Daerah	Pulau Lombok	1 Dokumen	2021	Kementerian Dalam Negeri
1.1.39	Penyusunan Rencana Pengelolaan Wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani	Sub KTA Rinjani	1 Dokumen	2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.40	Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sampah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani	Sub KTA Rinjani	1 Paket	2021-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.41	Penanganan Area Terbuka (<i>Opened Area</i>) di Kawasan Konservasi	Sub KTA Rinjani, Kabupaten Lombok Timur	1 Paket	2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.1.42 Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.42	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Sub KTA Rinjani, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	2 Paket	2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.43	Pengembangan Destinasi Wisata Alam Prioritas	Sub KTA Rinjani	1 Paket	2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.44	Pembentukan <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Pulau Lombok	1 Dokumen	2021	Kemenparekraf/ Baparekraf
1.1.45	Pengembangan Kelembagaan Tata Kelola Pariwisata di Pulau Lombok	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2020-2024	Kemenparekraf/ Baparekraf

1.1.46 Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.46	Pelaksanaan <i>Sustainable Tourism Observatorium</i> (STO) Lombok	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2020-2024	Kemenparekraf/ Baparekraf
1.1.47	Pelatihan ASN untuk Pengelolaan Lingkungan (<i>Environmental Safeguard</i> dan <i>Environmental and Social Management Framework</i>) terkait Pembangunan Pariwisata	Pulau Lombok	10 Kegiatan	2020-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.48	Penyelenggaraan, Pelatihan, dan Pendampingan Komitmen yang dilakukan Seluruh Pemangku Kepentingan terkait Pariwisata dalam Meningkatkan serta Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Inklusif	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2020-2024	Kemenparekraf/ Baparekraf

1.1.49. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.49	Pelatihan terkait Insentif dan Disinsentif dalam Mendukung Pembangunan dan Pengembangan yang Sesuai dengan Rencana Kepariwisata	Pulau Lombok	1 Paket	2020-2024	Kemenparekraf/ Baparekraf
1.1.50	Pelatihan dalam Penerapan <i>Smart Technology</i> dalam Aspek Kepariwisata	Pulau Lombok	1 Paket	2020-2024	Kemenkominfo
1.1.51	Pelatihan Penerapan Strategi dan Pemasaran dalam Peningkatan Investasi Pariwisata	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2020-2024	Kementerian Investasi/BKPM
1.1.52	Bimbingan Teknis Pengembangan Pelabuhan	Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat	5 Kegiatan	2020-2024	Kementerian Perhubungan

1.1.53 Perjanjian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.1.53	Perjanjian Kerjasama yang difasilitasi Kerjasama antar Daerah dalam Peningkatan Kepariwisata terutama di lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas	Pulau Lombok	3 MoU	2021	Kemendagri
1.2	Lahan dan Tata Ruang				
1.2.1	Relokasi Tanah untuk Pengembangan Atraksi Pariwisata KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Gili Tramena, Sub KTA Senggigi	2 Paket	2022-2024	Kementerian ATR/BPN
1.2.2	Konsolidasi Lahan dan Penataan Kawasan Terbangun KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Gili Tramena, Sub KTA Senggigi	2 Paket	2022-2024	Kementerian ATR/BPN

1.2.3 Konsolidasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.2.3	Konsolidasi Lahan dan Penataan Kawasan Terbangun KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya – Mandalika, dan Sub KTA Pantai Pink	3 Paket	2021-2024	Kementerian ATR/BPN
1.2.4	Relokasi Tanah untuk Pengembangan Atraksi Pariwisata KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya – Mandalika, dan Sub KTA Pantai Pink	3 Paket	2022-2024	Kementerian ATR/BPN
1.2.5	Revitalisasi dan Pembangunan Kawasan untuk Atraksi Wisata	Sub KTA Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air)	3 Lokasi	2020	Kementerian PUPR
1.2.6	Perumusan RDTR untuk KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang, Tanjung), Sub KTA Senggigi (Batu Layar)	3 Dokumen	2021-2022	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

1.2.7 Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.2.7	Pembuatan <i>Urban Design Guidelines</i> (UDGL) untuk Atraksi Prioritas KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Gili Tramena, Sub KTA Senggigi	2 Dokumen	2022-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.2.8	Pembuatan Recana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Atraksi Pendukung KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Senggigi, Pelabuhan Bangsal	1 Dokumen	2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.2.9	Pembuatan <i>Master Planning</i> dan <i>Urban Design</i> untuk Atraksi Pendukung KTA Gili- Senggigi yang Bersisian dengan KTA Mataram	Sub KTA Mataram, Koridor Ampenan-Senggigi	1 Dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

1.2.10 Perumusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
1.2.10	Perumusan RDTR untuk KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong (Sekotong), Sub KTA Praya – Mandalika (Praya Barat), Sub KTA Pantai Pink (Pujut, Jerowaru)	4 Dokumen	2020-2023	Kementerian ATR/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
1.2.11	Pembuatan <i>Urban Design Guidelines</i> (UDGL) untuk Atraksi Prioritas KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong (Gili Gede), Sub KTA Praya – Mandalika (Mandalika dan sekitarnya), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink)	3 Dokumen	2021-2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2	PROGRAM INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN KAWASAN				
2.1	Jalan dan Jembatan				
2.1.1	Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan	Sub KTA Gili Tramena (Terhubung dengan KTA Rinjani), Pemenang	58,62 Kilometer	2021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram

2.1.2 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.2	Pelebaran Jembatan Pemenang - Bayan	Sub KTA Gili Tramena (Terhubung dengan KTA Rinjani), Pemenang	49,8 Meter	2021	BPJN IX Mataram
2.1.3	Pelebaran Jalan Pemenang - Bangsal	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	0,25 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Utara
2.1.4	Pelebaran Jalan Karang Montong - Bangsal	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	0,76 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Utara
2.1.5	Pelebaran Jalan Tembopor - Sanggar Sari - Rangsot	Sub KTA Gili Tramena (Tanjung)	4,11 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Utara

2.1.6 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.6	Pelebaran Jalan Teluk Dalem - Oberoi	Sub KTA Gili Tramena (Tanjung)	1,59 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Utara
2.1.7	Pengembangan Jalan Bandara Internasional Lombok - Mandalika	Sub KTA Praya-Mandalika (Bandara Internasional Lombok menuju Kawasan Mandalika)	17,36 Kilometer	2021	BPJN IX Mataram
2.1.8	Pelebaran Jalan Rembiga (Batas Kota) - Pemenang	Menghubungkan KTA potensial Mataram menuju KTA Gili - Senggigi	21,64 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.1.9	Pelebaran Jalan Kuta – Kruak	Sub KTA Praya-Mandalika, Sub KTA Pantai Pink	37,95 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.1.10 Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.10	Penambahan Lajur Kuta – Kruak (Segmen Kuta - Mandalika)	Sub KTA Praya-Mandalika (Kawasan Mandalika)	5,4 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.1.11	Pelebaran Jalan Bengkel - Kediri	Menghubungkan KTA potensial Mataram menuju KTA Praya-Mandalika	2,56 Kilometer	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.1.12	Pelebaran Jalan Kruak - Pancor	Menghubungkan Sub KTA Pantai Pink ke KTA Rinjani	22,77 Kilometer	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.1.13	Pelebaran Jalan Pancor - Rempung	Menghubungkan Sub KTA Pantai Pink ke KTA Rinjani	4,41 Kilometer	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.1.14 Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.14	Penambahan lajur Lembar - Sekotong - Pelangan (segmen khusus)	Sub KTA Sekotong	7,5 Kilometer	2022	BPJN IX Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.1.15	Pelebaran Jalan Penujak - Mangkung	Sub KTA Praya-Mandalika (Selong Belanak)	6,7 Kilometer	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah
2.1.16	Pelebaran Jalan Mangkung - Selong Belanak	Sub KTA Praya-Mandalika (Selong Belanak)	12 Kilometer	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah
2.1.17	Pelebaran Jalan Akses Selong Belanak	Sub KTA Praya-Mandalika (Selong Belanak)	0,78 Kilometer	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah

2.1.18 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.18	Pelebaran Jalan Kelekuh - Bumbang	Sub KTA Praya-Mandalika (Kawasan Mandalika)	2,53 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah
2.1.19	Pelebaran Jalan Bumbang - Bukit Tunak Gate	Sub KTA Praya-Mandalika (Kawasan Mandalika)	1,1 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah
2.1.20	Pelebaran Jalan Bukit Tunak Gate - Teluk Ujung	Sub KTA Praya-Mandalika (Kawasan Mandalika)	4,17 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah
2.1.21	Pelebaran Jalan Teluk Ujung - Bilisayak	Sub KTA Praya-Mandalika (Kawasan Mandalika)	3 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah

2.1.22 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.22	Pelebaran Jalan Akses Teluk Mekaki	Sub KTA Sekotong (Teluk Mekaki)	1,6 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat
2.1.23	Pelebaran Jalan Tumpak - Are Guling	Sub KTA Praya-Mandalika (Pantai Mawun/Are Guling)	1,64 Kilometer	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah
2.1.24	Pelebaran Jalan Pantai Mawi dan Semeti	Sub KTA Praya-Mandalika (Pantai Mawi/Semeti)	3,16 Kilometer	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah
2.1.25	Pelebaran Jalan Sekotong - Lemer	Sub KTA Sekotong (Gili Gede)	7,63 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat

2.1.26 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.26	Pelebaran Jalan Lemer - Sepi	Sub KTA Sekotong (Gili Gede)	2,15 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat
2.1.27	Pelebaran Jalan Pelagan - Labuan Poh	Sub KTA Sekotong (Gili Gede)	9,3 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat
2.1.28	Pelebaran Jalan Labuan Poh - Bangko-Bangko	Sub KTA Sekotong (Gili Gede/Bangko-Bangko)	5 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat
2.1.29	Pelebaran Jalan Siung - Ketapang	Sub KTA Praya-Mandalika (Kawasan Mandalika)	2,5 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat

2.1.30 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.30	Pelebaran Jalan Tutuk - Serumbung	Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink)	4,82 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Timur
2.1.31	Pelebaran Jalan Pemongkong Serewe - Kaliantan	Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink)	11,15 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Timur
2.1.32	Pelebaran Jalan Tanak Paek - Tanjung Ringgit	Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink)	13,86 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Timur
2.1.33	Pelebaran Jalan Torok <i>Beach Access</i>	Sub KTA Praya-Mandalika (Pantai Selong Belanak/ Torok)	0,13 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah

2.1.34 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.1.34	Pelebaran Jalan Akses Pantai Surga	Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga)	9,21 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Timur
2.1.35	Pelebaran Jalan Akses Belongas Beach	Sub KTA Sekotong (Pantai Belongas)	0,08 Kilometer	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Barat
2.1.36	Studi Pemodelan Jaringan Jalan dan Lalu Lintas Pulau Lombok	Pulau Lombok	1 Dokumen	2020-2024	BPJN IX Mataram
2.1.37	Studi Kelayakan Ruas Lembar – Mataram – Kayangan (<i>Port to Port</i>)	Pulau Lombok	1 Dokumen	2020-2024	BPJN IX Mataram

2.2. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.2	Pelabuhan				
2.2.1	Paket Perbaikan Infrastruktur Terminal	Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Senggigi)	250 M2	2020	UPTD Senggigi, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perhubungan Provinsi NTB
2.2.2	Pengembangan Area Parkir	Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Senggigi)	797 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.3	Pengembangan Dermaga	Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Senggigi)	610 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.4	Pengembangan Terminal	Sub KTA Gili (Pelabuhan Gili Meno)	67 M2	2020	Kementerian Perhubungan

2.2.5 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.2.5	Pengembangan Dermaga	Sub KTA Gili (Pelabuhan Gili Meno)	570 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.6	Perbaikan Infrastruktur Terminal	Sub KTA Gili (Pelabuhan Gili Air)	205 M2	2020	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Perhubungan Provinsi NTB
2.2.7	Pengembangan Dermaga	Sub KTA Gili (Pelabuhan Gili Air)	610 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.8	Pengembangan Terminal	Sub KTA Gili (Pelabuhan Teluk Nara)	108 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.9	Pengembangan Area Parkir	Sub KTA Gili (Pelabuhan Teluk Nara)	607 M2	2020	Kementerian Perhubungan

2.2.10 Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.2.10	Perpanjangan/Ekstensi <i>Dock</i>	Sub KTA Gili (Pelabuhan Teluk Nara)	700 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.11	Perluasan Terminal	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Teluk Nara)	27 M2	2021	Kementerian Perhubungan
2.2.12	Perluasan Area Parkir	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Teluk Nara)	76 M2	2022	Kementerian Perhubungan
2.2.13	Perbaiki Infrastruktur Terminal	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Tawun)	141 M2	2020	UPTD Tawun, Dinas Perhubungan Lombok Barat, Dinas Perhubungan Provinsi NTB
2.2.14	Perbaiki Infrastruktur Area Parkir	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Tawun)	1.150 M2	2020	UPTD Tawun, Dinas Perhubungan Lombok Barat, Dinas Perhubungan Provinsi NTB

2.2.15 Pelebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.2.15	Pelebaran <i>Dock</i>	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Tawun)	200 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.16	Pengembangan Terminal	Sub KTA Pantai Pink (Tanjung Luar)	141 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.17	Pengembangan Area Parkir	Sub KTA Pantai Pink (Tanjung Luar)	319 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.2.18	Pengembangan Dermaga	Sub KTA Pantai Pink (Tanjung Luar)	610 M2	2020	Kementerian Perhubungan
2.3	Transportasi Publik				
2.3.1	<i>Detail Engineering Design</i> (DED) untuk Peningkatan / Pengembangan Terminal Tipe B	Sub KTA Gili Tramen, Tanjung	1 Dokumen	2021	Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara

2.3.2 Studi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.3.2	Studi Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Tembowong	Lombok Barat (Pelabuhan Tembowong)	1 Dokumen	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.3	Studi tentang Penentuan Potensi Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Senggigi, Sub KTA Gili Tramena, dan Seluruh Zona Inti	3 Dokumen	2021	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
2.3.4	Studi Penentuan <i>Park and Ride</i> KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Senggigi, Sub KTA Gili Tramena, dan Seluruh Zona Inti	3 Dokumen	2022	Kementerian Perhubungan
2.3.5	Studi tentang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi yang Mendukung Sistem Transportasi Umum KTA Gili-Senggigi	Sub KTA Senggigi, Sub KTA Gili Tramena, dan Seluruh Zona Inti	3 Dokumen	2021	Kementerian Perhubungan

2.3.6 Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.3.6	Peningkatan/Pengembangan Terminal Tipe B di Sub KTA Prioritas	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	1 Dokumen	2022-2023	Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Lombok Utara, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi NTB, Perum DAMRI
2.3.7	Perbaiki Infrastruktur Terminal pada Pelabuhan Pemenang	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Pemenang)	200 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.8	Perbaiki Infrastruktur Area Parkir	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Pemenang)	1.700 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.9	Perluasan Terminal I	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Pemenang)	1.266 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan

2.3.10 Perluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.3.10	Perluasan Area Parkir I	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Pemenang)	6.111 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.11	Ekstensi dan Pelebaran Dermaga I	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Pemenang)	770 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.12	Pengembangan Terminal I	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Gili Trawangan)	610 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.13	Pengembangan Dermaga I	Sub KTA Gili Tramena (Pelabuhan Gili Trawangan)	1.355 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.14	Perbaikan Infrastruktur Terminal	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Ferry Lembar)	400 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

2.3.15 Perbaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.3.15	Perbaikan Infrastruktur Area Parkir (Kendaraan Pribadi)	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Ferry Lembar)	6.000 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.16	Perbaikan Infrastruktur Area Parkir (Kendaraan Ferry)	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Ferry Lembar)	6.000 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.17	Perluasan Terminal I	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Ferry Lembar)	537 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.18	Pengembangan Dermaga I	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Ferry Lembar)	660 M2; 660 M2	2020; 2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.19	Perluasan Terminal I	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan <i>Cruise</i> Lembar)	9.185 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

2.3.20 Perluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.3.20	Perluasan Area Parkir I	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan <i>Cruise</i> Lembar)	3.084 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.21	Perbaikan Infrastruktur Area Parkir	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Tembowong)	350 M2	2020-2024	Kementerian Perhubungan
2.3.22	Perluasan Terminal I	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Tembowong)	34 M2; 696 M2	2020; 2022	Kementerian Perhubungan
2.3.23	Pengembangan Dermaga I	Sub KTA Sekotong (Pelabuhan Tembowong)	570 M2; 785 M2	2020; 2022	Kementerian Perhubungan
2.3.24	Perbaikan Infrastruktur Terminal	Sub KTA Gili Sulat (Pelabuhan Ferry Kayangan)	400 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

2.3.25 Perbaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.3.25	Perbaikan Infrastruktur Area Parkir (Kendaraan Pribadi)	Sub KTA Gili Sulat (Pelabuhan Ferry Kayangan)	4.000 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.26	Perbaikan Infrastruktur Area Parkir (Kendaraan Ferry)	Sub KTA Gili Sulat (Pelabuhan Ferry Kayangan)	4.000 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.27	Perluasan Terminal I	Sub KTA Gili Sulat (Pelabuhan Ferry Kayangan)	404 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.28	Perluasan Area Parkir I (Kendaraan Pribadi)	Sub KTA Gili Sulat (Pelabuhan Ferry Kayangan)	550 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.3.29	Perluasan Area Parkir I (Kendaraan Ferry)	Sub KTA Gili Sulat (Pelabuhan Ferry Kayangan)	112 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

2.3.30 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.3.30	Pengembangan Dermaga I	Sub KTA Gili Sulat (Pelabuhan Ferry Kayangan)	580 M2	2020-2024	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.4	Transportasi Tidak Bermotor				
2.4.1	Pengembangan Jalan Akses Kendaraan Tidak Bermotor	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	0,25 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.4.2	Revitalisasi Jalan Akses Kendaraan Tidak Bermotor	Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi)	0,11 Kilometer	2022	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
2.4.3	Konstruksi Tempat Parkir	Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi)	350 M2	2022	Dinas Perhubungan Mataram, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi NTB, Kementerian Perhubungan

2.4.4 Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.4.4	Konstruksi Jalan Akses Kendaraan Tidak Bermotor	Sub KTA Praya-Mandalika (Selong Belanak)	0,15 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.4.5	Konstruksi Jalan Akses Kendaraan Tidak Bermotor	Sub KTA Praya-Mandalika (Mawi dan Semeti)	0,25 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.4.6	Konstruksi Jalan Akses Kendaraan Tidak Bermotor	Sub KTA Praya-Mandalika (Torok)	0,115 Kilometer	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5	Air Bersih				
2.5.1	<i>Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Reverse Osmosis Air Laut di Tiga Gili</i>	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.5.2 Studi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.2	Studi Pemetaan Sumber Daya Air Baru	Sub KTA Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2022	Bappeda Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.3	Studi Sumber Daya Air untuk Pasokan Masa Depan pada Tahun 2023 dan seterusnya	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2021	Kementerian PUPR
2.5.4	Studi Sumber Daya Air Laut untuk Pasokan Masa Depan di Tiga Gili	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	2 Dokumen	2020	Kementerian PUPR
2.5.5	<i>Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Reverse Osmosis Air Laut di Selong Belanak dan Mawun</i>	Sub KTA Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.5.6 *Feasibility . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.6	<i>Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Reverse Osmosis Air Laut di Tiga Gili</i>	Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	2 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.7	<i>Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Reverse Osmosis Air Laut untuk layanan Mataram</i>	Sub KTA Mataram	2 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.8	<i>Detail Engineering Design (DED) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ranget Fase 1, Kapasitas 300 L / detik</i>	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.5.9 *Feasibility . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.9	<i>Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Reverse Osmosis Air Laut di Wilayah Sekotong</i>	Sub KTA Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.10	Pembaruan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.11	Konstruksi Pipa dari Sigar Penjalin ke Sire	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara	7.000 Meter	2021-2022	Kementerian PUPR
2.5.12	Konstruksi Pipa dari Sire ke Tiga Gili	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara	7.100 Meter	2021-2022	Kementerian PUPR

2.5.13 Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.13	Pemasangan Jaringan Distribusi Air Bersih Baru di Tiga Gili	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	15.000 Meter	2021-2022	Kementerian PUPR
2.5.14	Konstruksi Instalasi Pengolahan Air dan Fasilitas Pendukungnya (Gardu Penjaga, Pagar, dan lain-lain) dari Sungai Serawan dengan Kapasitas 20 L/detik	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	20 L/detik	2021	Kementerian PUPR
2.5.15	Peningkatan Pipa Distribusi 6 Inci untuk Area layanan Desa Pemenang Barat dan Desa Malaka (1000 SR)	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	5.000 Meter	2021	Kementerian PUPR

2.5.16 Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.16	Penambahan Koneksi Jaringan Pipa Rumah Baru di Kecamatan Tanjung	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	1.900 Sambungan Rumah (SR)	2021-2024	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2.5.17	Peningkatan Pelayanan Pipa Distribusi Air di Kecamatan Tanjung	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	21.000 Meter	2021-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.18	Penambahan Koneksi Jaringan Pipa Rumah Baru di Tiga Gili	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	1.400 SR	2021-2022	PDAM
2.5.19	Penambahan Koneksi Rumah Jaringan Pipa Baru di Desa Pemenang Barat dan Desa Malaka	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	500 SR	2021	PDAM

2.5.20 Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.20	Peningkatan Pipa Transmisi Air	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar	5.000 Meter	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.21	Peningkatan Pelayanan Pipa Distribusi Air	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar	25.000 Meter	2022-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.22	Penambahan Koneksi Jaringan Pipa Rumah Baru di Kecamatan Batulayar	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar	1.000 SR	2022-2024	PDAM
2.5.23	Konstruksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2 x 100 L/detik SPAM Dodokan Hilir	Sub KTA Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	1 Paket	2022-2023	Kementerian PUPR
2.5.24	Konstruksi Pipa Transmisi Air SPAM Dodokan Hilir: (Jaringan Pipa Transmisi), L = 150 L/detik	Sub KTA Sekotong, Lembar, Gerung dan Sekotong	14.233 Meter	2023-2024	Kementerian PUPR

2.5.25 Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.25	Penyusunan DED SPAM Ranget Fase 1, Kapasitas 300 L/detik	Sub KTA Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.5.26	Konstruksi Pipa Transmisi air SPAM Ranget, Diameter 16 inci, Kapasitas 300 L/detik	Sub KTA Sekotong (Kediri, Labuapi, Kuripan, Gerung, Lembar)	7.751 Meter	2022	Kementerian PUPR
2.5.27	Konstruksi Pipa Distribusi air SPAM Ranget	Sub KTA Sekotong (Kediri, Labuapi, Kuripan, Gerung, Lembar)	27.000 Meter	2023	Kementerian PUPR
2.5.28	Peningkatan Koneksi Jaringan Pipa Rumah Baru di Kecamatan Sekotong	Sub KTA Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	100 SR	2022-2023	PDAM

2.5.29 Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.29	Konstruksi Pipa Transmisi Air dari WTP Penujak ke Waduk Ketare, <i>High-Density Polyethylene</i> (HDPE) Diameter 300 mm	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)	7.000 Meter	2021	Kementerian PUPR
2.5.30	Konstruksi Pipa Tansmisi Air dari Waduk Ketare ke Lense - Waduk Mandalika, Diameter 250 mm	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)	11.000 Meter	2021	Kementerian PUPR
2.5.31	Konstruksi Pipa Transmisi Air dari Bendungan Pengga ke <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) 200 L/detik	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)	11.000 Meter	2021	Kementerian PUPR
2.5.32	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tibu Lempanas	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Lantan Kabupaten Lombok Tengah)	1 Paket	2021	Kementerian PUPR

2.5.33 Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.33	Penyusunan DED SPAM Mata Air Danau Biru dengan Kapasitas 100 L/detik (Broncaptering, Tangki Pelepas Tekanan, Pipa Transmisi)	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah)	1 Dokumen	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.5.34	Pembangunan SPAM Mata Air Danau Biru	Sub KTA Praya - Mandalika (Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah)	1 Paket	2022	Kementerian PUPR
2.5.35	Rehabilitasi WTP Penujak	Sub KTA Praya - Mandalika (Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)	1 Paket	2021	Kementerian PUPR
2.5.36	Penyusunan DED Pipa Distribusi Air dari WTP Penujak ke Mandalika (Diameter 300 mm)	Sub KTA Praya - Mandalika (Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

2.5.37 Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.37	Peningkatan Koneksi Jaringan Pipa Rumah Baru di Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Pujut	Sub KTA Praya - Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah	1.700 SR	2020-2024	PDAM
2.5.38	Pembaruan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lombok Tengah	Sub KTA Pantai Pink (Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)	1 Paket	2022	Bappeda Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.39	Peningkatan Pelayanan Pipa Distribusi Air di Desa Pemengkong, Desa Serawe, dan Desa Sengkaruk, Kecamatan Jerowaru	Sub KTA Pantai Pink (Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)	32.500 Meter	2021-2023	PDAM
2.5.40	Penambahan Koneksi Jaringan Pipa Rumah Baru di Desa Pemengkong, Desa Serawe, dan Desa Sengkaruk	Sub KTA Pantai Pink (Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)	1.300 SR	2022-2024	PDAM

2.5.41 Pembaruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.41	Pembaruan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	1 Dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.42	Konstruksi dan Pemasangan Distribusi Air Bersih dari Sumber Air ke Konsumen	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara	41 Paket	2020-2024	Kementerian PUPR
2.5.43	Peningkatan Pelayanan Pipa Distribusi Air di Kecamatan Tanjung	Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara	21.000 Meter	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.5.44	Peningkatan Pipa Transmisi Air	Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	5.000 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.5.45	Konstruksi Pipa Transmisi Air SPAM Ranget, Diameter 16 Inchi, Kapasitas 300 L/detik	Kediri, Labuapi, Kuripan, Gerung, Lembar	7.751 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR
2.5.46	Konstruksi Pipa Distribusi Air SPAM Ranget	Kediri, Labuapi, Kuripan, Gerung, Lembar	27.000 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR
2.5.47	Konstruksi Pipa Transmisi Air dari WTP Penujak ke Waduk Ketare, HDPE Diameter 300 mm	Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah	7.000 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR
2.5.48	Konstruksi Pipa Transmisi Air dari Waduk Ketare ke Lense - Waduk Mandalika, Diameter 250 mm	Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah	11.000 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR

2.6 Air . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6	Air Limbah				
2.6.1	Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Strategi Sanitasi Kota (SSK) untuk Kabupaten Lombok Utara	Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2020	Bappeda Kabupaten Lombok Utara
2.6.2	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) dan SSK untuk Kabupaten Lombok Utara	Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2020	Bappeda Kabupaten Lombok Utara
2.6.3	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) dan SSK untuk Kabupaten Lombok Barat	Senggigi, Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020	Bappeda Kabupaten Lombok Barat

2.6.4 Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.4	Penyusunan Studi untuk Pembangunan Satu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk Melayani Bagian Selatan Kabupaten Lombok Barat	Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.6.5	Penyusunan Dokumen Sanitasi Strategis Kota (SSK) untuk Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, dan Pantai Pink, Kabupaten Lombok Timur	2 Dokumen	2020	Bappeda Kabupaten Lombok Timur
2.6.6	Penyusunan Dokumen RISPAL dan SSK untuk Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, dan Pantai Pink, Kabupaten Lombok Timur	2 Dokumen	2020	Bappeda Kabupaten Lombok Timur

2.6.7 Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.7	Penyusunan Studi Revitalisasi Sewage Treatment Plant (STP) Jatisela	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.8	Penyusunan Studi Revitalisasi STP Ijobalit	Kabupaten Lombok Timur	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.9	Penyusunan Studi Pengembangan STP baru di Kecamatan Sekotong	Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.10	Penyusunan Rencana Induk Regional Sistem Manajemen Air Limbah	Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur	5 Dokumen	2020-2024	Bappeda Provinsi NTB

2.6.11 Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.11	Konstruksi Jaringan Air Limbah 2 di Gili Trawangan	Sub KTA Gili Tramena, Lombok Utara	1 Paket	2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.12	Pembangunan IPAL Masing-masing di Gili Meno (100 M ³ /hari) dan Gili Air (150 M ³ /hari)	Gili Tramena, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara	2 Paket	2022-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.6.13	Pengembangan Toilet Umum di Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan @ 3 unit	Sub KTA Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara	9 Unit	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.14	Pembangunan IPLT untuk Kabupaten Lombok Utara (9 M ³)	Gili Tramena (Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)	1 Paket	2022	Kementerian PUPR

2.6.15 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.15	Pembangunan Model Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Pengembangan IPAL	Sub KTA Gili Tramena (Kecamatan Tanjung, dan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara)	2 Paket	2020-2021	Kementerian PUPR
2.6.16	Program Pendidikan Sanitasi untuk Masyarakat Lokal antara lain melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	Sub KTA Gili Tramena (Kecamatan Tanjung, dan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara)	1 Paket	2020	Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.17	Kebijakan dan Peraturan dalam Pengelolaan Air Limbah	Sub KTA Gili Tramena, Kabupaten Lombok Utara	1 Paket	2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.18	Studi Rehabilitasi IPLT Jatisela untuk Layanan Bagian Utara Kabupaten Lombok Barat	Sub KTA Senggigi, Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.6.19 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.19	Pembangunan Model SANIMAS Pengembangan IPAL	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	1 Unit	2020	Kementerian PUPR
2.6.20	Program Pendidikan Sanitasi untuk Masyarakat Lokal antara lain melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta CTPS (cuci tangan pakai sabun)	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	1 Paket	2020	Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.21	Dokumen Sanitasi Strategis Kota (SSK) Untuk Kabupaten Lombok Barat	Sub KTA Senggigi, Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020	Bappeda Provinsi NTB
2.6.22	Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Dalam Pengelolaan Air Limbah	Sub KTA Senggigi, Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.6.23 Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.23	Penyediaan <i>Septic Tank</i> Terstandarisasi untuk Memaksimalkan Pengoperasian STP Kebon Kongok	Sub KTA Senggigi (Kecamatan Batulayar, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat)	1.000 Unit	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
2.6.24	Program Penyedotan dan Pemeliharaan <i>Septic Tank</i> yang dibangun, sekali dalam 5 Tahun	Sub KTA Senggigi (Kecamatan Batulayar, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat)	1.000 Kegiatan	2020-2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
2.6.25	Penyediaan Peralatan Pendukung untuk IPLT Pengingat: Truk	Sub KTA Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Timur	3 Paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
2.6.26	Pengembangan Studi untuk Revitalisasi IPLT Ijobalit	Sub KTA Pantai Pink, Kabupaten Lombok Timur	1 Paket	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.6.27 Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.27	Penyediaan Peralatan Pendukung untuk IPLT Pengingat: Truk	Sub KTA Pantai Pink, Kabupaten Lombok Timur	3 Paket	2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
2.6.28	Pembangunan Model SANIMAS Pengembangan IPAL	Sub KTA Praya-Mandalika, (Pujut, Sekotong, Praya Barat), Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru), Sub KTA Rinjani (Sembalun)	5 Unit	2020-2024	Kementerian PUPR
2.6.29	Program Pendidikan Sanitasi: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan lain-lain untuk masyarakat lokal di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	Sub KTA Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, dan Sub KTA Pantai Pink Kabupaten Lombok Timur	2 Paket	2020	Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.6.30 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.30	Pengembangan Kebijakan dan Peraturan dalam Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	Sub KTA Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Sub KTA Pantai Pink Kabupaten Lombok Timur, Sub KTA Mataram	3 Paket	2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.31	Penyediaan <i>Septic Tank</i> Terstandarisasi untuk Memaksimalkan Operasi STP Pengingat (Kabupaten Lombok Tengah) dan STP Ijobalit (Kabupaten Lombok Timur)	Sub KTA Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, dan Sub KTA Pantai Pink Kabupaten Lombok Timur	2.000 Unit	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.32	Program Penyedotan dan Pemeliharaan <i>Septic Tank</i> yang dibangun, sekali dalam 5 Tahun	Sub KTA Praya-Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, dan Sub KTA Pantai Pink Kabupaten Lombok Timur	1.000 Kegiatan	2020-2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.6.33 Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.33	Konstruksi Jaringan Air Limbah Zona 2, 3, 4, dan 5	Kabupaten Lombok Utara	4 Paket	2020-2024	Kementerian PUPR
2.6.34	Penyediaan Truk Pengumpul <i>Septage</i> untuk <ul style="list-style-type: none">• STP Jatisela, Lombok Barat @ 1 unit,• STP Ijobalit, Lombok Timur @ 1 unit,• STP Kebon Kongok, Lombok Barat (Area Layanan Mataram) @ 1 unit,• STP Pengengat, Lombok Tengah @ 3 unit	Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur	6 Unit	2020-2024	Kementerian PUPR

2.6.35 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.35	Pengembangan IPAL Komunal Baru (Berbasis SANIMAS) untuk Senggigi, Tanjung, Pemenang, Cakranegara, Pujut, Sekotong, Praya Barat, Jerowaru dan Sembalun, masing-masing 1 unit	Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur	9 Paket	2020-2024	Kementerian PUPR
2.6.36	Penyediaan <i>Septic Tank</i> Standar di Kabupaten Lombok Tengah untuk Mendukung Pengoperasian STP Pengingat	Kabupaten Lombok Tengah	1.000 Unit	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.37	Penyediaan <i>Septic Tank</i> Standar untuk Mendukung Operasi STP Kebon Kongok	Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	2.000 Unit	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.6.38 Perawatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.6.38	Perawatan Berkala dari <i>Septic Tank</i> yang Dibangun	Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	2.000 Unit	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram
2.6.39	Program Pendidikan Perilaku Hidup Bersih, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur	5 Paket	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.6.40	Pembaruan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) untuk Periode 2022 – 2026	Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur	5 Paket	2020-2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur

2.7 Persampahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7	Persampahan				
2.7.1	Penyusunan Dokumen FS dan DED Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kota Mataram	2 Dokumen	2020,2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram
2.7.2	Penyusunan Dokumen FS dan DED Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Barat	2 Dokumen	2020,2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.3	Penyusunan Dokumen FS dan DED Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Utara	2 Dokumen	2020,2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.7.4 Feasibility . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.4	<i>Feasibility Study</i> (FS) dan DED Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce-Reuse-Recycle</i> (TPS 3R)	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	2 Dokumen	2020-2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.5	Penyusunan FS dan DED Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	2 Dokumen	2020-2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.6	Penyusunan FS dan DED Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Pantai Senggigi (Batu Layar)	2 Dokumen	2020-2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.7 Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.7	Penyusunan Dokumen FS dan DED Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Tengah	2 Dokumen	2020,2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.8	Penyusunan FS dan DED Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Timur	2 Dokumen	2020,2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.9	Penyusunan FS dan DED Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Sekotong (Sekotong)	2 Dokumen	2020-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.7.10	Penyusunan FS dan DED Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Praya - Mandalika (Praya Barat)	2 Dokumen	2021-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

2.7.11 Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.11	Penyusunan FS dan DED Pengembangan TPS 3R	Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	2 Dokumen	2020-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.7.12	Penyusunan FS dan DED Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru)	2 Dokumen	2021-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur
2.7.13	Pemutakhiran Dokumen Masterplan Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kota Mataram	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram
2.7.14	Pemutakhiran Dokumen Masterplan Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.15 Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.15	Pemutakhiran Dokumen Masterplan Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.16	Pemutakhiran Dokumen Masterplan Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Timur	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.17	Pemutakhiran Dokumen Masterplan Sistem Sampah Kabupaten / Kota	Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.18	Studi Pengembangan Sampah Menjadi Energi	Kota Mataram	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

2.7.19 Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.19	Penyusunan DED TPA Baru di Rincung	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.20	Studi Restorasi TPA Penimbunan Terbuka (<i>Open Dumping</i>) di KTA Gili Senggigi	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.21	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	8 Unit	2020-2023	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.22	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	11 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.7.23 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.23	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batu Layar	19 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.24	Pengadaan Kontainer	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	13 Unit	2020-2023	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.25	Pengadaan Kontainer	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	17 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.7.26 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.26	Pengadaan Kontainer	Sub KTA Senggigi (Batu Layar)	32 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.27	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	2 Unit	2021-2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.28	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	2 Unit	2021-2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.7.29 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.29	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Sub KTA Senggigi (Batu Layar)	5 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.30	Pengadaan <i>Arm Roll</i>	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	1 Unit	2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.31	Pengadaan <i>Arm Roll</i>	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	2 Unit	2021,2023	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.7.32 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.32	Pengadaan <i>Arm Roll</i>	Sub KTA ,Senggigi (Batu Layar)	4 Unit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.33	Pengadaan Tongkang	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili)	1 Unit	2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.34	Pengadaan Pembersihan Pantai Mekanis	Sub KTA Senggigi (Batu Layar)	1 Unit	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.7.35	Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Gili Tramena (Pemenang)	2 Paket	2021-2022	Kementerian PUPR

2.7.36 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.36	Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	3 Paket	2021-2023	Kementerian PUPR
2.7.37	Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Senggigi (Batu Layar)	3 Paket	2021-2023	Kementerian PUPR
2.7.38	Perluasan TPA	Sub KTA Senggigi dan Sekotong (TPA Kebon Kongok)	4,98 Ha	2020	Kementerian PUPR
2.7.39	Perluasan TPA	Sub KTA Gili Tramena (TPA Jugil)	2,89 Ha	2024	Kementerian PUPR
2.7.40	Studi Restorasi TPA <i>Open Dumping</i> di Gili Trawangan	Sub KTA Gili Tramena (Gili Trawangan)	1 Dokumen	2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.7.41 Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.41	Penyediaan Tempat Sampah Terpilah dalam Pengembangan Jalur Lalu Lintas Tidak Bermotor (LLTB)	Sub KTA Praya - Mandalika, Pantai Selong Belanak	3 Unit	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.42	Penyediaan Tempat Sampah Terpilah dalam Pengembangan Jalur LLTB	Sub KTA Praya - Mandalika, Pantai Torok	2 Unit	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.43	Penyediaan Tempat Sampah Terpilah dalam Pengembangan Jalur LLTB	Sub KTA Praya - Mandalika, Pantai Mawi	4 Unit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.44	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	Sub KTA Sekotong (Sekotong)	18 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.45 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.45	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	Sub KTA Praya - Mandalika (Praya Barat)	12 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.46	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	Sub KTA Praya - Mandalika, Kecamatan Pujut	24 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.47	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah	Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru)	9 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.48	Pengadaan Kontainer	Sub KTA Sekotong (Sekotong)	27 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.49 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.49	Pengadaan Kontainer	Sub KTA Praya - Mandalika (Praya Barat)	26 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.50	Pengadaan Kontainer	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Pujut	39 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.51	Pengadaan Kontainer	Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru)	19 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.52	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Sub KTA Sekotong (Sekotong)	4 Unit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.53 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.53	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Sub KTA Praya - Mandalika (Praya Barat)	4 Unit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.54	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Pujut	7 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.55	Pengadaan <i>Dump Truck</i>	Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru)	5 Unit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.56	Pengadaan <i>Arm Roll</i>	Sub KTA Sekotong (Sekotong)	3 Unit	2021,2022, 2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.57 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.57	Pengadaan <i>Arm Roll</i>	Sub KTA Praya - Mandalika (Praya Barat)	3 Unit	2021,2022, 2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.58	Pengadaan <i>Arm Roll</i>	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Pujut	4 Unit	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.59	Pengadaan <i>Arm Roll</i>	Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru)	3 Unit	2021,2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.60	Pengadaan Tongkang	Sub KTA Sekotong (Gili Gede)	1 Unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.61 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.61	Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Sekotong (Sekotong)	6 Paket	2021-2024	Kementerian PUPR
2.7.62	Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Praya - Mandalika (Praya Barat)	4 Paket	2022-2024	Kementerian PUPR
2.7.63	Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Pujut	8 Paket	2021-2024	Kementerian PUPR
2.7.64	Pengembangan TPS 3R	Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru)	3 Paket	2022-2024	Kementerian PUPR
2.7.65	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah KTA Mataram	Sub KTA Mataram dan Sub KTA Suranadi	322 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.66 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.66	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Pengumpul Sampah KTA Rinjani	Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat	67 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.67	Pengadaan Kontainer KTA Mataram	Sub KTA Mataram dan Sub KTA Suranadi	253 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.68	Pengadaan Kontainer KTA Rinjani	Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat	44 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur

2.7.69 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.69	Pengadaan Truk Sampah KTA Mataram	Sub KTA Mataram dan Sub KTA Suranadi	28 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.70	Pengadaan Truk Sampah KTA Rinjani	Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat	9 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.71	Pengadaan <i>Arm Roll</i> KTA Mataram	Sub KTA Mataram dan Sub KTA Suranadi	20 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat

2.7.72 Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.72	Pengadaan <i>Arm Roll</i> KTA Rinjani	Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat	7 Unit	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.7.73	Pengembangan TPS 3R KTA Mataram	Sub KTA Mataram dan Sub KTA Suranadi	60 Paket	2020-2024	Kementerian PUPR
2.7.74	Pengembangan TPS 3R KTA Rinjani	Sub KTA Rinjani dan Sub KTA Gili Sulat	24 Paket	2020-2024	Kementerian PUPR
2.7.75	Perluasan / Revitalisasi TPA	Sub KTA Praya – Mandalika, Pengangat	20 Ha	2020-2024	Kementerian PUPR
2.7.76	Perluasan / Revitalisasi TPA	Sub KTA Rinjani, Jugil	7 Ha	2020-2024	Kementerian PUPR

2.7.77 Perluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.77	Perluasan / Revitalisasi TPA	Kabupaten Lombok Timur (Ijobalit)	7 Ha	2020-2024	Kementerian PUPR
2.7.78	Perumusan Kebijakan Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Pulau Kecil	Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.7.79	Perumusan Kebijakan Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Pulau Kecil	Kabupaten Lombok Barat	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.80	Perumusan Kebijakan Tanggung Jawab Produsen yang Diperpanjang	Provinsi NTB	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

2.7.81 Formulasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.81	Formulasi Kebijakan Pariwisata Hijau dan Berkelanjutan	Provinsi NTB	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
2.7.82	Sosialisasi tentang Implementasi Pengelolaan Sampah 3R	Kota Mataram	1 Paket	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram
2.7.83	Sosialisasi tentang Implementasi Pengelolaan Sampah 3R	Kabupaten Lombok Barat	1 Paket	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.7.84	Sosialisasi tentang Implementasi Pengelolaan Sampah 3R	Kabupaten Lombok Tengah	1 Paket	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.7.85	Sosialisasi tentang Implementasi Pengelolaan Sampah 3R	Kabupaten Lombok Timur	1 Paket	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur

2.7.86 Sosialisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.7.86	Sosialisasi tentang Implementasi Pengelolaan Sampah 3R	Kabupaten Lombok Utara	1 Paket	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.8	Drainase				
2.8.1	Perencanaan Teknis - Masterplan Drainase Perkotaan	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.2	Perencanaan Teknis - Masterplan Drainase Perkotaan	Sub KTA Gili Tramena, Sub KTA Senggigi (Kecamatan Batulayar)	2 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat

2.8.3 Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.3	Perencanaan Teknis - Masterplan Drainase Perkotaan 12.954 Ha	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	1 Dokumen	2022-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.4	Perencanaan Teknis - DED Drainase Perkotaan 11.554 Ha	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.5	Perencanaan Teknis - DED Drainase Perkotaan 3.411 Ha	Sub KTA Gili Tramena dan Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar	2 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat
2.8.6	Perencanaan Teknis - DED Drainase Perkotaan 12.954 Ha	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

2.8.7 Pemetaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.7	Pemetaan Terperinci dan Survei Topografi untuk Mengidentifikasi Infrastruktur yang ada, Hotel atau Utilitas Area Publik seluas 11.554 Ha	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.8	Pemetaan Terperinci dan Survei Topografi untuk Mengidentifikasi Infrastruktur yang ada, Hotel atau Utilitas Area Publik seluas 3.411 Ha	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Batulayar	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.9	Pemetaan Terperinci dan Survei Topografi untuk Mengidentifikasi Infrastruktur yang ada, Hotel atau Utilitas Area Publik seluas 348 Ha	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	1 Dokumen	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

2.8.10 Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.10	Perencanaan Teknis - Masterplan Drainase Perkotaan sepanjang 52.938 Meter	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.8.11	Perencanaan Teknis - Masterplan Drainase Perkotaan sepanjang 15.275 Meter	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Praya Barat	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.12	Perencanaan Teknis - Masterplan Drainase Perkotaan sepanjang 26.322 Meter	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Pujut	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.13	Perencanaan Teknis - Masterplan Drainase Perkotaan sepanjang 14.278 Meter	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.8.14 Persiapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.14	Persiapan Drainase Perkotaan DED sepanjang 52.938 Meter	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	1 Dokumen	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.8.15	Persiapan Drainase Perkotaan DED sepanjang 15.275 Meter	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Praya Barat	1 Dokumen	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.16	Persiapan Drainase Perkotaan DED sepanjang 26.322 Meter	Sub KTA Praya – Mandalika, Kecamatan Pujut	1 Dokumen	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.17	Persiapan Drainase Perkotaan DED sepanjang 14.278 Meter	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	1 Dokumen	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.8.18 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.18	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	1.660 Meter	2021-2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.19	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	2.190 Meter	2021-2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.20	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Sub KTA Sengigi, Kecamatan Batulayar	2.940 Meter	2022-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.8.21	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	0,2 Ha	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

2.8.22 Penyiapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.22	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	0,2 Ha	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.23	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Sub KTA Sengigi, Kecamatan Batulayar	0,3 Ha	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.8.24	Pengembangan Sumur Infiltrasi	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	50 Unit	2021-2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.8.25	Konstruksi Bangunan Pengendali Kerusakan Air di Wilayah Muara dan Pesisir	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	60 Unit	2021-2022	Kementerian PUPR

2.8.26 Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.26	Konstruksi Bangunan Pengendali Kerusakan Air di Wilayah Muara dan Pesisir	Sub KTA Sengigi, Kecamatan Batulayar	260 Unit	2023-2024	Kementerian PUPR
2.8.27	Konstruksi Bangunan Pengendali Kerusakan Air di Wilayah Muara dan Pesisir	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	9,6 Ha	2021-2022	Kementerian PUPR
2.8.28	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Pemasangan Rak Sampah	Sub KTA Gili Tramena, Gili Meno	5 Ha	2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.8.29 Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.29	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Pemasangan Rak Sampah	Sub KTA Gili Tramena, Gili Air	4 Ha	2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.8.30	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Pemasangan Rak Sampah	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	2 Unit	2022	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.8.31	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco Hidrologi)	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Tanjung	2 Unit	2021	Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Utara

2.8.32 Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.32	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco Hidrologi)	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar	3 Unit	2021	Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Barat
2.8.33	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco Hidrologi)	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	1 Unit	2023	Dinas Pertamanan Kabupaten Lombok Utara
2.8.34	Perencanaan Penjangkauan dan Perencanaan Drainase dan Konstruksi	Sub KTA Gili Tramena, Gili Air	185 Ha	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.35	Perencanaan Penjangkauan dan Perencanaan Drainase dan Konstruksi	Sub KTA Gili Tramena, Gili Meno	180 Ha	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

2.8.36 Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.36	Perencanaan Penjangkauan dan Perencanaan Drainase dan Konstruksi	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	348 Ha	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.8.37	Sosialisasi Program Saluran Bebas dari Banjir karena Sampah yang dibuang Langsung ke Sungai dan Saluran Primer	Sub KTA Gili Tramena, Gili Meno	14 Paket	2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.8.38	Sosialisasi Program Saluran Bebas dari Banjir karena Sampah yang dibuang Langsung ke Sungai dan Saluran Primer	Sub KTA Gili Tramena, Gili Air	18 Paket	2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara
2.8.39	Sosialisasi Program Saluran Bebas dari Banjir karena Sampah yang dibuang Langsung ke Sungai dan Saluran Primer	Sub KTA Gili Tramena, Kecamatan Pemenang	1 Paket	2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara

2.8.40 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.40	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	3.450 Meter	2022-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.8.41	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Praya Barat	3.480 Meter	2022-2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.42	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Pujut	4.800 Meter	2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.43	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	2.750 Meter	2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.8.44 Penyiapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.44	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	0,35 Ha	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.8.45	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Praya Barat	0,35 Ha	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.46	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Pujut	0,5 Ha	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.47	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	0,3 Ha	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.8.48 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.48	Pengembangan Sumur Infiltrasi	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batulayar	200 Unit	2021-2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.8.49	Pengembangan Sumur Infiltrasi	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Praya Barat	120 Unit	2021-2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah
2.8.50	Pengembangan Sumur Infiltrasi	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Pujut	150 Unit	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah
2.8.51	Pengembangan Sumur Infiltrasi	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	90 Unit	2023-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur

2.8.52 Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.52	Konstruksi Bangunan Pengendali Kerusakan Air di Wilayah Muara dan Pesisir	Sub KTA Sekotong, Belongas	4 Ha	2024	Kementerian PUPR
2.8.53	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Pemasangan Rak Sampah	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	4 Unit	2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.8.54	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Pemasangan Rak Sampah	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Praya Barat	4 Unit	2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

2.8.55 Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.55	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Pemasangan Rak Sampah	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Pujut	5 Unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.8.56	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung - Pemasangan Rak Sampah	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	3 Unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur
2.8.57	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco Hidrologi)	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	3 Lokasi	2023	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Lombok Barat

2.8.58 Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.58	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco Hidrologi)	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Praya Barat	2 Lokasi	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.59	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco Hidrologi)	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Pujut	2 Lokasi	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.60	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Alokasi Penyimpanan Air Hujan (Konsep Eco Hidrologi)	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	1 Lokasi	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.8.61 Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.61	Perencanaan Penjangkauan dan Perencanaan Drainase dan Konstruksi	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Praya Barat	2 Paket	2021,2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.62	Perencanaan Penjangkauan dan Perencanaan Drainase dan Konstruksi	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Pujut	2 Paket	2021,2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.63	Perencanaan Penjangkauan dan Perencanaan Drainase dan Konstruksi	Sub KTA Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru	2 Paket	2021,2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur
2.8.64	Perencanaan Penjangkauan dan Perencanaan Drainase dan Konstruksi	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	18 Paket	2021,2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.8.65 Sosialisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.65	Sosialisasi Program Saluran Bebas dari Banjir karena Sampah yang dibuang Langsung ke Sungai dan Saluran Primer	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Praya Barat	20 Paket	2021,2023	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah
2.8.66	Sosialisasi Program Saluran Bebas dari Banjir karena Sampah yang dibuang Langsung ke Sungai dan Saluran Primer	Sub KTA Praya-Mandalika, Kecamatan Pujut	32 Paket	2021,2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.8.67	Sosialisasi Program Saluran Bebas dari Banjir karena Sampah yang dibuang Langsung ke Sungai dan Saluran Primer	Sub KTA Sekotong, Kecamatan Sekotong	2 Paket	2021,2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.8.68 Merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.68	Merencanakan, Merancang, Mengoperasikan, dan Memelihara Infrastruktur Saluran Jalan. (Berdasarkan <i>Project Appraisal Document</i> Bank Dunia)	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	508.290 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR
2.8.69	Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan di Daerah- Daerah yang Berpotensi Banjir	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	84 Ha	2020-2024	Kementerian PUPR
2.8.70	Pengembangan Sistem Drainase Terintegrasi di Area Terbangun - Saluran Drainase Lingkungan	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	3.475.051 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR

2.8.71 Pemeliharaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.71	Pemeliharaan dan Perbaikan untuk Meningkatkan Layanan Kapasitas Saluran (Dilakukan pada Infrastruktur yang ada)	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	32.270 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR
2.8.72	Penyiapan Lahan untuk Pengembangan Infrastruktur Drainase Baru	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	136,52 Ha	2020-2024	Kementerian PUPR
2.8.73	Perbaikan dan Pemeliharaan DAS yang sudah dinormalisasi, perbaikan Wilayah Perbatasan Sungai	Seluruh DAS Pulau Lombok	370.721 Meter	2020-2024	Kementerian PUPR

2.8.74 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.74	Pengembangan Sumur Infiltrasi	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	21.000 Lokasi	2020-2024	Kementerian PUPR
2.8.75	Program Pengurangan Pembuangan Sampah ke Saluran Drainase dengan Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung (Mengacu pada Perhitungan Limbah Padat)	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	1.520 Unit	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara

2.8.76 Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.8.76	Perencanaan Teknis - Drainase Perkotaan DED (Potensi Banjir) seluas 104.100 Ha	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	1 Dokumen	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara
2.8.77	Sosialisasi dan Kampanye untuk Perencanaan dan Konstruksi Drainase	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara	2.840 Paket	2020-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara

2.9 Penerbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.9	Penerbangan dan Bandar Udara				
2.9.1	Ekstensi <i>Runway</i> I	Sub KTA Praya - Mandalika (Bandara Internasional Lombok)	33.750 M2	2020-2024	PT Angkasa Pura I (Persero)
2.9.2	Ekstensi <i>Runway Strip</i> I	Sub KTA Praya - Mandalika (Bandara Internasional Lombok)	189.000 M2	2020-2024	PT Angkasa Pura I (Persero)
2.9.3	Pengembangan <i>Runway End Safety Area (RESA I)</i>	Sub KTA Praya - Mandalika (Bandara Internasional Lombok)	8.100 M2	2020-2024	PT Angkasa Pura I (Persero)
2.9.4	Perluasan Apron I	Sub KTA Praya - Mandalika (Bandara Internasional Lombok)	104.987 M2	2020-2024	PT Angkasa Pura I (Persero)
2.9.5	Perluasan Terminal Penumpang Domestik I	Sub KTA Praya - Mandalika (Bandara Internasional Lombok)	78.604 M2	2020-2024	PT Angkasa Pura I (Persero)

2.9.6. Perluasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.9.6	Perluasan Terminal Penumpang Internasional I	Sub KTA Praya - Mandalika (Bandara Internasional Lombok)	21.499 M2	2020-2024	PT Angkasa Pura I (Persero)
2.9.7	Perluasan Terminal Kargo I	Sub KTA Praya - Mandalika (Bandara Internasional Lombok)	3.800 M2	2020-2024	PT Angkasa Pura I (Persero)
2.10	Penataan Kawasan				
2.10.1	Pengembangan Pelabuhan, Fasilitas Loket	Sub KTA Gili Tramena, Pelabuhan Bangsal	3 Paket	2021	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara

2.10.2. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.2	Pembangunan Terminal Bus Terintegrasi Kapasitas 10 Bus	Sub KTA Gili Tramena, Pelabuhan Bangsal	1 Paket	2021	Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.10.3	Pembangunan <i>Great Street</i>	Sub KTA Gili Tramena, Pelabuhan Bangsal	5 Lokasi	2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Investasi Swasta

2.10.4 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.4	Pembangunan Gerbang Pintu Masuk	Sub KTA Gili Tramena, Pelabuhan Bangsal	2 Lokasi	2021	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.10.5	Pengembangan Jalur Publik Sepanjang Jalan Utama Jalur Pejalan Kaki dan Jalur sepeda	Sub KTA Gili Tramena, Pelabuhan Bangsal	1 Paket	2021-2022	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.10.6	Pengembangan Muka Bangunan (<i>Frontage</i>) Sepanjang Jalan Utama Kawasan Wisata	Sub KTA Gili Tramena, Pelabuhan Bangsal	1 Paket	2021-2023	Kementerian PUPR

2.10.7 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.7	Pengembangan Konservasi Penyu	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	1 Paket	2021-2024	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
2.10.8	Monitoring Terumbu Karang di Perairan di Wilayah Indonesia	Pulau Lombok	1 Lokasi	2021-2022	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2.10.9	Pembangunan Konservasi dan Restorasi Terumbu Karang	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	1 Paket	2021-2024	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara

2.10.10 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.10	Pengembangan Fasilitas Daur Ulang Sampah	Sub KTA Gili Tramena, Gili Trawangan	1 Paket	2021-2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara
2.10.11	Pengembangan Konservasi Burung	Sub KTA Gili Tramena, Gili Meno	1 Paket	2021	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Kabupaten Lombok Utara, Investasi Swasta
2.10.12	Pengembangan Konservasi Mangrove	Sub KTA Gili Tramena, Gili Meno	1 Lokasi	2021-2024	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Investasi Swasta

2.10.13 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.13	Pembangunan <i>Wellness Center</i>	Sub KTA Gili Tramena, Gili Meno	1 Lokasi	2024	Investasi Swasta
2.10.14	Pembangunan Gardu Pandang	Sub KTA Gili Tramena, Gili Air	1 Lokasi	2023	Investasi Swasta
2.10.15	Pembangunan Plaza Tepi Pantai	Sub KTA Gili Tramena, Gili Air	1 Lokasi	2022	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Investasi Swasta
2.10.16	Pembangunan Fasilitas Permainan dan Olahraga Air seperti <i>Snorkeling, Diving, Banana Boat, Parasailing, dan Surfing</i>	Sub KTA Gili Tramena, Gili Air	1 Lokasi	2021-2023	Investasi Swasta

2.10.17 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.17	Pengembangan Marina	Sub KTA Gili Tramena, Tanjung-Medana	2 Paket	2021	Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, Investasi Swasta
2.10.18	Pembangunan <i>Club House</i>	Sub KTA Gili Tramena, Tanjung-Medana	3 Lokasi	2024	Investasi Swasta
2.10.19	Pembangunan Taman Tepi Pantai	Sub KTA Gili Tramena, Tanjung-Medana	1 Paket	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, Investasi Swasta

2.10.20 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.20	Pengembangan Pusat Kesenian Lokal	Sub KTA Senggigi	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.21	Pembangunan Pameran Seni Lokal	Sub KTA Senggigi	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta

2.10.22 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.22	Pengembangan Dermaga	Sub KTA Senggigi	1 Paket	2022	Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.23	Pembangunan Gerbang Pintu Masuk	Sub KTA Senggigi	2 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.24	Pengembangan Jalur Publik Sepanjang Jalan Utama Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda	Sub KTA Senggigi	1 Paket	2021-2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.25 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.25	Pengembangan Muka Bangunan (<i>Frontage</i>) Sepanjang Jalan Utama Kawasan Wisata	Sub KTA Senggigi	1 Paket	2022-2024	Kementerian PUPR
2.10.26	Pembangunan Hotel	Sub KTA Senggigi	1.351 Kamar (9 Hotel)	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.27	Pembangunan <i>Homestay</i> dan Akomodasi <i>Non-Star Rated</i>	Sub KTA Senggigi	901 Kamar (45 <i>Homestay</i>)	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.28	Pembangunan Pusat Kuliner	Sub KTA Senggigi, Bukit Malimbu	1 Paket	2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.29 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.29	Pembangunan Fasilitas Olahraga Paralayang	Sub KTA Senggigi, Bukit Malimbu	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.30	Pembangunan Gardu Pandang	Sub KTA Senggigi, Bukit Malimbu	3 Lokasi	2022-2023	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.31 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.31	Pembangunan Jalur <i>Trekking</i> Pinggir Laut Sepanjang Pantai Menghubungkan Ketiga Gardu Pandang	Sub KTA Senggigi, Bukit Malimbu	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.32	Pembangunan Hotel	Sub KTA Senggigi, Bukit Malimbu	1.351 kamar (9 Hotel)	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.33	Pembangunan <i>Homestay</i> dan Akomodasi <i>Non-Star Rated</i>	Sub KTA Senggigi, Bukit Malimbu	901 Kamar (45 <i>Homestay</i>)	2021-2024	Investasi Swasta

2.10.34 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.34	Pengembangan Agrowisata Gula Aren	Sub KTA Senggigi, Desa Pusuk	1 Lokasi	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.35	Pembangunan Zona Interaksi Satwa Liar	Sub KTA Senggigi, Desa Pusuk	1 Paket	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.36 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.36	Pengembangan Gardu Pandang	Sub KTA Senggigi, Desa Pusuk	1 Paket	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.37	Pengembangan Jalur <i>Trekking</i> Hutan	Sub KTA Senggigi, Desa Pusuk	1 Paket	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
2.10.38	Pembangunan Alun-alun Kota	Sub KTA Mataram, Ampenan-Selaparang	1 Paket	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram

2.10.39 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.39	Pembangunan Pameran Seni Lokal	Sub KTA Senggigi dan Sub KTA Mataram, Ampenan Selaparang	3 Paket	2023	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Investasi Swasta
2.10.40	Pengembangan Jalur Pejalan Kaki Sepanjang Jalan Utama	Sub KTA Mataram, Ampenan Selaparang	1 Paket	2023	Kementerian PUPR
2.10.41	Pembangunan Hotel	Sub KTA Mataram, Ampenan Selaparang	1.351 Kamar (9 Hotel)	2020-2024	Investasi Swasta
2.10.42	Pembangunan <i>Homestay</i> dan Akomodasi <i>Non-Star Rated</i>	Sub KTA Mataram, Ampenan Selaparang	901 Kamar (45 <i>Homestay</i>)	2020-2024	Investasi Swasta

2.10.43 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.43	Pembangunan Dermaga Wisata	Sub KTA Mataram, Kota Tua Ampenan	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Perhubungan Kota Mataram, Investasi Swasta
2.10.44	Pembangunan Museum Kota Tua	Sub KTA Mataram, Kota Tua Ampenan	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram
2.10.45	Pengembangan Pusat Kuliner	Sub KTA Mataram, Kota Tua Ampenan	1 Paket	2021	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Dinas Pariwisata Kota Mataram

2.10.46 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.46	Pengembangan Pelabuhan Kapasitas 20 Kapal Kecil	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2021-2024	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.47	Pembangunan Gardu Pandang	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.48	Pembangunan <i>Wellness Center</i>	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Lokasi	2022	Investasi Swasta

2.10.49 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.49	Pengembangan Konservasi dan Restorasi Terumbu Karang	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2021-2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.50	Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Ikan	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2020-2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta

2.10.51 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.51	Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Mangrove	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.52	Pembangunan Jalur Publik di Sepanjang Pesisir Pantai Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.53 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.53	Pembangunan Hotel <i>Resort</i> dan Hotel Komersial	Sub KTA Sekotong, Gili Gede dan Gili Nada	378 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.54	Pengembangan <i>Homestay</i> dan Akomodasi <i>Non-Star Rated</i>	Sub KTA Sekotong, Gili Gede dan Gili Nada	252 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.55	Pembangunan Gerbang Pintu Masuk	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.56	Pengembangan Muka Bangunan (<i>Frontage</i>) Sepanjang Jalan Utama Kawasan Wisata	Sub KTA Sekotong, Gili Gede	1 Paket	2022-2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.57 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.57	Pembangunan Konservasi dan Restorasi Terumbu Karang	Sub KTA Sekotong, Gita Nada	1 Paket	2020-2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
2.10.58	Pembangunan Jalur Publik Sepanjang Pesisir Pantai	Sub KTA Sekotong, Gita Nada	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.59	Pembangunan <i>Waterfront</i> Kapasitas 20 Kios	Sub KTA Sekotong, Gita Nada	1 Lokasi	2022	Investasi Swasta
2.10.60	Pengembangan Pelabuhan Kapasitas 20 Kapal Kecil	Sub KTA Sekotong, Gita Nada	1 Paket	2022	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.61 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.61	Pengembangan Pusat Kuliner	Sub KTA Sekotong, Gita Nada	1 Paket	2022	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.62	Pengembangan <i>Camping Ground</i>	Sub KTA Sekotong, Gita Nada	10 Lokasi	2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

2.10.63 Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.63	Penyelenggaraan Acara Internasional	Sub KTA Sekotong, Mekaki	4 Kegiatan	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.64	Pembangunan Jalur Pinggir Pantai (<i>Promenade</i>) Sepanjang Pesisir Pantai	Sub KTA Sekotong, Mekaki	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.65	Pembangunan Gardu Pandang	Sub KTA Sekotong, Mekaki	2 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
2.10.66	Pembangunan Hotel <i>Resort</i> dan Hotel Komersial	Sub KTA Sekotong, Mekaki	144 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta

2.10.67 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.67	Pengembangan <i>Homestay</i> dan Akomodasi <i>Non-Star Rated</i>	Sub KTA Sekotong, Mekaki	36 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.68	Pengembangan Fasilitas Menyelam	Sub KTA Sekotong, Belongas	3 Paket	2021-2024	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.69	Pembangunan Toko Souvenir	Sub KTA Sekotong, Belongas	1 Lokasi	2022	Investasi Swasta
2.10.70	Pembangunan Loka Karya Produk Lokal	Sub KTA Sekotong, Belongas	2 Lokasi	2023	Investasi Swasta

2.10.71 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.71	Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Mangrove	Sub KTA Sekotong, Belongas	1 Paket	2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta
2.10.72	Pengembangan Pusat Kuliner	Sub KTA Sekotong, Belongas	1 Paket	2022	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

2.10.73 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.73	Pembangunan Kampung Nelayan	Sub KTA Sekotong dan Sub KTA Praya - Mandalika	4 Lokasi	2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Investasi Swasta

2.10.74 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.74	Pembangunan Fasilitas Olahraga Paralayang	Sub KTA Sekotong dan Sub KTA Praya - Mandalika	5 Lokasi	2021	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Investasi Swasta

2.10.75 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.75	Pembangunan Hotel <i>Resort</i> dan Hotel Komersial	Sub KTA Praya – Mandalika, Mandalika	3.098 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.76	Pembangunan Gerbang Pintu Masuk	Sub KTA Praya – Mandalika, Mandalika	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.10.77	Pengembangan Jalur Publik Sepanjang Jalan Utama Jalur Pejalan Kaki dan jalur sepeda	Sub KTA Praya – Mandalika, Mandalika	1 Paket	2021-2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

2.10.78 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.78	Pengembangan Muka Bangunan (<i>Frontage</i>) Sepanjang Jalan Utama Kawasan Wisata	Sub KTA Praya – Mandalika, Mandalika	1 Paket	2022	Kementerian PUPR, Kemenparekraf/ Baparekraf
2.10.79	Pengembangan Kampung Nelayan	Sub KTA Praya – Mandalika, Selong Belanak	1 Paket	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
2.10.80	Pembangunan Fasilitas Permainan dan Olahraga Air	Sub KTA Praya – Mandalika, Selong Belanak	1 Lokasi	2021-2024	Investasi Swasta

2.10.81 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.81	Pengembangan Jalur Kerbau	Sub KTA Praya – Mandalika, Selong Belanak	2 Paket	2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
2.10.82	Pembangunan Hotel <i>Resort</i> dan Hotel Komersial	Sub KTA Praya – Mandalika, Selong Belanak	648 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.83	Pengembangan Homestay dan Akomodasi <i>Non-Star Rated</i>	Sub KTA Praya – Mandalika, Selong Belanak	432 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.84	Pengembangan Koridor Wisata Tradisional Sepanjang Jalan Utama yang Menghubungi Desa Sade dan Ende	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Sade dan Ende	1 Paket	2022	Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementerian PUPR

2.10.85 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.85	Pengembangan Seni Pertunjukan	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Sade dan Ende	2 Paket	2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
2.10.86	Pengembangan Pusat Kesenian Lokal	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Sade dan Ende	4 Lokasi	2023	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
2.10.87	Pengembangan Muka Bangunan (<i>Frontage</i>) Sepanjang Jalan Utama Kawasan Wisata	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Sade dan Ende	1 Paket	2022-2024	Kementerian PUPR

2.10.88 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.88	Pembangunan Hotel <i>Resort</i> dan Hotel Komersial (Pujut dan sekitarnya)	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Sade dan Ende, Mawun, dan Teluk Awang	530 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.89	Pengembangan Homestay dan Akomodasi <i>Non-Star Rated</i> (Pujut dan sekitarnya)	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Sade dan Ende, Mawun, dan Teluk Awang	1.236 Kamar	2021-2024	Investasi Swasta
2.10.90	Pembangunan Pusat Kuliner	Sub KTA Praya – Mandalika, Mawun	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
2.10.91	Pembangunan Fasilitas Kegiatan Pantai	Sub KTA Praya – Mandalika, Mawun	3 Paket	2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

2.10.92 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.92	Pembangunan Fasilitas Olahraga Paralayang	Sub KTA Praya – Mandalika, Mawun	3 Lokasi	2023 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas UKM dan Koperasi Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, dan Investasi Swasta
2.10.93	Pengembangan Jalur Publik	Sub KTA Praya – Mandalika, Mawun	6 Kilometer	2021	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

2.10.94 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.94	Pengembangan Pasar Ikan	Sub KTA Praya – Mandalika, Teluk Awang	1 Paket	2022	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Kementerian Perdagangan
2.10.95	Pengembangan Pelabuhan Kapasitas 50 Kapal	Sub KTA Praya – Mandalika, Teluk Awang	1 Paket	2022	Kementerian Perhubungan
2.10.96	Pembangunan Pusat Kuliner	Sub KTA Praya – Mandalika, Teluk Awang	2 Paket	2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

2.10.97 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.97	Pembangunan Pusat Pemancingan	Sub KTA Praya – Mandalika, Teluk Awang	20 Lokasi	2023	Investasi Swasta
2.10.98	Pembangunan Pusat Kuliner	Sub KTA Pantai Pink	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
2.10.99	Pembangunan Jalur <i>Trekking</i> Pinggir Laut yang Menghubungkan Destinasi-Destinas Wisata	Sub KTA Pantai Pink	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.10.100 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.100	Pembangunan Pusat Informasi dan Kegiatan	Sub KTA Pantai Pink	2 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur
2.10.101	Pembangunan Fasilitas Permainan dan Olahraga Air	Sub KTA Pantai Pink	1 Lokasi	2023 - 2024	Investasi Swasta
2.10.102	Pembangunan Gerbang Pintu Masuk	Sub KTA Pantai Pink	1 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

2.10.103 Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.10.103	Pengembangan Jalur Publik	Sub KTA Pantai Pink, Pantai Surga	6 Kilometer	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur
2.10.104	Pembangunan Pusat Biro Perjalanan Wisata	Sub KTA Pantai Pink, Pantai Surga	1 Lokasi	2022	Investasi Swasta
2.10.105	Pembangunan Pusat Informasi dan Kegiatan Pariwisata	Sub KTA Pantai Pink, Pantai Surga	2 Paket	2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur

2.11 Fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.11	Fasilitas Pendukung				
2.11.1	Pengembangan Dermaga Wisata	Sub KTA Pantai Senggigi	2 Lokasi	2021-2022, 2024	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2.11.2	Pengembangan Dermaga Wisata	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Gita Nada) dan Sub KTA Praya-Mandalika (Teluk Awang)	3 Paket	2021 - 2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
2.11.3	Pengembangan Jalur Kerbau	Sub KTA Praya-Mandalika, Selong Belanak	1 Paket	2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
2.11.4	Dukungan Fasilitas Mitigasi Bencana untuk <i>Observation Tower</i>	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili) dan Sub KTA Senggigi, Malimbu (Desa Pusuk)	5 Unit	2021 - 2024	Kementerian PUPR

2.11.5 Dukungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.11.5	Dukungan Renovasi Masjid Tahan Bencana	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili) dan Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Bangsal, Pantai Senggigi)	2 Lokasi	2021 - 2022	Kementerian PUPR
2.11.6	Penyediaan Fasilitas <i>Viewpoint</i> sebagai Titik Evakuasi dan <i>Meeting Point</i>	Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Bangsal, Pantai Senggigi)	2 Unit	2022 - 2023	Kementerian PUPR
2.11.7	Perencanaan dan Pembangunan Jalur Evakuasi	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili), Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Bangsal, Tanjung-Medana, Pantai Senggigi, Malimbu, Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang, Kota Tua Ampenan)	8 Jalur	2020 - 2021	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2.11.8 Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.11.8	Peningkatan Kualitas Konstruksi Sekolah dan Rumah Sakit	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili) dan Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Bangsal, Pantai Senggigi)	2 Paket	2022 - 2024	Kementerian PUPR
2.11.9	Dukungan Renovasi Masjid Tahan Bencana	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya - Mandalika, Sub KTA Pantai Pink	3 Lokasi	2021 - 2022	Kementerian PUPR
2.11.10	Penyediaan Fasilitas <i>Viewpoint</i> sebagai Titik Evakuasi dan <i>Meeting Point</i>	Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya - Mandalika, Mandalika, Mekaki	2 Paket	2022 - 2023	Kementerian PUPR
2.11.11	Perencanaan dan Pembangunan Jalur Evakuasi	Sub KTA Sekotong (Gita Nada, Gili Gede, Mekaki, Belongas), Sub KTA Praya - Mandalika (Mandalika,	12 Jalur	2020 - 2021	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Selong . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
		Selong Belanak, Mawun, Desa Sade dan Ende, Teluk Awang), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga, Pantai Pink, Pelabuhan Tanjung Luar)			
2.11.12	Peningkatan Kualitas Konstruksi Sekolah dan Rumah Sakit	Sub KTA Sekotong (Gita Nada, Gili Gede, Mekaki, Belongas), Sub KTA Praya – Mandalika (Mandalika, Selong Belanak, Mawun, Desa Sade dan Ende, Teluk Awang), Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga, Pantai Pink, Pelabuhan Tanjung Luar)	12 Paket	2022 - 2024	Kementerian PUPR

2.11.13 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.11.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Geopark Rinjani	Sub KTA Rinjani	1 Paket	2021	Kementerian ESDM
2.11.14	Pembangunan Pusat Edukasi Pengembangan Komunitas Geopark Rinjani-Lombok	Sub KTA Rinjani, Kecamatan Sembalun (Desa Sajang)	1 Paket	2021	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
2.11.15	Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas	Pusat	50 Layanan	2022	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2.11.16	Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan	Pusat	1 Layanan	2022	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2.11.17	Layanan Informasi Meteorologi Publik yang Berkualitas	Pusat	1 Layanan	2022	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2.11.18	Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang Berkualitas	Pusat	1 Layanan	2022	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

2.12 Perumahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.12	Perumahan dan Permukiman				
2.12.1	Pembangunan Rumah untuk Tenaga Kerja Pariwisata di Lokasi Inti (Rumah Tipe 36)	Sub KTA Gili Tramena (Tanjung-Medana, Pemenang), Sub KTA Senggigi (Senggigi-Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang)	30 Unit	2022 - 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.12.2	Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Sekitar Kawasan Wisata dengan Kapasitas 200 Unit Rumah dengan Luas Rusun 1 Ha	Sub KTA Gili Tramena (Tanjung-Medana, Pemenang) dan Sub KTA Senggigi	1 Unit	2023 - 2024	Kementerian PUPR

2.12.3 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.12.3	Pembangunan Rumah Toko (Ruko) dengan Luas 75 M ² di lokasi inti.	Sub KTA Gili Tramena, (Tanjung-Medana, Pemenang), Sub KTA Senggigi (Senggigi-Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang)	20 Unit	2021 - 2022	Investasi Swasta
2.12.4	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Pulau Lombok di setiap Sub KTA	Sub KTA Gili Tramena, (Tanjung-Medana, Pemenang), Sub KTA Senggigi (Senggigi-Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang)	300 Unit	2021 - 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.12.5 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.12.5	Pembangunan Rumah Swadaya di setiap Sub KTA	Sub KTA Gili Tramena, (Tanjung-Medana, Pemenang), Sub KTA Senggigi (Senggigi-Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang)	100 Unit	2021 - 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.12.6	Pembangunan Rumah Swadaya Pariwisata	Sub KTA Gili Tramena, (Tanjung-Medana, Pemenang), Sub KTA Senggigi (Senggigi-Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang)	2.308 Unit	2021 - 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.12.7 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.12.7	Pembangunan Rumah untuk Tenaga Kerja Pariwisata di tiap Lokasi Inti (Rumah Tipe 36)	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Gita Nada, Sekitar Pelabuhan Tembowong, Antara Gili Gede-Gili Nanggu), Sub KTA Praya - Mandalika (Sekitar Mandalika), dan Sub KTA Pantai Pink	30 Unit	2022 - 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.12.8	Pembangunan Rumah Susun (Rusun) di Sekitar Kawasan Wisata dengan Kapasitas 200 Unit Rumah dengan Luas Rusun 1 Ha	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Antara Gili Gede-Gili Nanggu) dan Sub KTA Praya - Mandalika (Sekitar Mandalika)	1 Unit	2023 - 2024	Kementerian PUPR

2.12.9 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.12.9	Pembangunan Rumah Toko (Ruko) dengan Luas 75 M ² di setiap Lokasi Inti	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Gita Nada, Sekitar Pelabuhan Tembowong, Antara Gili Gede-Gili Nanggu), Sub KTA Praya – Mandalika (Sekitar Mandalika), dan Sub KTA Pantai Pink	20 Unit	2021 - 2023	Investasi Swasta
2.12.10	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Pulau Lombok di setiap Sub KTA	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Gita Nada, Sekitar Pelabuhan Tembowong, Antara Gili Gede-Gili Nanggu), Sub KTA Praya – Mandalika (Sekitar Mandalika), dan Sub KTA Pantai Pink	300 Unit	2021 - 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.12.11 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.12.11	Pembangunan Rumah Swadaya di setiap Sub KTA	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Gita Nada, Sekitar Pelabuhan Tembowong, Antara Gili Gede-Gili Nanggu), Sub KTA Praya – Mandalika (Sekitar Mandalika), dan Sub KTA Pantai Pink	100 Unit	2021 - 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.12.12	Pembangunan Rumah Swadaya Pariwisata	Sub KTA Praya – Mandalika (Sekitar Mandalika)	2.308 Unit	2021 - 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.13	Sarana dan Prasarana Permukiman				
2.13.1	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili, Tanjung-Medana)	4 Unit	2021	Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi NTB

2.13.2 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.13.2	Pembangunan Kantor Pos Pembantu	Sub KTA Senggigi, Kecamatan Batu Layar	1 Unit	2023 - 2024	Kantor Pos Indonesia
2.13.3	Pembangunan Puskesmas atau Klinik	Sub KTA Gili Trameña (Gili Meno dan Gili Air)	2 Unit	2021	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
2.13.4	Pembangunan Masjid utama di setiap pusat Sub KTA	Sub KTA Gili Trameña (Tiga Gili, Pelabuhan Bangsal), Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi)	2 Unit	2020 - 2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.13.5	Pembangunan Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan	Sub KTA Gili Trameña (Tiga Gili)	5 Unit	2021 - 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Investasi Swasta
2.13.6	Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Niaga	Sub KTA Senggigi, Pusat Kawasan Pantai Senggigi	1 Unit	2021 - 2022	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Investasi Swasta

2.13.7 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.13.7	Pembangunan Gedung Serbaguna	Sub KTA Senggigi, Pusat Kawasan Pantai Senggigi	1 Unit	2022 - 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.13.8	Pembangunan Gedung Bioskop	Sub KTA Senggigi, Pusat Kawasan Pantai Senggigi	1 Unit	2022 - 2024	Investasi Swasta
2.13.9	Pembangunan Taman dan Lapangan Olahraga	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili) dan Sub KTA Senggigi (Pantai Senggigi, Tanjung-Medana, Gili Air)	3 Unit	2023 - 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.13.10	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	Sub KTA Praya - Mandalika (Praya Barat), Sub KTA Sekotong (Sekotong), dan Sub KTA Pantai Pink (Pujut, Jerowaru)	4 Unit	2021	Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi NTB

2.13.11 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.13.11	Pembangunan Kantor Pos Pembantu	Sub KTA Sekotong, Sekotong	1 Unit	2024	Kantor Pos Indonesia
2.13.12	Pembangunan Puskesmas Pembantu atau Klinik	Sub KTA Praya - Mandalika, dan Sub KTA Pantai Pink (Pujut, Jerowaru)	2 Unit	2022	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
2.13.13	Pembangunan Apotek/Toko Obat	Sub KTA Pantai Pink, Jerowaru	1 Unit	2022	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
2.13.14	Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Konstruksi Masjid	Sub KTA Praya - Mandalika (Mandalika), Sub KTA Sekotong (Gili Gede), dan Sub KTA Pantai Pink (Pantai Pink)	3 Unit	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2.13.15 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.13.15	Pembangunan Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan	Sub KTA Praya – Mandalika (Mandalika) dan Sub KTA Pantai Pink (Jerowaru)	2 Unit	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.13.16	Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Niaga	Sub KTA Praya – Mandalika (Praya Barat), Sub KTA Sekotong (Sekotong), dan Sub KTA Pantai Pink (Pujut, Jerowaru)	4 Unit	2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Investasi Swasta
2.13.17	Pembangunan Gedung Serbaguna	Sub KTA Praya – Mandalika (Praya Barat), Sub KTA Sekotong (Sekotong), dan Sub KTA Pantai Pink (Pujut, Jerowaru)	3 Unit	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.13.18	Pembangunan Gedung Bioskop	Sub KTA Praya – Mandalika, Mandalika	1 Unit	2022	Investasi Swasta

2.13.19 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.13.19	Pembangunan Taman dan Lapangan Olahraga	Sub KTA Praya – Mandalika (Praya Barat), Sub KTA Sekotong (Sekotong), dan Sub KTA Pantai Pink (Pujut, Jerowaru)	4 Unit	2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
2.14	Pembangunan Infrastruktur Lainnya				
2.14.1	Penyediaan Kabel Laut Jaringan 20 kV	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili, Tanjung-Medana)	9,4 Kilometer	2023 - 2024	Kementerian ESDM
2.14.2	Pembangunan Gardu Induk Tanjung (1 x 60 MVA, 2 LB)	Sub KTA Gili Tramena (Tanjung-Medana)	1 Paket	2020 - 2024	Kementerian ESDM
2.14.3	Penambahan Kapasitas Gardu Induk Kuta (4 x 60 MVA)	Sub KTA Praya – Mandalika (Praya)	1 Paket	2020 - 2024	Kementerian ESDM

2.14.4 Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.14.4	Penambahan Kapasitas Gardu Induk Sekotong (2 x 60 MVA)	Sub KTA Sekotong	1 Paket	2020 - 2023	Kementerian ESDM
2.14.5	Penyediaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) di Wilayah <i>Blank Spot</i> KTA Gili-Senggigi dan KTA Mataram	Sub KTA Gili Tramena (Gili Meno, Gili Air, Tanjung-Medana), Sub KTA Senggigi (Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang, Malimbu)	15 BTS	2020 - 2024	Investasi Swasta
2.14.6	Penyediaan Jaringan <i>Backbone Fiber Optic</i> di KTA Gili-Senggigi dan KTA Mataram	Sub KTA Gili Trawangan (Tiga Gili, Tanjung-Medana), Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Bangsal, Senggigi, Malimbu, Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Kota Tua Ampenan, Ampenan Selaparang)	270 Kilometer	2020 - 2024	Investasi Swasta

2.14.7 Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.14.7	Penyediaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) di Wilayah <i>Blank Spot</i> KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Gili Nanggu, Mekaki, Belongas), Sub KTA Praya – Mandalika (Selong Belanak, Sade-Ende, Mawun, Teluk Awang), dan Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga)	25 BTS	2022 - 2024	Investasi Swasta
2.14.8	Penyediaan Jaringan <i>Backbone Fiber Optic</i> di KTA Pantai Selatan	Sub KTA Sekotong (Gili Gede, Gili Nanggu, Mekaki, Belongas), Sub KTA Praya – Mandalika (Selong Belanak, Sade-Ende, Mawun, Teluk Awang), dan Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga)	350 Kilometer	2022 - 2024	Investasi Swasta

2.15 Atraksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
2.15	Atraksi Wisata				
2.15.1	Pembangunan <i>Food Court</i>	Sub KTA Gili Tramena (Gili Trawangan)	10 Unit	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
2.15.2	Pembangunan Toilet	Sub KTA Gili Tramena (Gili Trawangan dan Gili Air)	10 Unit	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Investasi Swasta
2.15.3	Penyediaan <i>Hanging Sun Lounger</i>	Sub KTA Gili Tramena (Gili Air)	10 Unit	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
2.15.4	Penyediaan Perahu	Sub KTA Sekotong (Desa Lembar Selatan)	10 Unit	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

3 PROGRAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3	PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN LOKAL/MASYARAKAT				
3.1	Pengembangan Kapasitas				
3.1.1	Kegiatan <i>Link and Match</i> dengan Balai Latihan Kerja untuk Penempatan dan Distribusi Kebutuhan Tenaga Kerja	Sub KTA Gili Tramena (Desa Medana)	5 Paket	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
3.1.2	Kegiatan <i>Link and Match</i> dengan Balai Latihan Kerja untuk Penempatan dan Distribusi Kebutuhan Tenaga Kerja	Sub KTA Mataram, Kelurahan Ampenan	5 Paket	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kota Mataram

3.1.3 Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.3	Kegiatan <i>Link and Match</i> dengan Balai Latihan Kerja untuk Penempatan dan Distribusi Kebutuhan Tenaga Kerja	Sub KTA Sekotong (Desa Sekotong Barat, Gita Nada, Desa Pelangan, dan Mekaki)	10 Paket	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
3.1.4	Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata melalui Kerjasama	Sub KTA Praya – Mandalika (Dusun Sade)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.5	Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata melalui Kerjasama	Sub KTA Pantai Pink (Desa Sekaroh, Pantai Pink, Desa Ekas, dan Pantai Surga)	20 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

3.1.6 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 245 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.6	Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata melalui Kerjasama	Sub KTA Rinjani, Senaru	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
3.1.7	Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata melalui Kerjasama	Sub KTA Rinjani, Sembalun	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
3.1.8	Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata melalui Kerjasama	Sub KTA Gili Sulat (Desa Sugian)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

3.1.9 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.9	Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata melalui Kerjasama	Sub KTA Rinjani, Benang Stokel dan Benang Kelambu (Desa Aik Berik)	10 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.10	Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata melalui Lembaga Pendidikan Latihan dan Magang	Sub KTA Sekotong (Desa Gili Gede)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
3.1.11	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Gili Tramena (Desa Medana)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan

PTSP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
					PTSP Kabupaten Lombok Utara, Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan KUKM Kabupaten Lombok Utara, Balai Latihan Kerja (BLK)
3.1.12	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Mataram, Kelurahan Ampenan	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Perdagangan Kota Mataram, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Mataram, Dinas Pariwisata Kota Maratam
3.1.13	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Sekotong (Desa Gili Gede, dan Desa Sekotong Barat, Gita Nada)	15 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
					Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
3.1.14	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Tumpak, Mawun; Dusun Sade; Desa Kuta, Mandalika; Dusun Awang, Teluk Awang)	20 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, BLK Kabupaten Lombok Tengah
3.1.15	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Rinjani, Sembalun	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur

3.1.16 Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.16	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Rinjani, Benang Stokel dan Benang Kelambu (Desa Aik Berik)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.17	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Sub KTA Gili Tramena (Desa Medana)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
3.1.18	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Sub KTA Praya - Mandalika (Dusun Sade, Desa Kuta, Dusun Awang, Teluk Awang)	20 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

3.1.19 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.19	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Sub KTA Pantai Pink (Desa Sekaroh, Pantai Pink, Desa Ekas, Pantai Surga)	20 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
3.1.20	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Sub KTA Rinjani, Senaru	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara
3.1.21	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Sub KTA Rinjani, Sembalun	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

3.1.22 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.22	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Sub KTA Gili Sulat (Desa Sugian)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur
3.1.23	Program Sadar Wisata dengan Menggunakan Pengalaman Terbaik Internasional	Sub KTA Praya – Mandalika (Desa Selong Belanak)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.24	Program Sadar Wisata dengan Menggunakan Pengalaman Terbaik Internasional	Sub KTA Rinjani, Senaru	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
3.1.25	Pelatihan dan Pendampingan Biaya Operasional untuk Program Sadar Wisata	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Tumpak, Mawun)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

3.1.26 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.26	Pelatihan dan Pendampingan Biaya Operasional untuk Program Sadar Wisata	Sub KTA Rinjani, Benang Stokel dan Benang Kelambu (Desa Aik Berik)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.27	Pelatihan dan Pendampingan Layanan Tenaga Kerja Perhotelan	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, BLK
3.1.28	Pelatihan dan Pendampingan <i>Online Marketing</i> untuk Masyarakat Umum dan Industri (termasuk UMKM) Bidang Pariwisata	Sub KTA Sekotong, Desa Sekotong Barat, Gita Nada	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat

3.1.29 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.29	Pelatihan dan Pendampingan <i>Online Marketing</i> untuk Masyarakat Umum dan Industri (termasuk UMKM) Bidang Pariwisata	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Tumpak, Mawun	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat
3.1.30	Pelatihan dan Pendampingan <i>Online Marketing</i> untuk Masyarakat Umum dan Industri (termasuk UMKM) Bidang Pariwisata	Sub KTA Rinjani, Senaru	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur

3.1.31 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.31	Pelatihan dan Pendampingan <i>Online Marketing</i> untuk Masyarakat Umum, Industri, dan UMKM Bidang Pariwisata	Sub KTA Gili Sulat (Desa Sugian)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur
3.1.32	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan <i>Homestay</i> bagi Pelaku <i>Homestay</i> di Pulau Lombok	Sub KTA Praya - Mandalika (Dusun Ende, Desa Kuta, Mandalika)	15 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.33	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan <i>Homestay</i> bagi Pelaku <i>Homestay</i> di Pulau Lombok	Sub KTA Rinjani, Senaru	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

3.1.34 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.34	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan <i>Homestay</i> bagi Pelaku <i>Homestay</i> di Pulau Lombok	Sub KTA Rinjani, Benang Stokel dan Benang Kelambu (Desa Aik Berik)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.35	Pelatihan dan Pendampingan <i>Upgrading</i> dan <i>Upskilling</i> Kepada Tenaga Kerja di Industri Pariwisata dan Guru/Dosen	Sub KTA Gili Tramena, Desa Medana	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara

3.1.36 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.36	Pelatihan dan Pendampingan <i>Upgrading</i> dan <i>Upskilling</i> Kepada Tenaga Kerja di Industri Pariwisata dan Guru/Dosen	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Selong Belanak, Dusun Sade, Dusun Awang, Teluk Awang)	20 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.37	Pelatihan dan Sertifikasi Penyediaan Layanan Wisata Minat Khusus Seperti Olah Raga, Wisata Petualangan, Dan Lain-Lain (KTA Gili - Senggigi dan KTA Pantai Selatan)	Sub KTA Gili Tramena, Sub KTA Senggigi, Sub KTA Sekotong, Sub KTA Praya - Mandalika, dan Sub KTA Pantai Pink	10 Kegiatan	2020 - 2024	Kememparekraf/ Baparekraf, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB

3.1.38 Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.38	Penambahan Lembaga Diklat dan Jumlah Rombongan Belajar	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Selong Belanak, Dusun Awang	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.39	Penambahan Lembaga Diklat dan Jumlah Rombongan Belajar	Sub KTA Rinjani, Sembalun	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
3.1.40	Peningkatan Kualitas Perusahaan Lokal dan Pelayanan	Sub KTA Praya – Mandalika, Dusun Ende	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

3.1.41 Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.41	Pemberdayaan Kewirausahaan melalui Pelatihan Kewirausahaan	Pulau Lombok	150 Orang	2021-2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.1.42	Pelatihan Vokasional	Pulau Lombok	1.886 Orang	2021	Kementerian Ketenagakerjaan
3.1.43	<i>Review</i> dan Evaluasi Program Sadar Wisata yang sudah dilakukan	Sub KTA Gili Tramena (Desa Gili Indah, Desa Medana)	10 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Kabupaten Lombok Utara
3.1.44	<i>Review</i> dan Evaluasi Program Sadar Wisata yang sudah dilakukan	Sub KTA Sekotong (Desa Sekotong Barat, Gita Nada)	10 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

3.1.45 *Review* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.45	<i>Review</i> dan Evaluasi Program Sadar Wisata yang sudah dilakukan	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Tumpak, Mawun, Desa Selong Belanak, Dusun Ende, Desa Kuta, Mandalika, Dusun Awang, Teluk Awang)	20 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.46	<i>Review</i> dan Evaluasi Program Sadar Wisata yang sudah dilakukan	Sub KTA Pantai Pink (Desa Sekaroh, Desa Ekas, Pantai Surga)	10 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur
3.1.47	<i>Review</i> dan Evaluasi Program Sadar Wisata yang sudah dilakukan	Sub KTA Rinjani, Senaru	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

3.1.48 *Review* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.48	<i>Review</i> dan Evaluasi Program Sadar Wisata yang sudah dilakukan	Sub KTA Rinjani, Benang Stokel dan Benang Kelambu (Desa Aik Berik)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.49	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Gili Tramena, Desa Gili Indah	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Kabupaten Lombok Utara
3.1.50	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Sekotong, Desa Pelangan, Mekaki	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

3.1.51 Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.51	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Pantai Pink, Desa Sekaroh	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
3.1.52	Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan serta Bantuan Program kepada Masyarakat Sekitar Destinasi	Sub KTA Gili Sulat (Desa Sugian)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur

3.1.53 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.53	Pelatihan dan Pendampingan di Desa Wisata	Sub KTA Sekotong, Desa Pelangan, Mekaki	5 Kegiatan	2020 - 2024	Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
3.1.54	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Sub KTA Praya – Mandalika, Desa Tumpak, Mawun	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.55	Pelatihan, Pendampingan, dan Pengembangan Desa Wisata	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	4 Paket	2020 - 2024	Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

3.1.56 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.56	Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Desa Wisata Prioritas	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	4 Paket	2021 - 2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3.1.57	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Gili Tramena, Desa Gili Indah	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
3.1.58	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Gili Tramena, Desa Medana	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan KUKM Kabupaten Lombok Utara

3.1.59 Pelibatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.59	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Mataram, Kelurahan Ampenan	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram
3.1.60	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Sekotong (Desa Gili Gede)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat
3.1.61	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Sekotong (Desa Sekotong Barat, Gita Nada)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

3.1.62 Pelibatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.62	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Tumpak, Mawun)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
3.1.63	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Praya - Mandalika (Dusun Ende)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

3.1.64 Pelibatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.64	Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kepariwisata di Destinasi	Sub KTA Pantai Pink (Desa Ekas, Pantai Surga)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
3.1.65	Seminar (<i>Biannual Forum</i>) untuk Seluruh Pemangku Kepentingan Pariwisata	Sub KTA Sekotong (Desa Sekotong Barat, Gita Nada)	10 Kegiatan	2020 - 2024	Bappeda, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat
3.1.66	Seminar (<i>Biannual Forum</i>) untuk Seluruh Pemangku Kepentingan Pariwisata	Sub KTA Praya - Mandalika (Desa Selong Belanak, Dusun Ende, Desa Tumpak, Mawun, Desa Kuta, Mandalika)	10 Kegiatan	2020 - 2024	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

3.1.67 Seminar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.67	Seminar (<i>Biannual Forum</i>) untuk Seluruh Pemangku Kepentingan Pariwisata	Sub KTA Pantai Pink (Desa Sekaroh, Pantai Pink, Desa Ekas, Pantai Surga)	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
3.1.68	Pelatihan dan biaya operasional untuk Program Sadar Wisata	Sub KTA Mataram, Kelurahan Ampenan	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata Kota Mataram

3.1.69 Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.69	Pemberdayaan UMKM dalam Budidaya dan Pasca Panen Teripang	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2021 - 2024	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3.1.70	Ekowisata	Pulau Lombok	1 Kegiatan	2021 - 2022	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3.1.71	Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Usaha Terpadu	Pulau Lombok	40 Unit	2021 - 2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.1.72	Fasilitasi Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk KUKM	Pulau Lombok	10.323 KUMKM	2021 - 2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.1.73	Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi	Pulau Lombok	160 Pasar	2021 - 2024	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3.1.74 Kampung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.74	Kampung Nelayan Maju	Pulau Lombok	20 Lokasi	2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.1.75	Peningkatan Kualitas Produk Lokal	Sub KTA Gili Tramena (Desa Gili Indah)	1 Paket	2020 - 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan KUKM Kabupaten Lombok Utara
3.1.76	Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	Sub KTA Praya - Mandalika (Dusun Ende, Desa Kuta, Mandalika)	2 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

3.1.77 Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.77	Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili), Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Bangsal, Tanjung-Medana, Pantai Senggigi, Malimbu, Desa Pusuk), Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang, Kota Tua Ampenan)	8 Kegiatan	2020 - 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
3.1.78	Pembuatan Video Sosialisasi Mitigasi Bencana	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	1 Paket	2023 - 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

3.1.79 Pencetakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.79	Pencetakan Media Fisik seperti Brosur dan Papan Informasi terkait Mitigasi Bencana	Sub KTA Gili Tramena (Tiga Gili), Sub KTA Senggigi (Pelabuhan Bangsal, Tanjung-Medana, Pantai Senggigi, Malimbu, Desa Pusuk), dan Sub KTA Mataram (Ampenan Selaparang, Kota Tua Ampenan)	1 Paket	2023 - 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
3.1.80	Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat	Sub KTA Praya - Mandalika (Mandalika, Selong Belanak, Mawun, Desa Sade dan Ende, Teluk Awang), Sub KTA Sekotong (Gita Nada,	12 Program	2023 - 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Gili . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
		Gili Gede, Mekaki, Belongas), dan Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga, Pantai Pink, Pelabuhan Tanjung Luar)			
3.1.81	Pencetakan Media Fisik seperti Brosur dan Papan Informasi terkait Mitigasi Bencana	Sub KTA Praya – Mandalika (Mandalika, Selong Belanak, Mawun, Desa Sade dan Ende, Teluk Awang), Sub KTA Sekotong (Gita Nada, Gili Gede, Mekaki, Belongas), dan Sub KTA Pantai Pink (Pantai Surga, Pantai Pink, Pelabuhan Tanjung Luar)	1 Paket	2023 - 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

3.1.82 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.82	Pelatihan dan Pendampingan dalam Peningkatan Kesadaran terkait Perubahan Iklim dalam Pengembangan Pariwisata	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB
3.1.83	Pelatihan dan Pendampingan Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2020 - 2024	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3.1.84	Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata Melalui Kerjasama	Pulau Lombok	10 Kegiatan	2020 - 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pariwisata Provinsi NTB

3.1.85 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
3.1.85	Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Tenaga Kerja Pariwisata	Provinsi NTB	1 BLK UPTP, 7 BLK UPTD	2020 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan
4	PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI				
4.1	Investasi				
4.1.1	Fasilitasi Percepatan Investasi bagi Investor yang telah Memiliki Izin	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	5 Paket	2020 - 2024	Kementerian Investasi/BKPM
4.1.2	Fasilitasi Proyek Infrastruktur melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	5 Paket	2020 - 2024	Kementerian Investasi/BKPM, Kemenparekraf/ Baparekraf
4.1.3	Penyusunan Peta Peluang Investasi dan <i>Investment Project Ready to Offer</i> (I-PRO)	Seluruh Sub KTA di Pulau Lombok	5 Paket	2020 - 2024	Kementerian Investasi/BKPM

4.2 Pemasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
4.2	Pemasaran dan Branding				
4.2.1	Pembuatan <i>Toolkit</i> Pemasaran dan <i>Branding</i> Pariwisata Lombok	Pulau Lombok	1 Dokumen	2022	Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas PMPTSP Provinsi NTB, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB
4.2.2	Penerbitan Kontrak untuk Kerjasama Pemasaran Pariwisata dengan Para Pemangku Kepentingan dan Investor	Pulau Lombok	5 Dokumen	2022	Bappeda Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas PMPTSP Provinsi NTB, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB
4.2.3	Fasilitasi Pelaku Kreatif untuk Produksi Film	Pulau Lombok	5 Paket	2022 - 2025	Kemenparekraf/ Baparekraf

4.2.4 Promosi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
4.2.4	Promosi Pariwisata melalui Media di Luar Negeri	Pulau Lombok	5 Kegiatan	2022 - 2025	Kemenparekraf/ Baparekraf
4.2.5	Program Pelibatan <i>Influencers</i> dan <i>Familiarization Trip (famtrip)</i> untuk Promosi Pariwisata	Pulau Lombok	5 Paket	2022 - 2025	Kemenparekraf/ Baparekraf
4.2.6	Program <i>International Competitive Bidding</i> untuk menjadi Tuan Rumah MICE dan Olahraga International	Pulau Lombok	2 Paket	2022	Kemenparekraf/ Baparekraf
4.2.7	Kajian Pengembangan Strategi Pengelolaan Destinasi untuk adaptasi <i>Quality Tourism</i> dan Kepuasan Wisatawan	Pulau Lombok	1 Dokumen	2022	Kemenparekraf/ Baparekraf

4.2.8 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 277 -

No	Kegiatan	Lokasi	Target	Tahun	Instansi Pelaksana
4.2.8	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas <i>Tourism Information Center</i> di titik masuk dan Pusat keramaian	Pulau Lombok	1 Paket	2022	Kemenparekraf/ Baparekraf

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK NO 045593 C